

Dr. Machya Astuti Dewi,  
Dr. Meilan Sugiarto,  
Iva Rachmawati, M.Si,  
Sri Issundari, M.Hum

# Mengungkap Potensi Wisata Perbatasan



# **MENYINGKAP POTENSI WISATA PERBATASAN**

**Disusun oleh:**

**Dr. Machya Astuti Dewi**

**Dr. Meilan Sugiarto**

**Iva Rachmawati, M.Si**

**Sri Issundari, M.Hum**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

## **MENYINGKAP POTENSI WISATA PERBATASAN**

Dr. Machya Astuti Dewi, Dr. Meilan Sugiarto, Iva Rachmawati, M.Si,  
Sri Issundari, M.Hum

Cetakan I : Desember 2017

*All right reserved*

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit

vi + 142 Halaman; 15.5 x 23 cm

ISBN : 978-602-6733-31-0

Rancang Sampul : Agung Istiadi

Penata Isi : Nana N

Penerbit :

**ASWAJA PRESSINDO**

Anggota IKAPI No. 071/DIY/2011

Jl. Plosokuning V/73, Minomartani,

Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274)4462377

E-mail : [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

Website : [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)

## Pengantar

**B**uku ini lahir karena dorongan dan keinginan penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kawasan perbatasan. Potensi besar kawasan perbatasan selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Keyakinan atas kontribusi besar industri pariwisata bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan membawa buku ini menempatkan pariwisata perbatasan sebagai pilihan alternative bagi masyarakat di perbatasan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan kesejahteraan memberikan kesempatan besar bagi dikembangkannya kawasan perbatasan bagi peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di perbatasan.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai profil wilayah perbatasan, potensi yang dimiliki, dan tantangan yang dihadapi. Secara spesifik buku ini hendak menjelaskan potensi wisata yang bisa dikembangkan dari sebuah kawasan perbatasan. Kasus perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat, Belu di Nusa Tenggara Timur dan Sota di Merauke sengaja diangkat untuk menunjukkan bahwa di setiapmemiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Tentu saja ada banyak kendala yang harus dihadapi. Oleh karenanya buku ini diakhiri dengan refleksi kritis untuk memetakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Penulis sangat berterima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, karena buku ini lahir sebagai bagian dari penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan yang didanai oleh DRPM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran”

Yogyakarta. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Belu dan Kabupaten Merauke atas apresiasi dan kerjasama baiknya. Demikian juga kepada para informan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara. Penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan komentar para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan kawasan perbatasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Oktober 2017

Penulis

## Daftar Isi

Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bab. 1 Perkembangan Wisata Perbatasan dan Kondisi</b>	
Perbatasan Indonesia .....	1
1.1. Pembangunan Kawasan Perbatasan	
Melalui Pariwisata .....	2
1.2. Tantangan Wisata Perbatasan dan Pembangunan	
Kawasan Perbatasan .....	6
1.3. Kondisi Umum Kawasan Perbatasan	
Darat Indonesia .....	15
1.3.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan.....	15
1.3.2. Kawasan Perbatasan di Papua.....	17
1.3.3. Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara	
Timur (NTT).....	19
<b>Bab.2 Potensi Wisata Perbatasan di Kabupaten Sanggau,</b>	
Kalimantan Barat.....	25
2.1. Gambaran Umum Kalimantan Barat.....	26
2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Perbatasan	
di Entikong kabupaten Sanggau.....	32
2.3. Wisata yang ada di kabupaten Sanggau.....	42
2.3.1. Keraton Sanggau.....	44
2.3.2. Air Terjun Pancur Aji .....	45
2.3.3. Riam Macan.....	47
2.3.4. Goa Thang Raya.....	49
2.3.5. Air Terjun Saka Dua Sungai Munti.....	50

2.3.6. Padong Buaya .....	52
2.3.7. Arung Jeram Suruh Tembawang .....	53
2.3.8. Danau Lait.....	54
2.4. Wisata Perbatasan Entikong melalui Pasar Wisata dan Festival CrossBorder .....	55
<b>Bab. 3 Potensi Wisata Perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>71</b>
3.1. Gambaran Umum Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu (RI -Timor Leste) dan Latar Belakang Sosial.....	73
3.2. Gambaran Umum Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Belu (RI-Timor Leste) .....	81
3.3. Wisata Alam di Kabupaten Belu.....	86
3.3.1. Benteng Ranu Hitu atau Benteng Lapis Tujuh Makes .....	87
3.3.2. Situs Ksadan Makuloon.....	88
3.3.3. Kampung Adat Kewar.....	90
3.3.4. Kolam Susuk.....	82
3.3.5. Pantai Pasir Putih.....	94
3.3.6. Teluk Gurita .....	96
3.4. Wisata Belanja dan Crossborder Festival di Perbatasan sebagai Wisata Alternatif.....	97
<b>Bab. 4 Potensi Wisata Perbatasan Merauke , Papua.....</b>	<b>111</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke .....	112
4.2. Potensi Budaya dan Pariwisata .....	115
4.3. Profil Perbatasan di Distrik Sota, Merauke.....	120
4.4. Potensi Pariwisata di Sota.....	125
4.4.1. Pasar Perbatasan .....	126
4.4.2 Taman Wisata Sota .....	131
4.4.3. Ekowisata.....	135

## Bab. 1

# Perkembangan Wisata Perbatasan dan Kondisi Perbatasan Indonesia

*Meilan Sugiarto*

**W**isata perbatasan atau yang juga disebut sebagai border tourism merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang belum lama dikembangkan. Kondisi semacam ini sangat jamak di Indonesia, dimana perbatasan kerap diposisikan sebagai halaman belakang yang dengan demikian seringkali terabaikan dalam isu pembangunan. Kawasan perbatasan selama ini identik dengan wilayah yang terpinggirkan sehingga menjadi wilayah dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan yang terbatas. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga darat/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang sangat beragam mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar) (Bappenas, 2010: 63)

Perubahan paradigma terhadap pengelolaan kawasan perbatasan mulai berwujud nyata dengan dibentuknya BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Perpres No. 12 Th. 2010 mengenai Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 43 Thn 2008 tentang Wilayah Negara. Pada pasal 3 Perpres No. 12 Thn. 2010 disebutkan bahwa BNPP memiliki tugas untuk menetapkan program kebijakan pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan kegiatan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa fungsi lain dari BNPP adalah menyusun dan menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana



dan prasarana perhubungan dan saran lainnya di kawasan perbatasan. Dengan demikian, BNPP bertugas untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia.

Perubahan paradigma keamanan, dimana kawasan perbatasan lebih dimaknai sebagai buffer zone, menjadi paradigma kesejahteraan tidak berarti mengabaikan persoalan keamanan. Pendekatan keamanan masih menyertai pengelolaan kawasan perbatasan negara karena bagaimanapun juga perbatasan negara merupakan batas kedaulatan negara yang harus dijaga. Namun, kesadaran akan pentingnya isu keamanan yang lain yaitu isu keamanan non tradisional di kawasan perbatasan menggerakkan prioritas pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesejahteraan

Pembangunan kawasan perbatasan kemudian menjadi prioritas bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat mendorong percepatan pembangunan bagi sebuah kawasan adalah industri pariwisata. Saat ini pariwisata merupakan penyumbang ke 4 devisa bagi Indonesia, dari 10.054,1 US \$ pada tahun 2013, ia naik menjadi 11.629,9 US\$. Pada tahun 2015, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia naik 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total wisatawan mancanegara mencapai 9,7 juta jiwa. Dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat, dibawah Thailand, Malaysia, Singapura. Berdasarkan kewarganegaraan, Singapura, Malaysia dan Tiongkok adalah 3 kontributor wisatawan mancanegara terbesar. Sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia (urutan ke-4), Inggris (urutan ke-8), dan Amerika Serikat (urutan ke-9). Sayangnya mengacu pada rakor Spetember 2015, 10 prioritas destinasi pariwisata belum ada satupun yang meletakkan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas tujuan wisata ("Pembangunan Pariwisata" 2017).

### **1.1. Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Pariwisata**

Industri pariwisata telah muncul sebagai salah satu industri jasa terkemuka dalam perekonomian global di beberapa dekade terakhir. Arus ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata internasional telah menjadi faktor vital pertumbuhan ekonomi dan hubungan ekonomi

internasional di banyak negara berkembang. Tujuan membuka dan berinvestasi dalam pengembangan pariwisata telah menjadi pendorong utama untuk kemajuan sosio-ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan perusahaan, pembangunan infrastruktur, dan pendapatan ekspor yang diperoleh. Selain itu, kontribusi pariwisata terhadap aktivitas ekonomi di seluruh dunia diperkirakan sekitar 5% sementara kontribusinya terhadap pekerjaan diperkirakan berada di urutan 6-7% dari jumlah keseluruhan jumlah pekerjaan langsung dan tidak langsung di seluruh dunia. Menurut World Tourism Organization, antara tahun 1970 dan 2009, ada peningkatan 48 kali lipat dari penerimaan pariwisata internasional yang meningkat US \$ 17,9 miliar pada tahun 1970 menjadi US \$ 852 miliar di tahun 2009 (Ekanayake 2012, 1).

Hal ini dijelaskan dalam sejumlah studi tentang bagaimana pariwisata berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Secara umum Ekayanake (2012) membagi keterkaitan kedua hal tersebut menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama bahwa menyatakan bahwa pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Kreishan 2010, Lee and Chang 2008, Kim, et al. 2006, Dritsakis 2004, Durbarry 2004, serta Balaguer dan Cantavella-Jorda 2002). Sementara kelompok lain meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menarik pariwisata (Katircioglu 2009, Oh 2005, Narayan 2004 dan Lanza et al. 2003). Keterkaitan yang dekat antara antara pariwisata dan pembangunan ekonomi mendasari ide dari buku ini untuk menunjukkan bahwa baik pariwisata dan kebijakan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan. Menghidupkan pariwisata di suatu kawasan dapat mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak pada kawasan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan pariwisata. Sebaliknya dengan hidupnya industri pariwisata yang berpihak pada rakyat diyakini dapat memperluas kesejahteraan masyarakat di kawasan yang bersangkutan.

Merujuk pada perdebatan studi pariwisata dan pembangunan ekonomi, buku ini meyakini bahwa pariwisata dapat memberikan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat sejalan dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi kawasan terkait. Dalam arah kebijakan pariwisata Indonesia pun dapat dilihat bahwa pembangunan pariwisata secara tidak

langsung mendorong negara untuk lebih peduli pada pembangunan fasilitas publik yang lebih baik dan juga kesadaran warga lokal atas potensi dirinya dalam industri pariwisata. Kebijakan pariwisata Indonesia yang diarahkan pada: 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional (“Pembangunan Pariwisata” 2017).

Merujuk pada hubungan kausal antara pariwisata dan pembangunan ekonomi, bukan tidak mungkin kemudian untuk membangun kawasan perbatasan yang merupakan kawasan yang relatif terbelakang untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan warga. Tempat yang jauh dari pusat kota atau pusat-pusat perdagangan utama tidak menghalangi sebuah perbatasan negara yang dianggap “jauh” tersebut hadir sebagai tempat wisata yang menarik. Wisata perbatasan perlu menemukan potensinya sendiri dan menghidupkan potensi tersebut untuk dapat menarik wisatawan dari negara tetangga dan juga wisatawan dalam negeri.

Studi Dar terhadap perbatasan Jammu dan Kashmir menggarisbawahi pentingnya kesadaran atas potensi budaya dan alam yang dimiliki oleh wilayah perbatasan sebagai tujuan wisata. Dengan demikian, pembangunan fasilitas publik akan dilakukan oleh negara untuk mendukung perkembangan industri baru tersebut dimana industri wisata ini pada akhirnya akan memberikan kesempatan ekonomi baru kepada warga lokal (Hafizullah Dar 2014). Perbatasan Jammu dan Kashmir adalah salah satu turis paling terkenal sebagai salah satu destinasi wisata yang India memiliki potensi wisata yang sangat kaya. Dari 22 distrik di Jammu dan Kashmir, ada tujuh distrik perbatasan (Ponch, Rajur, Baramulla, Bandipora, Kupwara, Kargil

dan Leh) yang berbagi perbatasan internasional dengan Pakistan, Afghanistan dan China. Perbatasan ini terkenal dengan banyak sejarah, keindahan pemandangan, budaya lokal dan lain sebagainya. Namun, meski memiliki potensi wisata yang bagus, daerah ini juga terbelakang secara ekonomi; standar hidup lokal yang rendah dan kesempatan kerja yang minim.

Demikian pula riset Azmi terhadap Padang Besar di Perlis, Malaysia, menunjukkan bahwa kota yang terkenal dengan kawasan belanja perbatasannya semenjak tahun 1950 tersebut berkembang karena adanya kawasan yang menawarkan sejumlah barang-barang dan makanan Thailand yang murah. Padang Besar juga menjadi rujukan bagi para pegecer di Malaysia yang kemudian menarik minat pemerintah dan investor asing untuk turut berperan dalam industri belanja perbatasan ini dengan mengembangkan infrastruktur dan fasilitas lain bagi pengunjung (Azila Azmi et all. 2015). Chin menegaskan bahwa jika tidak segera mendapat dukungan negara kawasan ini hanya akan menjadi kawasan transit semata yang mungkin saja akan segera kalah oleh kawasan lainnya yang memiliki pembangunan kawasan lebih baik (Goh Hong Ching et. all. 2014).

Terkait dengan pariwisata perbatasan, Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana, menyatakan bahwa pembangunan (wilayah perbatasan) harus multisektoral dan terintegrasi. Pariwisata menjadi entry poin dalam membangun daerah perbatasan. Jika pariwisata berkembang, maka sektor lainnya akan ikut berkembang. Negara memberi perhatian pada cross border tourism karena Indonesia mempunyai perbatasan panjang yang berpotensi besar dikunjungi warga negara tetangga. Potensi wisata cross border sangat besar, seperti di perbatasan Timor Leste, perbatasan Papua New Guenea, perbatasan Singapura, dan Philipina. Merujuk Pitana, cross border bukan hanya persoalan tourism, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa, kebanggaan, identitas dan lainnya. Ia juga bukan hanya terkait dengan economic values, tetapi juga sosial dan political values. Ada tahun 2017, terdapat 217 kegiatan terkait cross border tourism di daerah, di 30 titik dan 8 wilayah. Terbanyak di daerah Batam dan Bintan, kemudian di Entikong, Atambua dan wilayah perbatasan lainnya. Target dari cross border tourism adalah

ada 3,146 juta wisatawan cross border yang datang berkunjung (Berita Bali.com, 2017). Pembangunan pariwisata perbatasan juga sesuai dengan fokus Presiden Joko Widodo yang ingin menggairahkan daerah perbatasan. Jokowi sejak awal menaruh perhatian serius kepada warga masyarakat Indonesia yang berada di pulau terluar, perbatasan, daerah terpencil (CNN Indonesia, 2016).

## **1.2. Tantangan Wisata Perbatasan dan Pembangunan Kawasan Perbatasan**

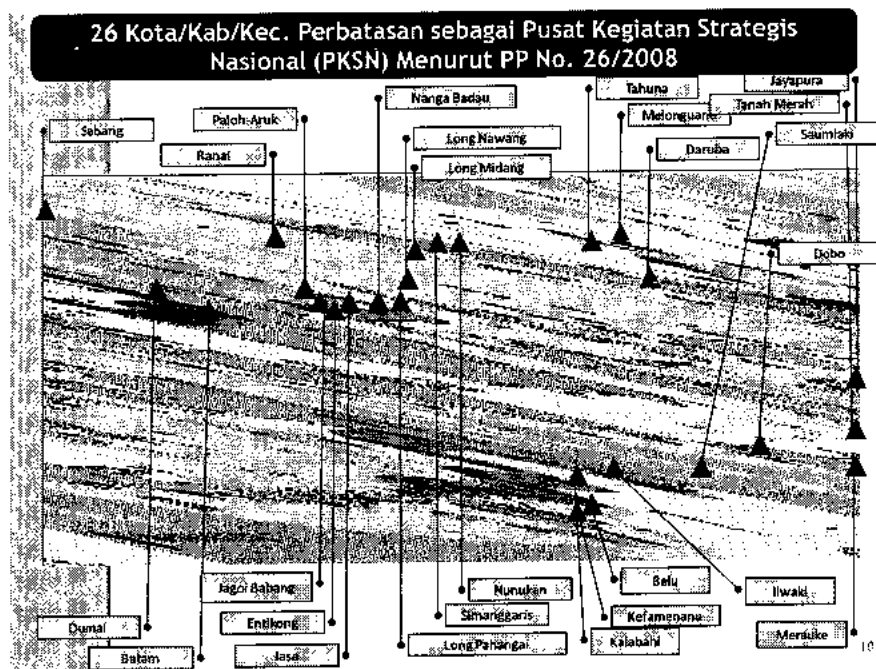
Merujuk pada upaya untuk meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan, maka pemerintah pada tahun 2007 telah menentukan kawasan mana saja yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan mengingat secara umum kawasan perbatasan di Indonesia yang masih sangat tertinggal. Hal ini didorong oleh letaknya yang sangat jauh dari pusat kota dan terjebak dalam paradigma pembangunan yang menempatkan mereka sebagai halaman belakang. Akibatnya, kawasan perbatasan cenderung kurang diperhatikan dan pembangunan menjadi lamban. Pendekatan keamanan yang mendominasi pengelolaan kawasan perbatasan menempatkan mereka sebagai bagian dari pertahanan negara sehingga pembangunan sosial ekonomi tidak mendapatkan perhatian perhatian. Kawasan tersebut disebut dengan kawasan strategis perbatasan nasional.

Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut PKSN, adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, ditetapkan 26 PKSN dengan 16 diantaranya adalah perbatasan darat yang tersebar di 4 propinsi, yaitu di Kalimantan

Barat 5 PKS (Paloh, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, dan Jasa), di Kaltim 5 PKS (Nunukan, Simanggaris, Long Midang, Long Pahangai, dan Long Nawan), di NTT 3 PKS (Atambua, Kalabahi, dan Kefamenanu), serta di Papua Barat 3 PKS (Tanah Merah, Merauke, dan Arso). Berikut wilayah yang ditetapkan sebagai PKS.

Gambar 1.1  
Wilayah yang Ditetapkan sebagai PKS



Sumber: PP No. 26/2008

Adanya pergeseran paradigma mengenai arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking*, maka wilayah perbatasan saat ini merupakan wilayah yang menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dengan *outward looking*, wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai pintu belakang, namun lebih ditempatkan sebagai pintu terdepan dari aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara. Perubahan paradigma ini juga diikuti oleh pergeseran dalam pengelolaan wilayah

perbatasan dengan mengombinasikan pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan serta pendekatan lingkungan (Rencana Induk BNPP 2011-2014). Pendekatan keamanan semata dalam pengelolaan perbatasan dirasa tidak lagi cukup mengingat berbagai kasus keamanan yang muncul di wilayah perbatasan semata-mata terdorong oleh ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Melalui pendekatan kesejahteraan, wilayah ini dapat menjadi wilayah dengan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik. Sementara, pendekatan lingkungan dipakai untuk tetap menjaga agar lingkungan kawasan perbatasan tidak dikorbankan semata-mata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Hal ini diperkuat dengan memasukkan pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu dari program prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, kawasan perbatasan juga merupakan kawasan yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Kawasan perbatasan secara umum juga merupakan kawasan yang bernilai ekonomis yang tinggi, terutama potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, perikanan dan kelautan). Sementara itu, sebagian lainnya merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai "paru-paru dunia" (world heritage) yang perlu dijaga dan dilindungi. Beberapa sumberdaya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya, seperti: Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, dan Suaka Margasatwa Danau Sentarum yang sangat indah di Kalimantan Barat. Selain itu terdapat pula Taman Nasional Kayan Mentarang di

Kalimantan Timur dan Taman Nasional Wasur di Merauke, Papua. Merujuk pada hal tersebut maka pengembangan pariwisata harus dapat berjalan beriringan dengan kepentingan yang cukup beragam yang terdapat di perbatasan, terutama kepentingan bagi keamanan negara sekaligus keamanan lingkungan.

Di sisi lain riset Dr. Suprayoga Hadi menyebutkan bahwa selain memiliki potensi yang besar bagi perekonomian, lingkungan dan keamanan, hingga saat ini kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Di beberapa kawasan terjadi kesenjangan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Kondisi ini pada umumnya disebabkan oleh masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi, permukiman, perdagangan, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan perbatasan tersebut menyebabkan minimnya kegiatan investasi, rendahnya optimalisasi pemanfaatan SDA, rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan, sulit berkembangnya pusat pertumbuhan, keterisolasian wilayah, ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan sosial ekonomi dari negara tetangga, tingginya biaya hidup, serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan perekonomian kawasan perbatasan perlu dilakukan secara seimbang dengan pengelolaan aspek keamanan yang juga sering muncul sebagai isu krusial di kawasan ini. Kegiatan eksploitasi SDA secara ilegal oleh pihak asing, seperti illegal logging dan illegal fishing, masih marak terjadi dan menyebabkan degradasi lingkungan hidup. Adanya kesamaan budaya dan adat antara masyarakat di kedua negara serta faktor kesenjangan ekonomi menyebabkan munculnya mobilitas penduduk lintas batas yang memerlukan penanganan khusus. Lemahnya sistem pengawasan di kawasan perbatasan menyebabkan adanya potensi kerawanan kawasan ini terhadap transnasional crime. Permasalahan lain yang tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan kawasan perbatasan adalah belum disepakatinya penetapan wilayah negara di beberapa segmen batas darat dan laut melalui kesepakatan dengan negara tetangga (Dr. Suprayoga Hadi, Tanpa Tahun).



Merujuk pada situasi tersebut maka disusunlah strategi pengembangan PKSND sebagai pintu gerbang dengan negara tetangga di perbatasan meliputi:

1. Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi memerlukan dukungan ketersediaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dll. Pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan. Pembangunan sarana dan prasarana lain yang perlu dipercepat adalah pembangunan pos lintas batas khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati. Di samping itu perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti bea cukai, karantina, imigrasi serta keamanan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dilakukan melalui penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penyediaan tempat usaha yang sesuai karakteristik wilayah dan sumberdaya alam yang tersedia di wilayahnya akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal.
3. Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dari seluruh unsur masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan kompetisi dan pemanfaatan peluang usaha yang khususnya dengan masyarakat negara tetangga. Selain itu, upaya pemberdayaan masyarakat ini harus disesuaikan dengan system nilai, norma, dan adat istiadat yang berlaku di wilayah perbatasan, dengan demikian upaya ini harus dilakukan dengan menumbuhkembangkan partisipasi penuh masyarakat lokal dengan dukungan aktif pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga adat.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal. Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada terutama sumberdaya lokal. Sumberdaya ini antara

lain berupa sumberdaya manusia, sosial budaya lokal, dan juga sumberdaya alam.

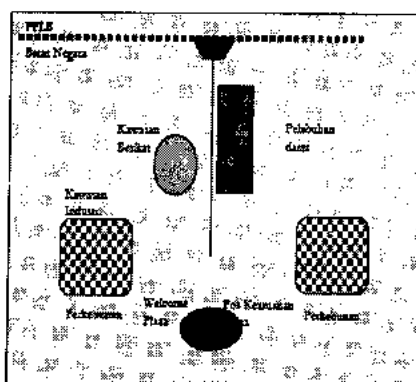
5. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan Secara Selektif Dan Bertahap. Beberapa wilayah perbatasan mempunyai peluang untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra-sentra industri dan perdagangan. Untuk mendukung strategi ini diperlukan pelibatan sektor swasta untuk melakukan investasi dengan dukungan fasilitas dari pemerintah baik fasilitas fiskal (dalam bentuk insentif) maupun non-fiskal (infrastruktur).
6. Ketahanan Masyarakat. Dalam rangka meningkatkan rasa kebangsaan dan bela negara pada masyarakat di perbatasan yang saat ini telah mengalami penurunan karena lebih berorientasi pada negara tetangga melalui kemudahan-kemudahan informasi dan komunikasi yang diperoleh sehari-hari, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan program penyuluhan dan sosialisasi wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI.
7. Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu (Percepatan Pembentukan Kelembagaan, Penataan Kewenangan Pengelolaan).
8. Peningkatan Kerjasama Regional di Wilayah Perbatasan.

Merujuk pada beragamnya kondisi kawasan perbatasan, beberapa model pengembangan kawasan perbatasan dibuat agar dapat menampung sejumlah kepentingan yang ada di kawasan perbatasan. Beberapa model pengembangan kawasan perbatasan darat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan perbatasan yang ada antara lain sebagai pusat pertumbuhan, transito, stasiun riset dan pariwisata alam, serta agropolitan. Di dalam masing-masing model tersebut dapat dibangun beberapa komponen pembentuk kawasan perbatasan, seperti PLB, pelabuhan darat (dry port), kawasan wisata alam/lingkungan dan budaya, akuakultur, kawasan berikat (bounded zone), kawasan industri, dan welcome plaza. Berikut model yang telah dikembangkan dalam pengembangan wilayah perbatasan oleh Bappenas.

## 1. Model Pusat Pertumbuhan

Pusat-pusat pertumbuhan ini diharapkan menjadi kota-kota perbatasan yang maju dengan tingkat kemakmuran yang lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah sekitarnya. Untuk itu perlu fasilitas: Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), Kawasan berikat, Kawasan industri, Welcome Plaza dan Kawasan Pemukiman.

Gambar 1.2.  
Model Pusat Pertumbuhan

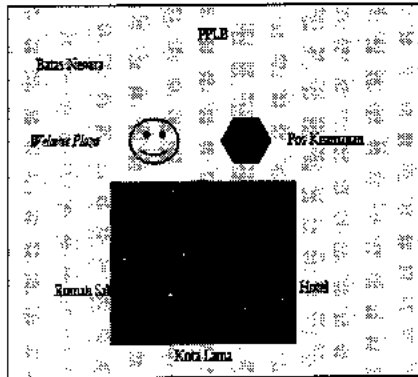


Sumber: Kajian Bappenas, 2003

## 2. Model Transito

Model Transito adalah wilayah perbatasan yang berfungsi sebagai tempat transit para pelintas batas Indonesia dari dan ke negara tetangga. Fungsi-fungsi yang dibutuhkan : PPLB, Welcome Plaza dan Kawasan Pemukiman.

Gambar 1.3.  
Model Transito

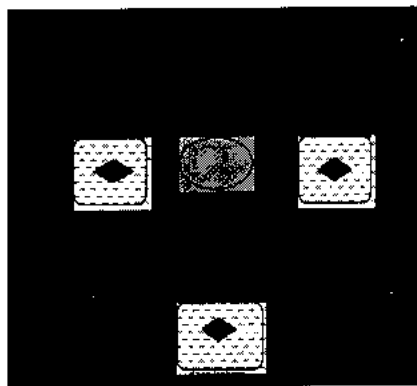


Sumber: Kajian Bappenas, 2003

### 3. Model Stasiun Riset dan Wahana Wisata

Merupakan Wilayah perbatasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, budaya lokal yang beraneka ragam serta kondisi alam yang eksotis sangat baik untuk dijadikan obyek wisata. Komponen yang diperlukam: Stasiun Riset, Kawasan Wisata Lingkungan, PPLB dan Welcome Plaza.

Gambar 1.4  
Model Stasiun Riset dan Wahana Wisata



Sumber: Kajian Bappenas, 2003

Pada model yang dikembangkan oleh Bappenas, terlihat bahwa model dapat menyesuaikan dengan kondisi perbatasan yang ada. Model Stasiun Riset dan Wahana Wisata misalnya dapat dikembangkan di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Sota, Merauke dimana terdapat Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur menjadi tempat bagi 80 jenis mamalia dan 399 jenis burung. Mamalia besar asli yang terdapat di kawasan Taman Nasional Wasur adalah tiga marsupial yaitu kanguru lapang (*Macropus agilis*), kanguru hutan/biasa (*Darcopsis veterum*) dan kanguru bus (*Thylogale brunii*). Sedangkan dari 399 jenis burung yang merupakan endemic Papua ada 74 spesies seperti garuda irian (*Aquila gunisyei*), cenderawasih (*Paradisea apoda novaguineae*), kakatua (*Cacatua sp*), mambruk (*Crown pigeons*), kasuari (*Cassowary*), elang (*Circus sp*), alap-alap (*Accipiter sp*), Namdur (*Ailuroedus sp*), tetengket (*Alcedo sp*), belibis (*Anas sp*), dan cangak (*Ardea sp*). Sisanya merupakan burung migran yang migrasinya dalam kurun waktu tertentu. Dengan pertimbangan dan pengaturan tersebut maka diharapkan pengembangan kawasan pariwisata dapat berjalan bersama dengan perlindungan lingkungan yang ada pada kawasan yang sama.

Pada model Pusat Pertumbuhan nampaknya lebih sesuai untuk perbatasan di Indonesia-Timor Leste di Belu. Kawasan yang cenderung kering ini membutuhkan dorongan lain selain mengandalkan kekayaan sumber daya alam yang memang belum cukup nampak terolah dengan baik. Kondisi fisik alam memang menyulitkan pertanian untuk dikembangkan kecuali tanaman tertentu yang dapat tumbuh di lahan kering. Namun demikian, dengan memanfaatkan lokasinya yang strategis tersebut maka wilayah Belu dapat menjadi pusat pertumbuhan dengan pasar internasionalnya. Diketahui bahwa penduduk Timor Leste di perbatasan masih banyak yang tergantung pada Indonesia. Tidak mungkin kawasan ini dapat menjadi pusat pertumbuhan melalui pasar international yang diletakkan di kawasan perbatasan. Pada beberapa kawasan perbatasan lain, pasar internasional semacam ini juga menjadi pusat pariwisata perbatasan yang menarik dengan mengandalkan shopping tourism-nya. Beberapa kawasan lain mungkin masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan model yang lebih tepat bagi pengembangan kawasan perbatasan.

### **1.3. Kondisi Umum Kawasan Perbatasan Darat Indonesia**

Kawasan perbatasan darat Indonesia terdapat pada tiga pulau, yaitu Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, yang tersebar beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan perbatasan memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain. Berikut merupakan gambaran dari beberapa kawasan perbatasan darat yang ada. Sebagai penjelasan mengenai potensi dan pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

#### **1.3.1. Kawasan Perbatasan Darat di Kalimantan**

Pulau Kalimantan memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.

Wilayah perbatasan di Negara Bagian Serawak, Malaysia mempunyai karakteristik geografis yang sama dengan wilayah perbatasan di Kalimantan. Namun dibandingkan dengan Indonesia, kondisi wilayah perbatasan Malaysia di Kalimantan lebih berkembang Apabila dibandingkan antara wilayah perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, karakteristik geografi wilayah antara kedua provinsi ini agak berbeda. Di Kalimantan Barat, geografinya relatif datar bergelombang, sehingga lebih mudah untuk dibangun jalan sejajar perbatasan, demikian pula tata guna lahan untuk budidaya perkebunan juga sangat memungkinkan. Sebaliknya dengan geografi di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, daerah datarnya sangat terbatas dan berada tidak jauh dari pantai. Di pedalaman, wilayah perbatasan terdiri dari hutan lindung yang masuk dalam Taman Nasional Krayan Mentarang. Oleh sebab itu arus orang dan barang dari Kalimantan

Timur ke Sabah sebagian besar menggunakan moda angkutan laut melalui Nunukan. dan Tarakan. Berbeda dengan di Kalimantan Barat, yaitu antara Kuching (Ibukota Sarawak) dengan Pontianak (Ibukota Kalimantan Barat) sudah terhubung jalan darat melalui pos lintas batas di Entikong, Kabupaten Sanggau. Secara umum karakteristik dan potensi kabupaten-kabupaten di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah: a. Kabupaten Sambas dan Bengkayang bila dibandingkan dengan kabupaten lain relative maju dalam sektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan perdagangan, b. Kabupaten Sanggau lebih menfokuskan pada perkembangan perkebunan (*Strategi Dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, 2003)

Gambar 1.5

Desa Sei Limau, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur



Sumber: [https://www.kompasiana.com/mattbento/perbatasan-indonesiamalaysia-rawan-narkoba\\_54f97f9ba3331142038b513e](https://www.kompasiana.com/mattbento/perbatasan-indonesiamalaysia-rawan-narkoba_54f97f9ba3331142038b513e).

Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat, serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki

fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana. Masyarakat di sekitar perbatasan sudah menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan. Pos-pos keamanan dan pertahanan yang tersedia di sepanjang jalur tradisional tersebut masih sangat terbatas, demikian pula dengan kegiatan patroli keamanan yang masih menghadapi kendala berupa minimnya sarana dan prasarana transportasi.

Potensi sumberdaya alam kawasan perbatasan di Kalimantan cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, terdiri dari hutan produksi (konversi), hutan lindung, dan danau alam yang dapat dikembangkan menjadi daerah wisata alam (ekowisata) serta sumberdaya laut yang ada di sepanjang perbatasan laut Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat. Beberapa sumberdaya alam tersebut saat ini berstatus taman nasional dan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya seperti Cagar Alam Gunung Nyiut, Taman Nasional Bentuang Kerimun, Suaka Margasatwa Danau Sentarum di Kalimantan Barat, serta Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur. Saat ini beberapa areal hutan tertentu yang telah dikonversi tersebut berubah fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta nasional bekerjasama dengan perkebunan Malaysia.

### **1.3.2. Kawasan Perbatasan di Papua**

Sebelum mengalami pemekaran kabupaten, kawasan perbatasan di Papua terletak di 4 (empat) kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke. Setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka kawasan perbatasan di Papua terletak di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke, serta 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan (distrik). Dari kelima kabupaten tersebut, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Digoel merupakan kabupaten baru hasil pemekaran.



Garis perbatasan darat antara Indonesia dan PNG di Papua memanjang sekitar 760 kilometer dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mei 1895.

Gambar 1.6.  
Perbatasan Papua-PNG di Skouw



Sumber: <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3272925/makin-cinta-indonesia-di-perbatasan-papua-nugini>

Jumlah pilar batas di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah. Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan Papua terdapat di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan di Distrik Sota Kabupaten Merauke. Kondisi pintu perbatasan di Kota Jayapura masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagaimana pintu perbatasan di Sanggau dan Nunukan, karena fasilitas CIQS-nya belum lengkap tersedia. Secara umum, aktifitas pelintas batas masih berupa pelintas batas tradisional seperti yang dilakukan oleh kerabat dekat atau saudara dari Papua ke PNG dan sebaliknya, sedangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan komoditas antara kedua negara melalui pintu batas di Jayapura masih sangat terbatas pada

perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dan alat-alat rumah tangga yang tersedia di Jayapura. Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di Marauke relatif lebih terbatas dibanding dengan Jayapura, dengan kegiatan utama arus lintas batas masyarakat kedua negara dalam rangka kunjungan keluarga dan perdagangan tradisional. Kegiatan perdagangan yang relatif lebih besar justru terjadi di pintu-pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan masyarakat kedua negara secara ilegal tanpa adanya pos lintas batas atau pos keamanan resmi.

Kawasan perbatasan Papua memiliki sumberdaya alam yang sangat besar berupa hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Hampir seluruh hutan Papua berada di bawah konversi Taman Nasional Wasur. Selain sumberdaya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumberdaya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Namun sebaliknya dengan kondisi masyarakatnya, sebagian besar masih miskin, tingkat kesejahteraan rendah dan tertinggal Kondisi masyarakat Papua di sepanjang perbatasan yang miskin, tertinggal dan terisolir ini tidak jauh berbeda dan relatif setara dengan masyarakat di PNG.

### **1.3.3. Kawasan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Perbatasan antar negara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste Utara (TTU). Perbatasan antara negara di NTT merupakan perbatasan antar negara darat yang terbaru antara Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekusi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (*enclave*). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Pintu perbatasan di NTT terdapat di beberapa kecamatan yang berada di tiga kabupaten tersebut, namun pintu perbatasan yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Fasilitas perbatasan yang ada seperti CIQS, sudah cukup lengkap dan saat ini sedang berada dalam tahap pembangunan dengan fasilitas pendukung lain yang jauh lebih lengkap seperti pasar rakyat. Sarana dan prasarana perhubungan darat maupun laut ke pintu perbatasan Timor Leste cukup baik, sehingga akses kedua pihak untuk saling berkunjung relatif mudah dan cepat. Kondisi jalan dari Atambua, ibukota Belu, menuju pintu perbatasan cukup baik kualitasnya, sehingga perjalanan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam.

Gambar. 1.7.

Gambar Ruma Penduduk di Perbatasan Belu



Sumber: <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3273365/begini-wajah-perbatasan-indonesia-dan-timor-leste>

Kegiatan perdagangan lintas batas yang terjadi sebagian besar adalah perdagangan tradisional yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan terutama masyarakat Timor Leste yang berada di Bobonaro. Sedangkan kegiatan lintas batas

lainnya adalah kunjungan kekerabatan antar keluarga karena banyaknya masyarakat eks pengungsi Timor Leste yang masih tinggal di wilayah Atambua, sedangkan warga Indonesia lainnya yang berkunjung ke Timor Leste adalah dalam rangka melakukan kegiatan sosial dan adat lainnya.

Potensi sumberdaya alam yang tersedia di kawasan perbatasan NTT pada umumnya tidak terlalu besar, mengingat kondisi lahan di sepanjang perbatasan tergolong kurang baik bagi pengembangan pertanian, sedangkan hutan di sepanjang perbatasan bukan merupakan hutan produksi atau konversi serta hutan lindung atau taman nasional yang perlu dilindungi. Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. Kondisi masyarakat di wilayah Indonesia ini saat ini pada umumnya bahkan masih relatif lebih baik dari masyarakat Timor Leste yang tinggal di sekitar perbatasan. Dengan demikian, kawasan perbatasan di NTT khususnya di lima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun daerah NTT secara keseluruhan perlu diperhatikan secara khusus karena dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara masyarakat NTT di perbatasan dengan masyarakat Timor Leste, khususnya penduduk Belu yang sebagian besar masih miskin.

## **Kesimpulan**

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang dipercaya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian penduduk dimana industri tersebut tumbuh. Pada sejumlah riset menunjukkan bahwa industri ini bahkan telah memberikan perubahan ekonomi yang cukup besar pada kawasan yang terpencil sekalipun termasuk pada kawasan perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan dan pusat kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi karena pembangunan kawasan perbatasan menjadi kawasan industri pariwisata telah menarik kedatangan sejumlah wisatawan untuk datang. Kepedulian

negara untuk hadir melalui pembangunan infrastruktur dan sejumlah fasilitas publik memberikan dorongan yang semakin kuat pada lajunya industri pariwisata di kawasan terkait. Pada beberapa kasus tertentu pihak swasta menjadi salah satu contributor penting atas pembangunan kawasan pariwisata di perbatasan.

Beberapa kawasan perbatasan di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dengan karakteristik yang berbeda. Sayangnya, secara umum memiliki tingkat pembangunan yang masih sangat rendah. Sementara itu, beberapa kawasan perbatasan lain merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dieksploitasi secara serampangan yang akan berakibat pada flora dan fauna yang ada. Merujuk pada kondisi alam dan sosial yang ada di kawasan perbatasan, maka pengembangan industri pariwisata di kawasan perbatasan harus disesuaikan dengan karakteristik kawasan tempatan. Meski menarik pembangunan yang lebih baik, pengembangan kawasan perbatasan sudah selayaknya memakai pendekatan *community based tourism*.

## Referensi:

- Azmi, Azila, Suria Sulaiman, Dian Aszyanti, Atirah Mohd Asridan, Mohamad Azli Razali . 2015. "Shopping Tourism and Trading Activities at the Border Town of Malaysia-Thailand : A Case Study in Padang Besar". *International Academic Research Journal of Social Science* 1(2) 2015 Page 83-88.
- Balaguer, J. and Cantavella-Jorda, M. 2002. "Tourism as a long-run Economic Growth Factor: The Spanish Case. *Applied Economics*, 34, 877-884.
- Ching, Goh Hong, Tan Wan Hin dan Ching Fei Ern. 2014. "Border town issues in tourism development: The case of Perlis, Malaysia". *GEOGRAFIA Online™ Malaysian Journal of Society and Space*. 10 issue 2 (68 - 79) 68 © 2014, ISSN 2180-2491.
- Dar, Hafizullah. 2014. "The Potential of Tourism in Border Destinations: A study of Jammu and Kashmir". *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure* Vol. 4 (2) - (2014) ISSN: 2223-814X .

- Dritsakis, N. 2004. "Tourism as a long-run Economic Growth Factor: An Empirical Investigation for Greece Using a Causality Analysis". *Tourism Economics*. 10, 305–316.
- Durberry, R. (2004). "Tourism and Economic Growth: The Case of Mauritius". *Tourism Economics*. 10, 389–401.
- Ekanayake, E. M. dan Aubrey E. Long. 2012. "Tourism Development and Economic Growth in Developing Countries". *The International Journal of Business and Finance Research*. Volume 6. Number 1 2012.
- Dr. Suprayoga Hadi. Tanpa Tahun. "Program Pembangunan Kawasan Perbatasan". [https://www.academia.edu/5071675/PROGRAM\\_PEMBANGUNAN\\_KAWASAN\\_PERBATASAN](https://www.academia.edu/5071675/PROGRAM_PEMBANGUNAN_KAWASAN_PERBATASAN). Diunduh 25 Oktober 2017.
- Katircioglu, S. T. 2009. "Revisiting the Tourism-led-growth Hypothesis for Turkey Using the Bounds Test and Johansen Approach for Cointegration". *Tourism Management* 30, 17–20.
- Kim, H. J., Chen, M. H., and Jang, S. C. (2006). Tourism expansion and economic development: The case of Taiwan. *Tourism Management*, 27(5), 925–933.
- Kreishan, F. M. M. (2010). Tourism and Economic Growth: The Case of Jordan, *European Journal of Social Sciences*, 15 (2), 229-234.
- Lanza, A., Templec, P., and Urgad, G. (2003). The implications of tourism specialization in the long-run: An econometric analysis for 13 OECD economies. *Tourism Management*, 24, 315–321.
- Lee, C. C. and Chang, C. P. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at panels, *Tourism Management*, 29, 180–192.
- Narayan, P. K. (2004). Economic impact of tourism on Fiji's economy: Empirical evidence from the computable general equilibrium model. *Tourism Economics*, 10, 419–433.
- Oh, C. O. 2005. The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. *Tourism Management*, 26, 39–44.

- , 2003. *Strategi Dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional.
- , 2016. "Cross Border Tourism Gairahkan Ekonomi Masyarakat Perbatasan". *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160828211053-307-154360/cross-border-tourism-gairahkan-ekonomi-masyarakat-perbatasan/>.
- , 2017. "Pembangunan Pariwisata". Multilateral Meeting I Updated Hasil Ksepakatan Versi 2 Maret 2016 Kedeputan Bidang Ekonomi. [https://www.bappenas.go.id/files/penyusunan\\_rkp\\_2017/seri\\_multilateral\\_meeting/Pembangunan\\_Pariwisata\\_Update\\_2\\_Maret\\_2016.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/penyusunan_rkp_2017/seri_multilateral_meeting/Pembangunan_Pariwisata_Update_2_Maret_2016.pdf). Diunduh 25 Oktober 2017.
- , 2017. Kemenpar Genjot Pengembangan Wisata Daerah Perbatasan. *Berita Bali.com*. <https://beritabali.com/read/2017/08/15/201708150001/Kemenpar-Genjot-Pengembangan-Wisata-Daerah-Perbatasan.html>. . Diunduh 25 Oktober 2017.

## **Bab 2**

# **Potensi Wisata Perbatasan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat**

*Sri Issundari*

**K**alimantan adalah wilayah yang memiliki perbatasan darat. Secara administratif, kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia terdiri dari tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Kutai Barat (Kalimantan Timur), serta Malinau dan Nunukan (Kalimantan Utara),

Kalimantan Barat (selanjutnya disingkat Kalbar) merupakan salah satu provinsi yang memiliki beberapa pintu perbatasan. Pintu perbatasan tersebut merupakan daerah dimana baik warga Indonesia maupun Malaysia bisa keluar masuk secara legal untuk melakukan aktifitas di kedua negara. Dari beberapa pintu perbatasan tersebut, titik perbatasan yang paling ramai adalah Entikong di kabupaten Sanggau. Menurut Fariastuti dalam Zaenuddin Hudi Prasajo, Entikong adalah *the busiest point of entry and exit* dibandingkan beberapa titik yang biasanya ditemukan arus masuk dan keluar manusia dan barang di Kalimantan Barat seperti Paloh, Sapanan, Jagoi Babang, Sidding, Badau dan Merakai Panjang (Zaenuddin Hudi Prasajo 2013). Entikong merupakan jalan darat yang menghubungkan antara Pontianak – Entikong – Kuching sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Tidak mengherankan jika di daerah ini arus barang dan manusia yang keluar masuk di kedua negara relatif lebih tinggi daripada daerah lainnya. Hal ini terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) (“Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat”, Tanpa Tahun, <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2>)



Kalbar memiliki potensi alam yang sangat unik. Pemandangan alam yang ada di Kalbar terbilang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Tercatat beberapa daerah yang menarik untuk dijadikan sebagai ekowisata seperti di kabupaten Sanggau ada sungai yang menarik untuk dijadikan destinasi yaitu Sungai Sekayam bisa dibilang cocok untuk dikembangkan menjadi wisata arung jeram. Selain itu, untuk kawasan pinggiran Sungai Kapuas, kawasan wisata budaya Kabana di tepi sungai di Kecamatan Kapuas. Selain wisata sungai, juga wisata danau, air terjun, seperti Pancur Aji dan Riam Macan Gua Maria ataupun hutan kota dan Gua Thang Raya (“Seperti Apa Pariwisata di Perbatasan Indonesia-Malaysia?” <https://travel.detik.com/travel-news/d-3573166/seperti-apa-pariwisata-di-perbatasan-indonesia-malaysia>). PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Entikong semakin meningkatkan daya tarik perbatasan karena baru saja direnovasi sehingga terlihat lebih megah dan menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

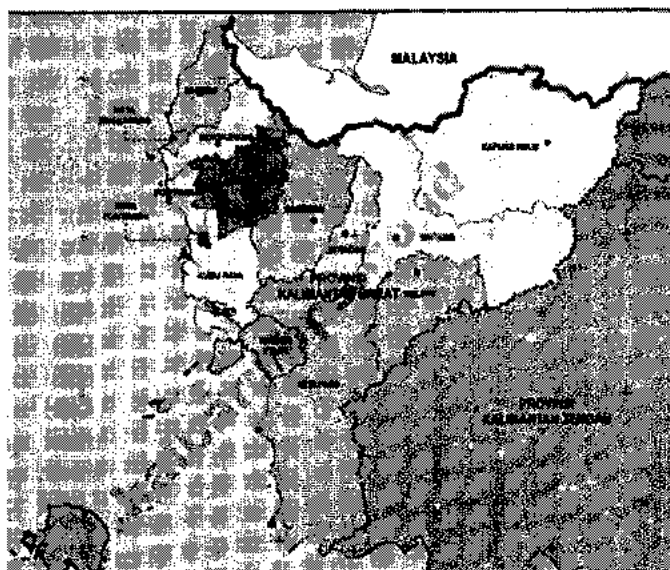
Selain eko wisata, beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Pusat melalui Kemenpar menyelenggarakan Festival Wonderful Indonesia di wilayah perbatasan yang menarik perhatian wisatawan asing terutama dari Malaysia. Festival ini menampilkan artis lokal dan ibukota serta berbagai acara yang menarik wisatawan dari mancanegara. Wisata perbatasan yang dikembangkan ini memiliki potensi yang cukup besar untuk mendatangkan devisa terutama dari wisatawan asing yang datang. Jika wilayah perbatasan semakin ramai dikunjungi maka dengan sendirinya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan negara serta menghilangkan kesan daerah perbatasan sebagai daerah miskin serta tertinggal. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai provinsi Kalbar serta memberikan deskripsi mengenai salah satu daerah perbatasan di kabupaten Sanggau yaitu Entikong.

## **2.1. Gambaran Umum Kalimantan Barat**

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 LU serta 3°05 LS serta di antara 108°0 BT dan 114°10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh

garis Khatulistiwa (garis lintang  $0^{\circ}$ ) tepatnya di atas Kota Pontianak oleh karena itu Kalbar adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta kelembaban tinggi.

Gambar 2.1.  
Peta Kalimantan Barat



Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka 2016 dalam [http://kalbar.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://kalbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)

Propinsi Kalbar dibatasi oleh beberapa wilayah. Disebelah Utara adalah Sarawak (Malaysia), di sebelah selatan : Laut Jawa & Kalteng, di sebelah timur : Kalimantan Timur dan di sebelah barat: Laut Natuna dan Selat Karimata. (“Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat”, <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2>). Secara geografis panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak sejauh 1.200 km. Dari garis perbatasan sepanjang ini, kurang lebih 850 km berada di wilayah Kalimantan Barat (“Keadaan Wilayah dan Penduduk di Perbatasan Kalimantan”, <http://www.batasnegeri.com/keadaan-wilayah-dan-penduduk-di-perbatasan-kalimantan/>). Sebagian besar wilayah Kalbar adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km<sup>2</sup> atau 7,53 persen dari luas

Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur (“Kalimantan Barat dalam Angka 2016”, [http://kalbar.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://kalbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)).

Jumlah penduduk Provinsi Kalbar tahun 2015 sekitar 4,789 juta jiwa, dimana sekitar 2,439 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,349 juta jiwa adalah perempuan. Mereka semua tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, yang terbagi atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, dari empat belas Kabupaten/Kota meliputi 174 total Kecamatan dan 1.977 total desa dan 99 total kelurahan (Permendagri No.56 Tahun 2015). Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk Kalbar didominasi oleh suku Melayu dan Dayak. Sedangkan sisanya dari berbagai etnis pendatang.

Tabel 2.1.

Komposisi Masyarakat Kalbar Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku bangsa	Konsentrasi
1	Suku Melayu	33,75%
2.	Suku Dayak	33,75
3.	Tionghoa	10,01
4.	Jawa	9,41
5.	Madura	5,51
6.	Bugis	3,20
7.	Sunda	1,21
8.	Banjar	0,56
9.	Batak	0,56
10.	Lain-lain	1,85

Sumber : BPS ahun 2003

Wilayah Kalimantan Barat sebenarnya lebih besar daripada Pulau Jawa, meskipun demikian kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 33 jiwa/km<sup>2</sup> persegi masih jauh dibawah pulau Jawa yang mencapai 1.317 jiwa/km<sup>2</sup> (“Kalimantan Barat dalam Angka

2016”, [http://kalbar.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://kalbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)) Tingkat kepadatan yang rendah ini sebenarnya kurang menguntungkan dalam hal percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kalbar. Hal ini yang menjadi Kalbar menjadi provinsi yang tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia. Tidak optimalnya pembangunan untuk mengatasi kebutuhan dasar masyarakat juga dapat dilihat dari rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar. Berdasarkan data tahun 1996, 2006, dan 2009 tampak bahwa IPM Provinsi Kalbar merupakan yang terendah dibanding dua provinsi lainnya dan angka IPM ini juga berada di bawah rata-rata IPM Nasional. Kalbar berada pada urutan ke 28, sedangkan Kalimantan Tengah berada pada urutan ke 7 dan Kalimantan Timur pada urutan ke 5 (Maria Ratnaningsih, 2011).

Aktivitas perekonomian penduduk di Kalbar sebagian besar masih bersifat tradisional baik sektor pertanian maupun perdagangan. Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi ini masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 54,39 persen adalah tamat SLTP kebawah. Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yaitu menyerap sekitar 57,21 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 sebanyak 2.357.224 orang, dimana 2.235.887 orang diantaranya bekerja (94,85 persen). Dengan demikian, Angkatan Kerja Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2015 adalah 121.337 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pengangguran terbuka sebesar 5,15 persen. (“Kalimantan Barat dalam Angka 2016”, [http://kalbar.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://kalbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)).

Tingginya angka pengangguran menyebabkan tingkat kemiskinan di Kalimantan tinggi. Menurut data dari BPS Jumlah dan persentase penduduk miskin, Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 387,430 orang (7,88 persen) dibandingkan provinsi lainnya yang ada di Kalimantan. Namun demikian persentase penduduk miskin di provinsi ini masih berada dibawah nasional yang mencapai 10,64 persen (BPS, 2017). Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini dapat memicu munculnya tindak kejahatan. Menurut riset yang

dilakukan Nikodemus Niko, Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kalbar menyebabkan terjadinya human trafficking (Nikodemus Nico, 2016). Selain itu kemiskinan juga menimbulkan berbagai masalah di Kalbar seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan serta pekerja anak (Yarlina Yacoub, 2012).

Sebenarnya Kalbar bukan provinsi yang minim dengan sumber daya alam. Pulau ini memiliki lahan pertambangan, hutan, lahan pertanian, serta perkebunan yang luas. Di bidang pertambangan Kalbar memiliki tambang batu bara yang terdapat di Senaning, dan tambang emas, yang berada di semua aliran sungai di sepanjang kawasan perbatasan. Sementara itu, potensi hutan terdapat di hutan lindung seperti Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Gunung Niut, dan Taman Nasional Betung Karihun, yang sangat potensial dijadikan objek wisata alam. Potensi perikanan air tawar apabila dikembangkan memiliki potensi untuk dikembangkan, mengingat bahwa wilayah ini memiliki spesies ikan air tawar yang relatif lengkap, yang hanya terdapat di beberapa negara saja di dunia ("Kondisi daerah Perbatasan di Indonesia", <http://telegraf.co.id/kondisi-daerah-perbatasan-di-indonesia/>).

Di bidang pertanian Kalbar memberikan perhatian besar terhadap tanaman pangan dan hortikultura, Luas panen pada 2015 mencapai 433.944 hektare dan produktivitas sebesar 2,94 ton per hektare, lebih rendah dibandingkan posisi pada 2013 yang mencapai 464.898 hektare dan 3,10 ton per hektare. Produksi padi sawah memberikan kontribusi paling besar terhadap produksi padi di Kalbar, tahun 2015 mencapai 87,83% dari total produksi padi, sisanya sebesar 12,17% disumbang dari padi ladang (Profil Kalimantan Barat 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Perencanaan Pembangunan daerah, 2016). Meskipun demikian, produksi dan luas panen padi selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2012–2015) mengalami kecenderungan menurun, terkecuali pada tahun 2013. Berdasarkan informasi dari Kepala BPS Provinsi Kalbar produksi padi turun dikarenakan ada daerah lain, penghasil padi terkena puso atau bencana banjir, tidak tersedia benih sehingga petani tidak bisa menanam padi dan ada juga konversi lahan sawah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Jumlah lahan

yang terus menurun ini sangat berpotensi untuk menambah jumlah pengangguran mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kalbar terserap di bidang pertanian yaitu sebesar 57,21 persen (“Kalimantan Barat dalam Angka 2016”, [http://kalbar.bps.go.id/website/pdf\\_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf](http://kalbar.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf)). Jika tenaga kerja yang sebagian besar bekerja di lahan pertanian sudah tidak bisa lagi terserap di bidang tersebut maka mereka harus mencari cara agar bisa mendapatkan lahan kerja lain untuk mempertahankan hidupnya.

Selain lahan pertanian, sebagian lagi masyarakat memanfaatkan lahan untuk perkebunan. Penduduk setempat di Kalbar ini menanam berbagai tanaman seperti damar, madu, karet, dan gaharu. Dari keseluruhan hasil panen tersebut, maka dapat dihitung bahwa setiap orang (khususnya kepala keluarga) mampu memperoleh pendapatan rata-rata Rp 4.700.000,-/bulan (Maria Ratnaningsih, 2011). Pola pencaharian masyarakat lokal masih terpola sama yaitu sebagai peramu dan dilakukan secara komunal seluruh masyarakat desa. Pemanfaatan hasil hutan non kayu memberikan tingkat penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan dari bekerja sebagai buruh maupun karyawan. Di samping itu, apabila pemanfaatan hasil hutan tetap dilakukan dengan pola kearifan lokal maka kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan dapat dikendalikan karena pola pemanfaatan lahan akan disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Namun pola dan kearifan lokal ini yang hingga saat ini masih sangat kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena target pembangunan dan ekonomi lebih bersifat skala besar dan jangka pendek. (Maria Ratnaningsih, 2011). Adanya perbedaan dalam pemanfaatan lahan sebenarnya sebenarnya akan memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena disisi lain pemerintah dikejar target pembangunan secara masif sedangkan pengelolaan lahan perkebunan oleh masyarakat masih sebatas kebutuhan dan bersifat tradisional.

Minimnya hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kalbar tentunya memunculkan berbagai pertanyaan seberapa besar manfaat yang diperoleh masyarakat atas hasil pembangunan yang dilakukan sementara potensi yang dimiliki provinsi ini tidak kalah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pertanyaan yang berikutnya

adalah jika kesejahteraan yang yang diperoleh masyarakat belum maksimal, lalu bagaimana halnya dengan wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan beranda depan negara ketika bersanding dengan negara lain. Jika selama ini negara masih menggunakan paradigma perbatasan sebagai daerah yang harus dijaga karena adanya resiko ancaman keamanan dalam bentuk imigrasi ilegal ataupun penyelundupan maka hal ini berpengaruh terhadap kurangnya perhatian akan kesejahteraan warga perbatasan. Berikut dibawah ini akan dijelaskan kondisi umum perbatasan di daerah Sanggau dengan mengambil kasus di PPLB Entikong. Entikong dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu pintu resmi keluar masuknya barang dan manusia secara internasional. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat disekitar di sekitar Entikong dan kabupaten Sanggau masih rendah.

## **2.2. Gambaran Umum Pengelolaan Perbatasan di Entikong kabupaten Sanggau**

Garis perbatasan darat di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak Malaysia secara keseluruhan memiliki panjang 1.885,3 km. Jumlah pilar batas yang ada hingga tahun 2007 secara keseluruhan berjumlah 9.685 buah, terdiri dari pilar batas tipe A sebanyak 4 unit, tipe B sebanyak 18 unit, tipe C sebanyak 225 unit dan tipe D sebanyak 9438 unit. Kondisi tugu batas pada umumnya masih memprihatinkan dan jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan panjang garis perbatasan yang ada.

Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006, secara keseluruhan telah disepakati sebanyak 18 pintu batas (exit and entry point) di kawasan ini. Hingga tahun 2007, baru terdapat 2 (dua) pintu batas resmi di KalBar yaitu di Entikong, kabupaten Sanggau dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). PPLB itu merupakan bagian dari enam PPLB yang telah disepakati dengan pihak Sarawak untuk dibuka di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak (Paloh, Sajingan Besar, Jagoibabang, Entikong, Jasa Karangas Kagau, dan Nanga Badau). Selain PLBN tersebut, terdapat pula pos lintas batas (PLB) yang tidak resmi, yaitu sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung

di Sarawak. Hingga saat ini, yang telah disepakati kedua negara baru 10 buah desa di Kalimantan Barat dan 7 kampung lainnya di Sarawak (Dendy Kurniadi, 2009). Adanya keterikatan kekeluargaan dan suku antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan ini menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui pintu-pintu perbatasan yang belum resmi.

Entikong adalah area perbatasan yang merupakan bagian dari kecamatan Entikong. Kecamatan Entikong dengan ibukota kecamatan di desa Entikong memiliki luas 506,89 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 12.828 Jiwa dan kepadatan penduduk bruto adalah 25 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 18 dusun. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 147 km dari Ibukota Kabupaten Sanggau. Prasarana yang telah ada terdiri dari jalan Negara 14,5 km, jalan kabupaten 41,7 km, jalan desa 83,37 km. Sarana pendidikan yang tersedia terdiri dari 1 unit TK, 18 unit SD/MI, 2 unit SLTP dan 2 unit SMK. Sarana kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas dan 1 unit puskesmas pembantu. Untuk menuju Entikong dari Pontianak dapat ditempuh melalui jalan trans Kalimantan poros selatan sampai kecamatan Tayan kemudian melintas ke Utara melewati kecamatan Batang Tarang, Sosok, Kembayan dan akhirnya masuk ke Entikong melalui jalan trans Kalimantan poros Utara. Jalan trans Kalimantan baik poros selatan maupun utara pada umumnya kondisinya baik. Jarak dari Pontianak sampai Entikong 310 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam Kawasan (“Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan”, [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf)).

Secara geografis wilayah Entikong merupakan daerah pegunungan, perbukitan, dikelilingi oleh hutan lebat, dengan suhu udara (28-32)<sup>o</sup>C serta banyak mengalir sungai-sungai dan sungai yang terbesar adalah Sungai Sekayam. Sebagian besar tanahnya adalah tanah merah yang mengandung gambut yang terdiri dari: pertama, tanah sawah berupa tanah sawah irigasi setengah teknis (65,90 ha) dan tanah sawah tadah hujan, atau disebut juga sawah rendengan (5,07 ha). Kedua, tanah kering (202,76 ha) yang terdiri dari tanah tegal atau kebun (187,55 ha), tanah ladang/tanah huma (20.174,22 ha). Ketiga,



tanah basah (50,69 ha), keempat tanah hutan dengan luas kurang lebih 28.172,95 ha, kelima, tanah perkebunan kurang jelas ada berapa ha, yang dapat diketahui tanah untuk perkebunan swasta kurang lebih 1.733,56 ha dan tanah untuk keperluan fasilitas umum.

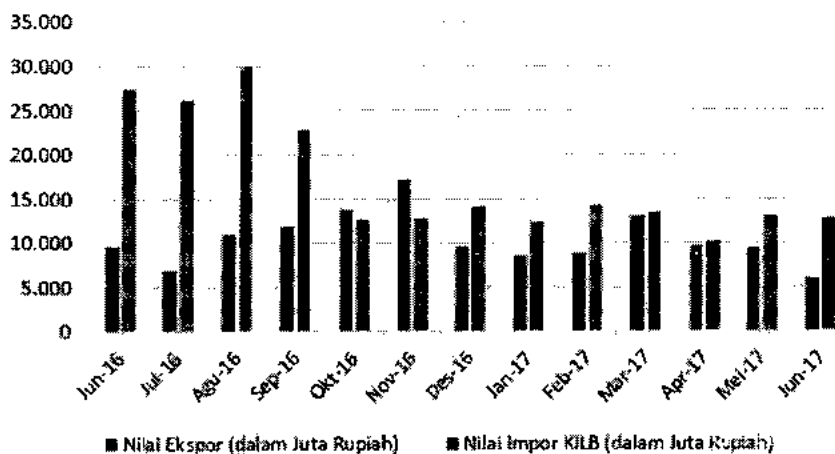
Kecamatan Entikong dengan ibu kota kecamatan Entikong terdiri atas 5 desa yaitu, Desa Entikong dengan luas wilayahnya 11.092 ha dan jumlah penduduk 6.073 jiwa; Desa Semanget dengan luas wilayahnya 10.040 ha dan jumlah penduduknya 2.110 jiwa, Desa Nekan dengan luas wilayahnya 6.255 ha dan jumlah penduduk 2.021 jiwa, Desa Pala Pasang dengan luas wilayahnya 8.420 ha dan jumlah penduduk 1.017 jiwa, dan Desa Suruh Tembawang dengan luas wilayahnya 14.882 ha dengan jumlah penduduk 2.795 jiwa. Terdapat kegiatan sosial ekonomi yang melibatkan kedua masyarakat di Entikong dan Tebedu (Serawak), yang dikenal dengan istilah Sosek Malindo dan tempat pelaksanaan kegiatannya secara bergiliran setiap tahunnya. Bentuk kegiatannya yang sampai ke menyentuh masyarakat kecil hanyalah kegiatan olahraga tradisional serta pesta seni budaya lokal, sehingga kegiatan tersebut perlu untuk ditingkatkan agar dapat menyentuh kehidupan masyarakat di kedua wilayah tersebut (“Suku Penjaga Patok Negara”, <https://hadisuharno.wordpress.com/2010/06/15/suku-penjaga-patok-negara/>.)

Perbatasan Entikong terletak di ujung paling Utara Kabupaten Sanggau dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak. Entikong berjarak jauh dari ibukota propinsi yaitu 267 km dari kota Pontianak. Meskipun demikian kabupaten ini terletak pada jalur lalu lintas strategis yang menghubungkan Kabupaten Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu serta terletak pada jalur Trans Kalimantan menghubungkan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, demikian pula melalui Pusat Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di wilayah Indonesia terhubung dengan jalur Trans Borneo di wilayah Malaysia yang melintasi Serawak dan Brunai Darussalam. Dua kecamatan di Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan Serawak yaitu Kecamatan Sekayam dan Entikong dengan panjang garis perbatasan di kedua kecamatan ini lebih kurang 129,5 km.

Perbatasan Entikong sebenarnya merupakan kawasan yang paling tinggi aktivitas ekonominya di sepanjang Kalimantan Barat–Sarawak (Kompas, 2003). Sejak diresmikan tahun 1991 lalu lintas keluar masuknya barang melalui PPLB nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 nilai barang masuk sebesar 748.328,54 USD sedangkan nilai barang keluar sebesar 2.231.714,16 USD (“Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan”, [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf)). Tercatat nilai realisasi sejak 2006-2013 telah mencapai US \$ 15.456.151, 45. (Robby Irsan, Luthfi Muta’ali, Sudrajat, 2017).

Tabel. 2.2.

Transaksi Perdagangan Melalui PLBN Entikong



Sumber: KPPBC Entikong

Meskipun kawasan perbatasan Kalbar memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi nampaknya hal tersebut belum mampu merubah dinamika aktivitas ekonomi baik yang dilakukan oleh masyarakat khusus perbatasan maupun yang berada di luar perbatasan. Meskipun nilai transaksi perdagangan Indonesia ke Malaysia melalui Entikong mengalami kenaikan, akan tetapi nilainya masih dibawah ekspor Malaysia ke Indonesia. Tercatat Nilai ekspor tertinggi Indonesia ke Malaysia di Entikong di bulan

November 2016 sekitar Rp 17,5 miliar. Impor tertinggi dari Malaysia ke Indonesia terjadi pada Agustus 2016, senilai Rp 30 miliar. Selama setahun itu, ekspor tak pernah mengungguli impor. Pada Juni 2017, nilai ekspor di angka Rp 6 miliar nilai impor sekitar Rp 17 miliar. Adapun komoditas yang diekspor melalui Entikong ada lima macam yaitu kopra, disusul hasil laut, barang kebutuhan harian seperti sabun atau sampo, gula kelapa, dan arang kayu (“Ekspor Indonesia vs Impor Malaysia via PLBN Entikong, Menang Mana?”. <https://news.detik.com/berita/d-3613000/ekspor-indonesia-vs-impor-malaysia-via-plbn-entikong-menang-mana>).

Rendahnya nilai ekspor Indonesia terhadap Malaysia melalui PPLB Entikong juga diikuti dengan rendahnya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Sebagai contoh kondisi jalan raya di Tebedu Serawak sangat lebar dengan aspal mulus berkualitas dengan jarak di kanan kiri ke rumah-rumah penduduk cukup jauh, sementara itu kondisi jalan di Entikong yang dekat dengan perbatasan agak sempit dengan lebar antara 5 sampai 6 meter, secara umum banyak yang rusak atau berlubang dan sangat tidak nyaman ketika dilintasi (Heryantoro, Tanpa Tahun). Dengan demikian infrastruktur yang telah dikembangkan di Sanggau ini nampaknya masih kalah jauh dibandingkan Malaysia. Sangat kontras dengan pihak Sarawak yang mampu membangun kawasan perbatasan dengan baik, Perbatasan Entikong terlihat belum siap mengantisipasi dinamika kawasan perbatasan.

Gambar 2.2.

Perbandingan infrastruktur Tebedu Serawak dan Entikong Sanggau.



Sumber : Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan dalam [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf)).

Ketimpangan infrastruktur dan fasilitas umum ini menyebabkan kesenjangan kehidupan perbatasan. Masyarakat lebih memilih masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh harga semen 1 juta rupiah per sak, bensin 25 ribu rupiah per liter, sementara di negara Malaysia, lebih murah, di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia. (Reza Firmansyah, 2014)

Riset yang dilakukan oleh Robby Irsan dkk menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Entikong terhadap Kabupaten Sanggau rata-rata sebesar 2,32% (Tahun 2009-2013), dengan kondisi yang relative menurun sejak tahun 2009. Menurunnya kontribusi Entikong dalam mendukung perekonomian Kabupaten Sanggau cenderung menunjukkan stagnasi fungsi kawasan perbatasan Entikong yang seharusnya mampu menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitarnya. Kondisi tersebut perlu dicermati karena Entikong menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berperan penting, baik secara internal kawasan perbatasan ataupun eksternal (Kabupaten Sanggau dan Kota Pontianak) (Robby Irsan, Luthfi Muta'ali, Sudrajat 2017). Sedangkan menurut Dendy Kurniadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Wilayah Perbatasan Entikong belum mendorong pada

pengembangan kawasan perbatasan disebabkan karena sedikitnya hubungan ekonomi yang terjadi, infrastruktur yang *bottleneck*, perkembangan sektor non primer, dan kerangka kebijakan yang belum terpadu. Hal ini merupakan fase awal dalam perkembangan sebuah kawasan perbatasan (Dendy Kurniady, 2009). Meskipun laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kecamatan Entikong relatif tinggi yaitu 9,51% per tahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sanggau yang hanya 1,44% per tahun. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk ini tidak diikuti dengan pertumbuhan sosial ekonomi di Kecamatan Entikong bila dilihat dari pendapatan perkapita penduduknya pada tahun 2005 adalah Rp 2,8 juta (berdasarkan harga konstan). Kondisi ini berada pada urutan ke 10 dari total 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau (“Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan”, dalam [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf)). Dengan pendapatan masyarakat Entikong yang lebih rendah daripada pendapatan kecamatan lainnya di Sanggau, maka hal ini berpengaruh pula pada kemampuan daya beli masyarakat terutama kebutuhan yang sifatnya primer. Stagnannya kondisi perekonomian di Sanggau ini membuat kemiskinan menjadi hal yang biasa dijumpai. Pintu perbatasan resmi Entikong sebagai jalur keluar masuknya barang ternyata belum bisa memberikan manfaat positif bagi masyarakat disekitarnya.

Rendahnya kesejahteraan di wilayah Entikong serta ketersediaan akses di wilayah tetangga menyebabkan warga perbatasan banyak yang lebih memilih untuk melakukan aktifitas sosial ekonomi ke Serawak karena kehidupan di sana lebih baik.. Sebagai gambaran di kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak. Lebih 60% penduduk masyarakat Puring Kencana juga memiliki KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran), hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia. Di bidang pendidikan, usia anak-anak yang bersekolah, lebih memilih sekolah di Malaysia dengan perbandingan dalam tahun ajaran 2008 hanya 13 anak yang masuk SD di Puring Kencana, sedangkan 83 anak lainnya memilih sekolah di Malaysia. Alat ukur (mata uang) yang digunakan lebih dominan ringgit dari

pada rupiah (Reza Firmansyah, 2014). Tingginya minat masyarakat perbatasan Entikong untuk melakukan aktifitas di Serawak juga tidak terlepas dari banyaknya kesamaan adat istiadat, tradisi serta budaya diantara keduanya sehingga tidak terlalu menyulitkan apabila harus beradaptasi. Komunikasi dan interaksi yang erat di antara masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau dengan masyarakat Serawak Malaysia disebabkan oleh pertalian dan kesamaan budaya dan bahasa yang didominasi oleh suku Dayak.

Suku Dayak merupakan penduduk mayoritas di Sanggau (“Demografi di Kalimantan Barat”, <http://www.thecolourofindonesia.com/2015/10/demografi-kalimantan-barat.html>). Kehidupan mereka sangat tergantung kepada pertukaran barang dan tenaga kerja ke wilayah Malaysia, terutama disebabkan rendahnya tingkat aksesibilitas ke wilayah Indonesia dan terbukanya aksesibilitas yang baik ke wilayah Malaysia. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengakibatkan lepasnya keterikatan nasionalisme dikalangan masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan. Apalagi penduduk asli di Entikong banyak memiliki banyak kesamaan dengan penduduk asli Serawak. Secara umum mayoritas penduduk yang tinggal di daerah perbatasan Entikong adalah suku Dayak yang terbagi menjadi dua bagian yaitu suku Dayak Bidayuh dan suku Dayak Iban. Suku Dayak Iban banyak mendiami di Serawak, sedangkan suku Dayak Bidayuh sebagian berada di wilayah Sanggau bermukim di sepanjang sungai Sekayam dan sebagian lagi bermukim di anak sungai Sekayam. Suku Dayak Bidayuh yang tinggal di Sanggau memiliki keturunan berupa sub-suku yang bermukim di Kecamatan Entikong maupun di negara bagian Serawak. Terdapat sub suku Dayak yang kampungnya langsung berdampingan dengan kampung suku Dayak di Serawak, dan berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu Sisakng, Sontas, Badat, Gun, Senangkat’n, Mugut, Sekajang, Sungkung, Empayeh dan Iban. Dapat dikatakan bahwa sebagian suku Dayak memiliki hubungan intens dengan suku Dayak Serawak, dalam bidang ekonomi, keagamaan, kekerabatan, budaya dan kesenian hal dikarenakan mereka asal-usul nenek moyang yang sama (“Suku Penjaga Patok Negara”. <https://hadisuharno.wordpress.com/2010/06/15/suku-penjaga-patok-negara>). Adanya hubungan yang intens antara suku Dayak di Sanggau dan Serawak ini mendorong sebagian generasi muda yang

ada di wilayah perbatasan memilih mengajukan permohonan migrasi ke Serawak. Imran Manuk Kepala Desa Suruh Tembawang yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia mengatakan bahwa hampir 80% masyarakat Suruh Tembawang menjadi tenaga kerja Indonesia di Serawak (“80 Persen Masyarakat Suruh Tembawang Bekerja Malaysia”. <https://kalbar.antaranews.com/berita/303681/80-persen-masyarakat-suruh-tembawang-bekerja-malaysia>).

Menurut Suharno, dengan kondisi seperti itu wilayah perbatasan tidak hanya dilihat dalam perspektif geografis spasial, tetapi juga harus dipandang dalam perspektif geografis sosial kultural. Daerah perbatasan merupakan wilayah dimana tingkat mobilitas masyarakat yang melintasinya serta keluar masuk wilayah relatif tinggi. Dalam hal ini, batasan-batasan kultural tidak dapat disamakan dengan batasan geografis sehingga salah satu permasalahan yang muncul adalah kesamaran kultural dengan batasan-batasan yang ada (bersifat konvensional) telah mencair. Interaksi yang terjalin berlangsung sangat intens karena masyarakat kedua negara memilih untuk melewati jalan setapak yang menghubungkan antara kedua kampung yang terpisah secara geopolitik. Pada akhirnya masyarakat tidak membedakan mana yang merupakan kultur milik daerahnya yang berada dalam wilayah Entikong dan mana kultur yang milik Serawak. Artinya mereka kurang menyadari dan memahami akan kultur daerahnya maupun kultur bangsanya. Dalam konteks hubungan antara budaya daerah/nasional Indonesia dan budaya negara tetangga, hal ini dapat mengakibatkan identitas diri/budaya daerah/nasional bangsa Indonesia sebagai ciri satu kesatuan negara dan bangsa akan memudar. Oleh karena itulah secara tidak sengaja, perilaku dan gaya hidup atau sosio kultural yang diwujudkan masyarakat daerah perbatasan Indonesia cenderung mencerminkan karakteristik sosio-kultural masyarakat daerah negara tetangganya dan atau sebaliknya (“Suku Penjaga Patok Negara”, <https://hadisuharno.wordpress.com/2010/06/15/suku-penjaga-patok-negara>). Adanya pemahaman yang rendah akan identitas budaya dan politik negara ditambah dengan permasalahan kesejahteraan yang relatif rendah mendorong sebagian masyarakat perbatasan memilih bermigrasi dan dan bermukim di negara tetangga. Riset yang dilakukan oleh Sam Arifin secara lebih rinci bahkan menyebutkan ada tiga faktor yang memicu migrasi penduduk Sanggau. *Pertama*, melalui

jalur perkawinan, Biasanya terjadi dikalangan perempuan Indonesia yang dinikahi oleh warga Malaysia. Jalur kekerabatan ataupun melalui jalur perkenalan ketika berinteraksi dalam pekerjaan seringkali dimanfaatkan untuk menikah. Perempuan Indonesia (Kalbar) yang dinikahi oleh Pria Malaysia, pada umumnya lebih memilih tinggal di Malaysia, mengikuti suaminya karena Pria Malaysia pada umumnya enggan tinggal di perbatasan Indonesia karena secara sosial ekonomi tidak menjamin keberlangsungan hidup mereka. *Kedua*, jalur migrasi penduduk yaitu melalui jalur kelahiran. Proses ini dilakukan karena pelayanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan sangat tidak memadai, sehingga untuk menjaga kesehatan Ibu dan bayinya, penduduk yang akan melahirkan lebih memilih ke Malaysia dengan pertimbangan fasilitasnya sangat memadai dan jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan ke Kabupaten. *Ketiga*, motif ekonomi yaitu kesenjangan ekonomi dengan Sarawak. Sebagai contoh beberapa warga Kecamatan Entikong, khususnya di Desa Suruh Tembawang yang jaraknya 64 km dari Entikong, kebanyakan migrasi ke Malaysia secara permanen karena ekonomi faktor ekonomi (Sam Arifin, 2011).

Dampak dari minimnya infrastruktur dan kesejahteraan di daerah perbatasan menyebabkan nasionalisme masyarakat pedesaan menjadi kabur. Mereka memindahkan patok-patok perbatasan ke wilayah negara tetangga, dan ini juga yang menjadi motivasi bagi masyarakat di perbatasan untuk berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Riset yang dilakukan oleh Bappenas dalam Sam Arifin menemukan adanya gejala berupa temuan kasus bergesernya patok perbatasan negara oleh para TNI penjaga perbatasan. Berdasarkan dokumen Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan, bahwa hingga tahun 2006 tercatat ada 19.328 unit patok batas darat Indonesia-Malaysia. Sebagian besar dalam keadaan hancur dan hilang termakan usia maupun akibat erosi. Dampaknya, menurut TNI, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat sebesar 6.403 hektare (Sam Arifin, 2011).

Selain itu, dengan berkurangnya jumlah penduduk perbatasan, maka pengawasan swakarsa oleh masyarakat terhadap para pelintas batas (cross border), maupun patok batas wilayah negara tidak bisa dilakukan secara efektif. Sebab, penjagaan yang secara formal



dilakukan oleh aparat TNI hanya pada titik-titik tertentu saja, padahal panjang wilayah perbatasan di Kalimantan sangat luas, yakni mencapai 2004 km dari Pulau Sebatik, Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Sam Arifin, 2011).

Selain masalah nasionalisme dampak yang muncul dari kondisi perbatasan yang menyedihkan adalah kriminalitas yang meningkat. Berdasarkan laporan dari LSM anak bangsa dari tahun 2007-2010 jumlah korban perdagangan perempuan dan anak melalui PPLB Entikong Kabupaten Sanggau berjumlah 1.599 (Nikodemus Niko, 2016). Sedangkan beberapa kasus human trafficking yang terjadi di wilayah perbatasan di empat kabupaten lainnya masih belum dapat terdeteksi. Hal ini dikarenakan wilayah perbatasan selain Entikong memang masih belum banyak di ekspose ke permukaan mengenai permasalahan human trafficking (Nikodemus Niko, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadi hal yang penting mengingat daerah perbatasan merupakan halaman depan bangsa di dalam menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kedaulatan negara. Minimnya ketahanan berupa kesejahteraan daerah perbatasan akan berakibat pada semakin tergantungnya masyarakat pada perekonomian negara tetangga hingga dapat mengurangi identitas dan rasa nasionalisme masyarakat. Oleh karena itu kunci utama untuk meningkatkan pengawasan swakarsa masyarakat perbatasan adalah meningkatkan kesejahteraan daerah perbatasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perbatasan adalah dengan mengembangkan potensi alam dan budaya yang tersedia menjadi potensi ekowisata yang dapat dikembangkan. Wisata perbatasan sangat potensial untuk dikembangkan mengingat selama ini sumber daya alam daerah perbatasan belum digarap secara maksimal padahal ada banyak potensi yang dapat dikembangkan disana.

### **2.3. Wisata yang ada di Kabupaten Sanggau**

Kabupaten Sanggau memiliki berbagai tawaran destinasi wisata yang unik mulai dari bangunan bersejarah, kuliner, sampai dengan pemandangan alam yang tidak kalah unik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Potensi yang dimiliki ini tentunya akan semakin

menarik untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berkembangnya pariwisata di Kalbar tentunya diharapkan dapat memiliki efek menular berwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Upaya pemerintah kabupaten Sanggau untuk mendorong pariwisata daerah tampaknya sejalan kebijakan pemerintah provinsi Kalbar dalam pengelolaan pariwisata. Menurut Sekda Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie untuk meningkatkan kunjungan wisata pemerintah menetapkan empat strategi pengembangan wisata di Kalbar yaitu: *pertama*, pemasaran dan promosi pariwisata dengan sasaran meningkatkan sebanyak mungkin kunjungan wisman dan wisnus melalui sistem pemasaran wisata terpadu. *Kedua*, pengembangan destinasi pariwisata, dengan sasaran meningkatkan daya tarik destinasi Kalbar dan daya saingnya secara regional dan nasional, berbasis ekowisata, desa wisata eksotis dan kearifan lokal. *Ketiga*, dengan pengembangan industri pariwisata dengan sasaran meningkatkan partisipasi pengusaha lokal di industri pariwisata daerah serta mengembangkan keragaman dan daya saing di setiap destinasi. *Keempat*, pengembangan institusi pariwisata dengan sasaran riset dan penguatan organisasi pariwisata daerah (“Kalbar Tetapkan Empat Strategi Pengembangan Pariwisata”, <https://kalbar.antaranews.com/berita/331617/kalbar-tetapkan-empat-strategi-pengembangan-pariwisata>). Strategi tersebut dilakukan secara terintegrasi dan sinergis yang melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan maupun masyarakat lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan pariwisata Kalbar yang berkelanjutan.

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan ber-rawa serta dialiri beberapa sungai di antaranya Kapuas, Sekayam, Mengkiang, Kambing dan Tayan, oleh karena itu daerah ini tidak memiliki pantai tetapi menawarkan keindahan alam yang berbeda berupa air terjun, goa serta danau. Wisata di kabupaten Sanggau juga memiliki keunikan yaitu adanya peninggalan bangunan berupa keraton yang sampai sekarang masih berdiri dengan megah serta menjadi warisan budaya Kalbar. Berikut dibawah ini wisata yang ditawarkan di kabupaten Sanggau :

### 2.3.1. Keraton Sanggau

Keraton Surya Negara merupakan keraton peninggalan Kerajaan Sanggau yang didirikan oleh Putri Daranante. Pada awalnya, keraton ini dibangun di Desa Mengkinang atau ke arah Hulu Sungai Sekayam. Namun belum diketahui secara pasti pada tahun berapa keraton ini didirikan. Pada tahun 1826, Sultan Ayub sebagai Panembahan kerajaan memindahkan pusat Kerajaan Sanggau ke Desa Kantik serta mendirikan Masjid Jami yang terletak di Kota Sanggau. Ketika kerajaan diperintah oleh Panembahan Kusuma Negara, dibuat kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewakan sebidang tanah di kawasan hilir Sungai Sekayam

Gambar 2.3  
Keraton Sanggau



Sumber : <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalim/2016/06/keraton-sanggau/>

Keraton ini terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a) Rumah Kuta ; Merupakan rumah utama atau dapat disebut sebagai kantor dari raja dan ditinggali oleh raja. Bangunan ini memiliki luas kurang lebih 1.118 m<sup>2</sup>

- b) Rumah Raden Penghulu yaitu Rumah tempat tinggal para penghulu masa lalu yang bertugas di bagian perkawinan dan perceraian. Bangunan ini memiliki luas 417 m<sup>2</sup>
- c) Rumah Tinggi yaitu Rumah tempat tinggal para kerabat raja. Bangunan ini memiliki luas 290 m<sup>2</sup>
- d) Rumah Balai yaitu Rumah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam memecahkan masalah. Bangunan ini memiliki luas 928 m<sup>2</sup>
- e) Rumah Laut yaitu Rumah yang ditinggali oleh penembahan Haji Sulaiman Paku Negara. Bangunan ini memiliki luas 181 m<sup>2</sup>
- f) Rumah Bosor yaitu Rumah tempat tinggal istri tertua dari penembahan beserta keluarga raja. Bangunan ini memiliki luas 926 m<sup>2</sup>
- g) Masjid Jami Syuhada yaitu Masjid yang dibangun antara tahun 1825-1830 di masa pemerintahan Pangeran Ayyub Paku Negara dan memiliki luas 64 m<sup>2</sup> (“Keraton Sanggau”, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/2016/06/keraton-sanggau/>).

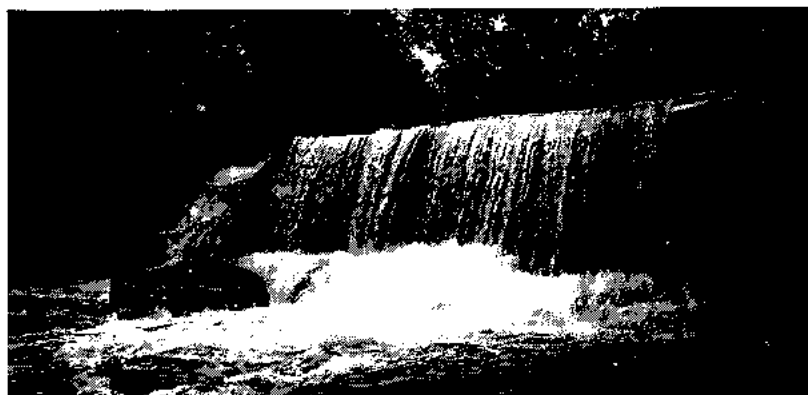
### 2.3.2. Air Terjun Pancur Aji

Air Pancur Aji adalah sebuah kawasan perbukitan yang terletak di pinggiran teluk Sungai Kapuas di bagian hilir / pesisir barat Kota Sanggau, kawasan ini diapit oleh dua buah anak sungai yakni Sungai Monga di bagian hilir dan Sungai Mawang di bagian hulu, kedua sungai ini bermuara ke Sungai Kapuas. Pada muara Sungai Monga terdapat air terjun yang dinamakan Gurong Monga, yang konon menurut cerita rakyat terutama masyarakat sekitar Gurong Monga, tempat ini adalah tempat pertapaan orang ghaib dan dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Ketinggian tiga air terjun di kawasan ini hanya sekitar empat sampai lima meter (“Air Terjun Pancur Aji Sanggau”, <http://wisatapontianak.com/air-terjun-pancur-aji-sanggau/>). Air Terjun dikawasan Pancur Aji ini memang tidak tinggi hanya sekitar lima hingga enam meter, namun yang menarik adalah derasness arus air membuatnya semakin menarik terutama jika musim penghujan maka arus akan semakin deras dan

volumenya juga lebih banyak. Ada berbagai pilihan riam seperti riam setampang dan riam engkulik. Ada tiga tingkat air terjun yang bisa dinikmati bersama teman dan keluarga di daerah ini (“Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau”, <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>). Selain airnya yang dingin khas pegunungan, kawasan pancur aji juga menghadirkan pesona hutan lindung dengan udara yang segar menyejukkan dan suasana alam yang masih terjaga. Panjur Aji menawarkan sensasi dinginnya air pegunungan. Gemercik air dan suara alam kental terasa di sini. Keaslian flora dan fauna di kawasan ini sangat dijaga. Di sini, tidak sulit menemukan pohon tengkawang, rusa, orang-utan, dan berbagai jenis satwa liar yang dikandangkan dengan baik (“Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau”, <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>).

Berjarak sekitar 6km dari kota Sanggau atau kurang lebih 3 km dari jalan raya menuju Pontianak di sebelah barat kota Sanggau dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit berkendara. Untuk menuju kawasan Wisata Pancur Aji disimpang jalan terpasang papan petunjuk lokasi wisata tersebut. Jalan menuju kawasan ini cukup menantang dan berbukit-bukit. Karena strategisnya kawasan Pancur Aji ini, dimana disamping posisinya pada ujung kota dengan bukit dinding batu yang cukup terjal dan ditopang pula oleh Sungai Kapuas yang menyempit serta dengan kondisi airnya yang berputar-putar sehingga agak menghambat majunya kendaraan angkutan air yang menyusuri Sungai Kapuas. Oleh sebab itulah maka kawasan ini dijadikan benteng Kerajaan Sanggau pada zaman dulu.

Gambar 2.4.  
Air terjun Pancur Aji



Sumber: <https://okedehjak.com/15-tempat-wisata-alam-di-sanggau/>

Pada bagian atas bukit Pancur Aji ini sempat ditemukan sisa-sisa Benteng Pancur Aji ini, terbentang pada dataran bukit dalam bentuk galian tanah berukuran  $10 \times 10$  m dengan kedalaman 1 m dan berdingkikan kayu belian mengitari benteng tersebut. Di bagian belakang benteng tersebut terdapat pula galian yang berukuran  $4 \times 4$  m, diperkirakan sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan konon katanya dari pusat benteng tersebut dibentangkan rantai besi hingga menyebrangi Sungai Kapuas yang dibenamkan ke dalam sungai dan sewaktu-waktu dapat ditarik muncul ke permukaan sungai dimaksudkan untuk menghambat perjalanan maju kendaraan angkutun air manakala ada musuh yang akan menyerang kota. Selain itu konon terdapat sebuah meriam yang dipasang dibenteng tersebut dan diberi nama Bujang Malaka (Air Terjun Pancur Aji Sanggau dalam <http://wisatapontianak.com/air-terjun-pancur-aji-sanggau/>).

### 2.3.3. Riam Macan

Riam Macan berada di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Sanggau. Dengan kondisi jalan yang sudah cukup bagus, perjalanan dengan mobil atau sepeda motor dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20

menit. Riam Macan atau lebih dikenal dengan sebutan Riam Macan Goa Maria selain sebagai tempat wisata alam, juga merupakan salah satu objek wisata rohani khususnya untuk pemeluk agama kristiani. Di dalam goa dibawah air terjun ini terdapat patung Bunda Maria yang memberi nilai sakral pada aspek religi.

Gambar 2.5.  
Air terjun Riam Macan



Sumber : <https://tapalbatas.detik.com/entikongberita/7>

Air terjun di Riam Macan ini lebih tinggi dibanding dengan yang ada di Pancur Aji. Tingginya mencapai 20 meter. Bedanya disini hanya ada satu tingkat saja. Riam macan juga menawarkan suasana alam yang natural dengan gemercik air yang sejuk, rangkaian batu-batu besar serta pepohonan rimbun. Ditambah dengan kelembapan udara yang khas pegunungan memberi suasana positif. Untuk mencapai air terjun, pengunjung harus melewati tangga yang cukup menguras lelah. Namun itu semua terbayar setelah mencapai lokasi air terjun (“Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau”, <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/> akses tanggal 21 November 2017).

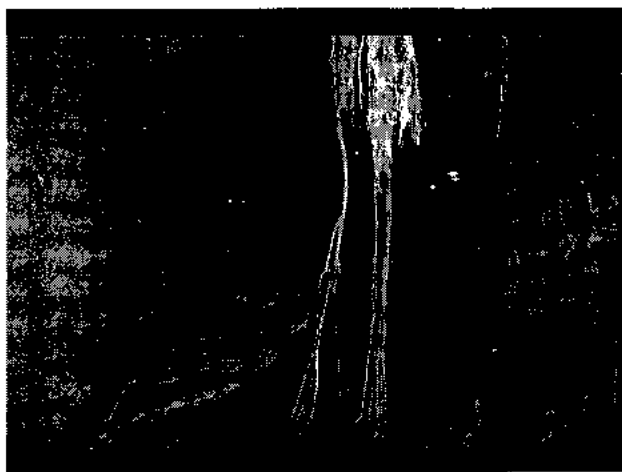
Riam Macan Gua Maria dikenal sebagai destinasi wisata alam sekaligus wisata rohani bagi umat Katolik. Di sana terdapat gua

dengan air terjun yang mengalir deras di sisi depannya. Mendekati ujung anak tangga, sebuah gua dengan patung Bunda Maria di dalamnya pun terlihat. Patung Bunda Maria itu tampak berwarna putih. Setengah sisi depannya tertutup air terjun dengan tinggi sekitar 20 meter yang mengalir dengan derasnya. Di bawahnya mengalir sungai yang cukup lebar (“Cerita Patung Bunda Maria di Balik Air Terjun Sanggau”, <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3591358/cerita-patung-bunda-maria-di-balik-air-terjun-sanggau>).

#### 2.3.4. Goa Thang Raya

Lokasi Goa Thang Raya berada di Kecamatan Beduai kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Sanggau atau sekitar tiga kilo meter dari jalan raya. Dikisahkan goa ini merupakan bentukan dari rumah panjang yang merupakan rumah adat dayak yang dihuni oleh masyarakat Thang Raya pada masanya yang berupa bebatuan. Goa ini memiliki panjang mencapai 100 meter. Ketika anda masuk dan menyisir kedalam goa, anda akan menemukan jalan berliku menyerupai sebuah kamar yang dihuni oleh ratusan kelelawar.

Gambar 2.6  
Goa Thang Raya



Sumber : <http://sanggau.go.id/2017/06/22/goa-thang-raya/>



Goa Thang Raya ini juga menjadi salah satu destinasi wisata rohani karena tempat ini disakral kan sebagai salah satu tempat suci. Setelah sampai pertengahan jalan menuju goa, atau sekitar 1,5 Km terdapat jembatan gantung dan jembatan tersebut hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda dua. Jika ingin menuju kesana, masyarakat setempat siap mengantarkan menuju ke Goa dengan menggunakan kendaraan roda dua. Jarak dari jembatan ke Goa sekitar 1,5 Km dengan kecepatan rata-rata 60 Km/jam dan memakan waktu sekitar 30 menit. kondisi alam, perkebunan, pohon-pohon yang masih asli membuat suasana alam yang begitu indah dan menyenangkan.

Goa Thang Raya dalamnya sekitar 100 meter dan terbagi menjadi tiga ruangan, yaitu ruangan tamu yang sangat luas, ruangan tengah yang terdiri dari bilik-bilik atau rak-rak dari bebatuan yang sangat keras untuk tidur dan menyimpan makanan. kemudian ruangan dapur yang cukup luas terdiri dari bebatuan yang tertata rapi menyerupai meja dan kursi. Konon menurut cerita, barang siapa yang bisa mengambil batu dengan cara mencongkel menggunakan tanganya tanpa menggunakan bantuan alat, maka orang tersebut merupakan masih kerabat keturunan penghuni Goa Thang Raya (“Goa Thang Raya”, <http://sanggau.go.id/2017/06/22/goa-thang-raya/>).

### **2.3.5. Air Terjun Saka Dua Sungai Munti**

Lokasi Air Terjun Saka Dua berada di Kecamatan Kapuas tepatnya di Dusun Kayu Tunu. Air terjun ini menyatu dalam kawasan hutan lindung sehingga kealamian dan keasriannya masih terjaga. Air terjun ini dinamakan saka dua karena adanya dua aliran air yang terjun jatuh berdampingan. Air terjun saka dua berada di dusun kayu tunu, desa sungai Muntik kecamatan Kapuas.

Gambar 2.7.  
Air Terjun Saka Dua



Sumber : <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/>

Perjalanan menuju lokasi memang lumayan jauh dan berat. Dari kota sanggau anda harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam ke Desa Sungai Muntik. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan kapal menyusuri indahnya sungai kapuas selama kurang lebih setengah jam. Selanjutnya perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri hutan selama kurang lebih 45 menit (“Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau”, <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>). Terletak di kawasan hutan lindung yang masih sangat asri dan alami.

Untuk menuju lokasi air terjun Saka Dua dari kota Sanggau dapat di tempuh dalam waktu  $\pm$  1 jam ke arah Desa Sungai Muntik kemudian dilanjutkan dengan menyusuri sungai kapuas dengan menggunakan perahu air dengan jarak tempuh  $\pm$ 30 menit, baru kemudian dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki melintasi hutan belantara  $\pm$ 40 menit. Untuk menuju kawasan ini kita hendaknya menggunakan jasa penunjuk jalan yang ada di desa Sungai muntik Kecamatan Kapuas. Air Terjun Saka Dua merupakan obyek daya tarik wisata yang sangat menantang karena untuk mencapainya kita membutuhkan kondisi fisik yang prima. Air Terjun Saka Dua sangat cocok bagi wisatawan yang menginginkan petualangan

berjalan dan menyusuri alam liar (“Air terjun Saka Dua”, <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/air-terjun-saka-dua.html>).

### 2.3.6. Padong Buaya

Masih di kawasan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas, terdapat sebuah tempat bernama Padong Buaya yang menawarkan keindahan pemandangan alam. Padong Buaya juga memiliki keunikan yaitu debit air nya yang tetap banyak dan tidak surut walau dalam keadaan kemarau sekalipun.

Gambar 2.8.  
Padong Buaya



Sumber : <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/padong-buaya.html>

Tempat ini sangat cocok menjadi sarana untuk memancing. Tempat ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk melepas lelah (Sumber [disbudpar.sanggau.go.id](http://disbudpar.sanggau.go.id)). Padong Buaya terletak di Desa Sungai Muntik, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jarak yang di tempuh dari kota Sanggau menuju Padong Buaya sekitar 30 menit melewati jalan darat.

Padong Buaya memiliki pemandangan alam yang indah dengan berbagai kekayaan Flora berupa tumbuhan Ganggang Putih dan hewan air berupa Ikan Siluk Hijau. Kawasan Wisata sebagai

tempat beristirahat, berselancar dan memancing, berdekatan dengan padong buaya terdapat juga danau yang tidak kalah indah yang di sebut Padong Rumpang. Yang unik dari Padong Buaya ini adalah walaupun dalam keadaan kemarau panjang air di Padong Buaya ini tidak akan mengalami kekeringan (“Padong Buaya”, <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/padong-buaya.html>).

### 2.3.7. Arung Jeram Suruh Tembawang

Arung Jeram Suruh Tembawang terletak di Kecamatan Entikong tepatnya di Desa Ungkung. Lokasinya berada sekitar 2,5 jam perjalanan dari Kota Sanggau. Dari Entikong, perjalanan dapat dilanjutkan dengan menggunakan perahu menyusuri sungai. Arung Jeram Suruh Tembawang menawarkan pesona arung jeram yang menantang dengan berbagai riam dari yang arusnya biasa hingga yang arusnya extreme dan memacu adrenalin. Selama menyusuri riam, anda juga akan disuguhi keindahan suasana hutan yang masih alami (“Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau”, <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>).

Gambar 2.9.

Arung Jeram Suruh Tembawang



Sumber : <https://okedehjak.com/wp-content/uploads/2016/10/Arung-Jeram-Suruh-Tembawang.jpg>.

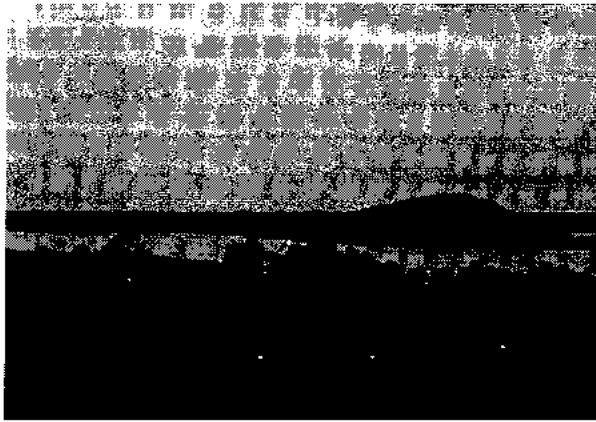
Kabupaten Sanggau memiliki lokasi arum jeram yang terletak Entikong di Kecamatan antara suruh tembawang ke kota Entikong, Kecamatan Entikong, ± 115 Km dari kota Sanggau. Arung Jeram Suruh Tembawang memiliki 20 Riam (Kesulitan) yang terjal dengan waktu tempuh dari Entikong ke Suruh Tembawang ± 5 sampai 12 jam, tergantung kondisi air, serta memiliki tikungan sungai yang sempit. Arung Jeram Suruh Tembawang merupakan Arung Jeram yang sangat menantang, bagi pecinta Olah Raga Arung Jeram ini (Arung Jeram Suruh Tembawang dalam <http://pontianaksehat.pedia.id/sejarah-kabupaten-sanggau/186-arung-jeram-suruh-tembawang-di-kabupaten-sanggau,-kalimantan-barat.html>).

### 2.3.8. Danau Lait

Tempat wisata alam di Sanggau berikutnya yaitu Danau Lait. Danau ini merupakan danau tadah hujan yang terletak di Dusun Kedokok Kecamatan Tayan Hilir, sekitar 125 km dari Kota Sanggau. Luas danau Lait diperkirakan mencapai 800 hektar dengan kedalaman antara 4,5 hingga 5 meter. Namun saat musim kemarau debit airnya kering sehingga bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor. Tempat ini adalah surga untuk hobi memancing. Beraneka ragam ikan tersebar di danau ini seperti ikan biawan dan ikan toman. Danau Lait memiliki pesona pada keindahan pemandangan bukit yaitu Bukit Lait dan Bukit Tiong Kandang serta keindahan panorama hutan. Danau ini dapat disusuri dengan menggunakan perahu atau sampan. ("Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau", <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>).

Di kawasan danau Lait juga terdapat 12 gugusan pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sekelilingnya terdapat Gunung Lait dan Gunung Tiong Kandang yang menambah daya tarik pemandanan danau ini. Tepi danau ditemani rindangnya pepohonan di kebun karet yang bersusun rapi dan bersih, merupakan tempat yang sangat nyaman untuk menggelar tikar dan menghamparkan perbekalan makanan yang sudah disiapkan sebelum pergi menuju ke Danau.

Gambar 2.10.  
Danau Lait



Sumber: <http://jalan-jalanyok.blogspot.co.id/2017/01/danau-lait-sebuah-keindahan-yang.html>

Bagi para hammocker juga menjadi tempat yang asik untuk bergelantungan dengan hammock sambil menghadap ke danau sambil menikmati angin bertiup lembut dibalik pepohonan karet. Berwisata ke Danau Lait cocok untuk wisata bersama keluarga karena perjalanan yang tidak membutuhkan tenaga ekstra seperti mendaki atau tracking, dengan menggunakan kendaraan bisa langsung sampai ke tepi Danau yang indah ini. Perjalanan untuk menuju ke Danau Lait ini hanya berjarak sekitar 80 KM dari kota Pontianak, atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari Kota Pontianak arah menuju ke Tayan, Sanggau, yang bisa di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau pun roda empat (“Danau Lait Kalimantan Barat Kealamiannya Akan Membuat Anda Kagum”, <https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/kalimantan-barat/danau-lait-kalimantan-barat-kealamiannya-akan-membuat-anda-kagum.html>)

#### **2.4. Wisata Perbatasan Entikong melalui Pasar Wisata dan Festival CrossBorder**

Daerah perbatasan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Kabid Pemasaran

Pariwisata Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalbar, Theresia Widiastuti menegaskan bahwa saat ini pemerintah Kalbar sedang menyiapkan masterplan sektor pariwisata dalam rangka mewujudkan visi pariwisata menjadi daerah tujuan wisata lokal dan dunia berbasis wisata alam dan budaya menuju Kalbar maju dan sejahtera. Negara tetangga Malaysia merupakan pasar potensial untuk menjadi wisatawan di Kalbar dengan memanfaatkan tiga pintu perbatasan atau pos lintas batas negara. PLBN ini yakni Entikong di Sanggau, Aruk di Sambas dan Badau di Kapuas Hulu (“Peluang industr Pariwisata Kalbar”, <http://www.pontianakpost.co.id/peluang-industri-pariwisata-kalbar>). Tiga pintu perbatasan yang dibuka ini merupakan pintu tambahan yang baru saja diresmikan oleh pemerintah setelah sebelumnya hanya ada satu pintu perbatasan yaitu Entikong. Semakin bertambahnya pilihan pintu masuk perbatasan bagi wisatawan mancanegara diharapkan dapat menyerap semakin banyak wisatawan mancanegara untuk masuk dan menikmati keindahan wisata di Kalbar.

Daerah perbatasan, bukanlah sebagai halaman belakang sebuah negara. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2016 menyebutkan bahwa dalam rangka pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia. Daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua dikembangkan agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan beranda terdepan Republik ini harus tetap dijaga melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan. Artinya segenap komponen bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat (“Membangun Perbatasan, Merawat Etalase Negara”, <http://setkab.go.id/membangun-perbatasan-merawat-etalase-negara/>). Untuk mendukung pembangunan di bidang pariwisata, pemerintah Kalbar sendiri telah menargetkan Kalbar akan dikunjungi 50.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dengan cara mengembangkan daerah tujuan wisata potensial di perbatasan, melaksanakan even yang terukur, peningkatan promosi dan peningkatan kualitas usaha pariwisata. Cara lainnya adalah

mempercepat pelaksanaan standarisasi usaha dan pekerja di sektor pariwisata,” jelas dia (“Peluang industri Pariwisata Kalbar”, <http://www.pontianakpost.co.id/peluang-industri-pariwisata-kalbar>).

Selain wisata alam yang ada di perbatasan yang telah diuraikan di atas Pemerintah juga perlu mengembangkan ragam kegiatan untuk menambah tawaran destinasi pariwisata perbatasan Kalbar. Tujuannya adalah agar wisatawan asing tidak hanya sekedar datang ke daerah perbatasan kemudian pulang, melainkan meluangkan waktu untuk menginap selama beberapa hari serta menikmati destinasi yang lain yang ada di Sanggau. Pasar Serikin yang telah dikembangkan di Distrik Serikin Kuching Serawak sebenarnya juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah di Sanggau untuk juga dikembangkan di merupakan salah satu cara untuk lebih banyak menarik wisatawan Malaysia. Layaknya pasar kaget atau pasar tradisional lainnya di Indonesia, pasar rakyat ini menjajakan berbagai dagangan, seperti pakaian, aneka kuliner, kerajinan tangan, perabotan rumah tangga, hingga barang antik. Hampir semua pedagang dan produk dagangannya berasal dari Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bogor, dan sebagian besar dari Kalimantan Barat sendiri (“Pedagang Indonesia Satu Kasir Terima Dua Mata Uang”, <http://www.pontianakpost.co.id/pedagang-indonesia-satu-kasir-terima-dua-mata-uang>). Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia yang juga menjabat Ketua Komite Tetap Perdagangan Perbatasan Kadin Kalbar Thalhah mengatakan, saat ini sekitar 700 pedagang Indonesia berjualan di sana (“Demi Laba Tinggi, WNI Jadi Mayoritas Pedagang Pasar Serikin Malaysia”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/07/m3nqma-demi-laba-tinggi-wni-jadi-mayoritas-pedagang-pasar-serikin-malaysia>). Pasar Serikin memberikan keuntungan bagi pedagang dan juga masyarakat lokal Kuching. Penjual yang ada di pasar ini didominasi oleh warga Indonesia. Produk-produk Indonesia yang dijual dipasar inipun didominasi produk Indonesia. Hampir tidak ada produk Malaysia. Dari produk yang dijual, pedagang rata-rata mendapatkan keuntungan 5000 ringgit dalam sekali penjualan (“Pasar Serikin, Wisata Belanja Warga Malaysia”, <http://news.liputan6.com/read/337755/pasar-serikin-wisata-belanja-warga-malaysia>). Masyarakat lokal Malaysiaipun turut mendapatkan keuntungan berupa jasa penyewaan lo-



kasi, jasa penyewaan kamar, penyimpanan barang serta jasa parkir (“Pedagang Indonesia Satu Kasir Terima Dua Mata Uang”, <http://www.pontianakpost.co.id/pedagang-indonesia-satu-kasir-terima-dua-mata-uang>). Pasar Serikin dalam hal ini tidak hanya menjadi tempat dimana pedagang dan penjual bertemu melainkan juga menjadi salah satu pilihan destinasi pariwisata. Para pembeli seringkali membawa sanak keluarga untuk menikmati suasana yang ada di pasar tersebut. Dengan demikian daerah ini menjadi salah satu destinasi bagi para wisata asing karena lebih dari 50 persen pengunjung Serikin berasal dari Semenanjung Malaysia dan manca Negara (“Pedagang Indonesia Satu Kasir Terima Dua Mata Uang”, <http://www.pontianakpost.co.id/pedagang-indonesia-satu-kasir-terima-dua-mata-uang>). Daerah perbatasan Sanggau sebenarnya berpotensi mengembangkan destinasi wisata seperti halnya pasar Serikin Serawak. Upaya pembangunan pasar sendiri mulai dilakukan melalui pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu tahap kedua. Pada tahap pertama berupa pembangunan PLBN Entikong yang selesai diresmikan pada Desember 2016.

Gambar 2.11  
Pos Lintas Batas di Entikong

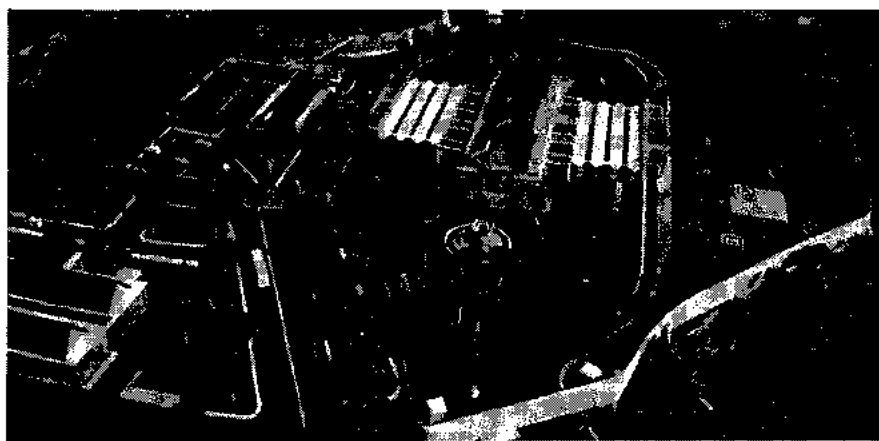


Sumber : “Wisata Alam di Kabupaten Sambas”, [https://www.google.co.id/search?q=pos+perbatasan+entikong+dulu+dan+sekarang&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZ\\_byM\\_rPXAhVLM48KHeipCXkQsAQIJA&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=2KZvJRdF3pl\\_WM:Wisata Alam di Kabupaten Sambas](https://www.google.co.id/search?q=pos+perbatasan+entikong+dulu+dan+sekarang&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZ_byM_rPXAhVLM48KHeipCXkQsAQIJA&biw=1525&bih=733&dpr=0.9#imgrc=2KZvJRdF3pl_WM:Wisata Alam di Kabupaten Sambas)

Pembangunan Tahap pertama berupa PLBN Entikong ini bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security*) dan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat berdasarkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Sementara itu pembangunan tahap kedua mulai dilaksanakan pada tahun 2017 ini dalam bentuk zona pendukungnya berupa kawasan pemukiman. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tujuan pembangunan kawasan perbatasan Entikong tahap kedua adalah untuk menggerakkan roda ekonomi dan memanfaatkan keuntungan sebesar-besarnya dari keberadaan PLBN Entikong. Didalam pemukiman tersebut akan dibangun juga pasar bersama dengan akses sanitasi dan air bersih dengan anggaran sebesar Rp 420 miliar. Biaya pembangunan dan penataan kawasan itu lebih besar dari pembangunan PLBN Entikong yang hanya menelan anggaran sebesar Ro 152 miliar (“Diresmikan Hari Ini, PLBN Entikong Bakal Dibangun Pasar Hingga Mess Pegawai”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3377374/diresmikan-hari-ini-plbn-entikong-bakal-dibangun-pasar-hingga-mess-pegawai>).

Gambar 2.12.

Maket Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat.



Sumber : <http://properti.kompas.com/read/2016/03/24/060000821/Adopsi.Desain.Lokal.PLBN.Entikong.Lebih.Megah.Dibanding.Malaysia>

Dengan adanya rencana pengembangan pasar tradisional di Entikong diharapkan dapat menyerap wisatawan mancanegara lebih banyak dan tentunya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lokal seperti halnya pasar Serikin Malaysia. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat lebih terangkat.

Selain pengembangan pasar tradisional Entikong, potensi pariwisata di Sanggau juga dapat dikembangkan dalam bentuk Festival Cross Border. Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata dalam mendorong pariwisata perbatasan beberapa kali menyelenggarakan Festival Crossborder di Kabupaten Sanggau. Penyelenggaraan Festival Cross Border ini telah berlangsung pada tahun 2016 dan 2017 dan mendapat sambutan yang meriah dari wisatawan Malaysia. Festival Cross Border yang pertama tanggal di Sanggau berlangsung selama dua hari, 27-28 Agustus 2016. Acara ini menyedot lebih dari 1.000 wisman yang masuk melalui imigrasi Entikong dibanding pada hari-hari biasa crossborder rata-rata hanya dilewati 100 - 150 wisman ("Digoyang Dua Hari, Wisman Malaysia Ketagih", <http://linkis.com/www.goaceh.co/berita/iXcV8>). Acara ini menampilkan artis dangdut Indonesia yang sudah sangat populer di mata wisatawan Malaysia Nong Niken KDI dan Selvi Bintang Pantura.

Dalam festival tersebut para wisatawan Malaysia datang secara bergelombang sedangkan panitia menyiapkan bus antar jemput ke perbatasan. Sampai lokasi wisatawan Malaysia langsung disambut dangdut pembuka. Turis tetangga ini menempati kursi undangan yang disiapkan panitia. Tampak tua-muda laki dan perempuan memenuhi 200 kursi undangan. Karena tidak cukup rombongan berikutnya langsung membaur dengan penonton lokal di lapangan. Selain diserbu rombongan dari Tebedu Serawak, festival pada hari kedua juga ditonton club Moge (motor gede) dari Kuching. Mereka datang sembilan orang rombongan atas undangan Konjen Kuching Serawak Malaysia. Mereka juga asyik berjoget dibawah terik matahari. Dangdut menjadi pilihan Kemenpar untuk digelar di perbatasan karena basis penggemar dangdut di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sangat kuat dan solid. Bahkan boleh dibilang fanatik. Menurut I Gede Pitana, saat konser FWI belum digelar saja, imigrasi Entikong sudah mendata 360 wisman asal Malaysia yang menyeberang ke Entikong. Apalagi

saat festival digelar mencapai 1000 orang (“Konser Wonderful Indonesia Goyang Perbatasan Entikong”, <https://ads2.kompas.com/layer/kemenpar/detail/1123>).

Festival Cross border yang kedua digelar tanggal tanggal 2-8 April 2017. Penyelenggaraan parade seni dan tradisi yang bertajuk ‘Sanggau Forward and Beyond’. Artis dangdut Siti Badriah dipilih sebagai Rising Star dalam Festival ini karena sesuai permintaan pasar di sana. Dipilihnya artis Siti Badriah adalah pilihan yang tepat. Lewat beberapa single artis yang kerap dipanggil Sibad ini memang sedang naik daun. Single yang membuat nama Sibad melambung antara lain Bara Bere, Goyang Dumang, Terong Dicabein, Senandung cinta, Suamiku Kawin Lagi, Ku Tak Bisa (Slank), Brondong Tua. Tidak hanya memiliki suara merdu dan goyangan yahut, artis kelahiran Bekasi, pada tanggal 21 Maret 1991 kerap membintangi sejumlah sinetron di stasiun televisi swasta. Film yang dibintangi adalah Senandung dan Harapan Cinta. Belakangan artis ini pun mendapat penghargaan dari MURI karena menjadi salah satu pengisi DanceDhut Nation 2016. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Esthy Reko Astuti, pada Festival Cross Border tahun 2016 di Aruk, Sambas Kalbar, penampilan Siti Badriah adalah yang paling di tunggu-tunggu oleh masyarakat Malaysia. Malaysia pun banyak yang mengidolakan artis tersebut.

Dalam event ini ditargetkan Indonesia bisa mendatangkan 7000 wisatawan dari Malaysia dan 3000 wisatawan lokal mengingat posisi Sanggau juga sangat strategi. Dari jalan trans Malindo hanya menempuh waktu 2 jam 46 menit untuk sampai di lokasi. Sebagai bentuk dukungan, Kemenpar juga telah memasang spanduk, flyer, spanduk, T-banner di sejumlah posisi posisi strategi di Sanggau, Border Entikong sampai ke Sarawak, Malaysia (“Festival Crossborder Digulirkan Lagi di Sanggau Kalbar”, i <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/03/25/92552/Festival-Crossborder-Digulirkan-Lagi-di-Sanggau-Kalbar>). Selain acara dangdut yang menjadi sajian utama, Festival ini juga bakal dimeriahkan oleh event-event lainnya. Diantaranya, Ritual Adat Melayu, Ritual Adat Dayak menurut Sub Suku Dayak Pangkodan, Ritual Adat Dayak menurut Sub Suku Daya Pompankg, Lomba Desain Patung Daranante dan Babai Cinga,

Pameran Pembangunan, Lomba Mancing Mania Invitasi Terompang Panjang, Invitasi Sumpit, Makan Berami, Lomba Sampan Ulung Uli, Invitasi Gala Hadang, Festival Olahraga Tradisional, Pagelaran seni Kolaboratif, Pagelaran Bapanok Ajan dan Masak Lemang, Launching Kampung Binua Istana sampai Napak Tilas ke tempat keramat dan makam raja-raja ("Festival Crossborder Digulirkan Lagi di Sanggau Kalbar", <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/03/25/92552/Festival-Crossborder-Digulirkan-Lagi-di-Sanggau-Kalbar>).

Adanya festival Cross Border memiliki dampak yang sangat besar dalam menciptakan branding Indonesia di wilayah perbatasan. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari penyelenggaraan acara ini. Pertama, Lonjakan kenaikan kedatangan wisman ke Indonesia. Staf Ahli Bidang Multikultural Kemenpar Hari Untoro Drajat menyebut kegiatan seni budaya ini baik untuk meningkatkan kunjungan wisman perbatasan (cross border) yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total kunjungan wisman secara nasional yang tahun ini menargetkan pergerakan 265 juta wisman di dalam negeri dan kedatangan 15 juta wisman 2017, dan akan naik menjadi 20 juta wisman pada 2019 mendatang. Wisman perbatasan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total kunjungan wisman. Menurut Hari Untoro Drajat, tahun 2015 kontribusi wisman (crossborder) mencapai 3,6 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia sebesar 10,4 juta wisman ("Festival Cross Border Naikkan Kunjungan Wisman", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/04/onvfhm368-festival-cross-border-naikkan-kunjungan-wisman>). Sementara itu menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sanggau, F Meron kehadiran festival ini bisa mendongkrak pariwisata yang terbilang sepi peminat. Acara ini menyedot lebih dari 1.000 wisman yang masuk melalui imigrasi Entikong dibanding pada hari-hari biasa crossborder rata-rata hanya dilewati 100 - 150 wisman ("Festival Crossborder Digulirkan Lagi di Sanggau Kalbar", <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/03/25/92552/Festival-Crossborder-Digulirkan-Lagi-di-Sanggau-Kalbar>).

Keuntungan yang kedua, Keramaian festival membuat suasana Sanggau dan sekitarnya menjadi lebih ramai, dan hidup. Ekonomi masyarakat pun ikut terdongkrak. Kegiatan ekonomi dan sektor

informal langsung bertumbuh. Para pelaku bisnis pun mendapatkan keuntungan terutama jasa penginapan dan warung makan. Hotel Prambanan yang terletak di jalan Raya Malindo misalnya. Selama seminggu pelaksanaan Festival Cross Border tamunya penuh. Menurut pengelola hotel Zulkifli Lubis, dari 27 kamar semua penuh karena dangdutan. Selain warung permanen juga bermunculan warung tiban dalam acara tersebut. Lebih dari 50 warung berjualan makan dan minuman di lokasi acara. Menurut Anik seorang sate yang berjualan di sana semua warung laris manis. Anik yang membawa sate 9 kilo-pun laris ("Digoyang Dua Hari", Wisman Malaysia Ketagihan", i <http://linkis.com/www.goaceh.co/berita/iXcV8>).

Masyarakat Malaysia sangat mengenal budaya seni yang dikembangkan di Indonesia. Festival Crossborder merupakan pasar yang sangat potensial untuk dibuat secara rutin. Pemerintah Daerah sendiri perlu juga mempersiapkan daerah untuk membangun destinasi di wilayahnya, agar lama hari tinggalnya lebih banyak. Dengan demikian diharapkan para wisatawan yang datang tidak hanya sekedar menikmati Festival saja melainkan juga menikmati keindahan alam yang ada di kalbar. Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang memfokuskan kepada strategi pemasaran wilayah terluar di Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh divisi Strategi Pemasaran Nusantara Kemenpar di Hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, tanggal 20 April 2017 menemukan bahwa sebetulnya Festival Cross border memunculkan peluang bisnis baru di Kalbar mengingat kabupaten-kabupaten di wilayah terluar Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang menarik. Banyak obyek wisata yang bagus, mulai dari keindahan alam, budaya, kuliner dan lainnya. Ini yang harus segera digarap menjadi wisata crossborder unggulan.

Meskipun demikian, wisman Malaysia dan Brunei Darussalam kebanyakan memilih tidak menetap di daerah Kalimantan Barat. Oleh sebab itulah daerah perbatasan harus punya strategi untuk membuat atraksi yang lebih menarik seperti paket wisata crossborder. Selain nonton musik dengan artis papan atas, wisman Malaysia juga dapat juga digiring trekkin, trail fun bike, dan jungle flying fox. Selain itu juga infrastuktur jalan dan pos lintas batas negara yang baik agar wisman nyaman melintas ke Indonesia Apalagi pos lintas batas sudah

direnovasi dan terlihat menarik sehingga makin memudahkan warga Malaysia dan Brunei berkunjung melalui jalur darat (“Kalbar Mulai Wujudkan Strategi Pemasaran Wisata Perbatasan”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170421131853-307-209228/kalbar-mulai-wujudkan-strategi-pemasaran-wisata-perbatasan/>).

Di antara 19 pintu masuk wisatawan ke Indonesia, perbatasan Entikong yang berbatasan dengan Sarawak dapat menjadi salah satu penyumbang besar masuknya wisman. Pemda setempat diharapkan dapat bersinergi dengan industri pariwisata untuk menumbuhkembangkan festival-festival di perbatasan, mengingat potensi border tourism luar biasa. Masyarakat juga senang, ekonominya ikut terdongkrak. Kabupaten Sanggau, Kalbar berpotensi menjadi pintu gerbang mendatangkan wisman Malaysia. Di setiap festival selalu disiapkan rangkaian kegiatan berupa pentas seni dan budaya, artis lokal dan nasional, kesenian tradisional dayak, bazaar kuliner dan multiproduk, serta lomba-lomba daerah. Tentu mengedepankan kekayaan seni budaya tradisional serta keanekaragaman kuliner Indonesia.

## Kesimpulan

Kawasan perbatasan suatu negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara, serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Wisata perbatasan merupakan salah satu pilihan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong pembangunan

di daerah perbatasan agar tidak tertinggal dibandingkan negara tetangga. Melalui wisata perbatasan wisatawan asing akan tergerak untuk masuk dan berwisata di daerah sekaligus menikmati suasana lokal yang berbeda dari negara dimana mereka berasal. Kehidupan perekonomian masyarakat sekitarpun dapat bergerak naik dan mendorong peningkatan kesejahteraan lokal. Oleh sebab untuk mendukung berkembangnya wisata perbatasan dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemangku kepentingan serta masyarakat agar wisata perbatasan tidak hanya berjalan dalam waktu yang singkat melainkan dapat berkelanjutan.

## Referensi

- Arifin, Sam. Tanpa Tahun. "Migrasi Penduduk dan Implikasinya terhadap Hankam di Wilayah Perbatasan Kalbar-Serawak Malaysia". <https://media.neliti.com/media/publications/4702-ID-migrasi-penduduk-dan-implikasinya-terhadap-hankam-di-wilayah-perbatasan-kalbar-s.pdf>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- Firmansyah, Reza. (tanpa tahun). "Keadaan wilayah dan Penduduk di Wilayah Perbatasan". <http://www.batasnegeri.com/keadaan-wilayah-dan-penduduk-di-perbatasan-kalimantan/>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- Hadisuharno. 2010. "Suku Penjaga Patok Negara". <https://hadisuharno.wordpress.com/2010/06/15/suku-penjaga-patok-negara/>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- Heryantoro. Tanpa Tahun. "Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Dengan Malaysia dan Rasa Kebanggaan Sebagai Bangsa Indonesia". <https://www.kemenkeu.go.id/.../infrastruktur-di-wilayah-perbatasan-dengan-malaysia->. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- Irsan, Robby, Luthfi Muta'ali, Sudrajat. 2017. "Pertumbuhan Bidang Ekonomi di Perbatasan Indonesia-Malaysia". Prosiding Seminar Nasional "Pengelolaan Suberdaya Wilayah Berkelanjutan, Geografi UMS 2017. ISBN: 978-602-361-072-3



- Kurniadi, Dendy. 2009. *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Niko, Nikodemus. 2016. "Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat", *Prosiding Seminar Nasional INDOCOPAC* Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016 .
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. 2013. "Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan". *Jurnal Walisongo*. Volume 21, Nomor 2, November 2013.
- Yacoub, Yarlina. 2012. "Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat" dalam *Jurnal EKSOS* Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.
- BPS, Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Maret 2017 no.38/07/61/Th.XX, 17 Juli 2017.
- Ditjend Kemendesa. 2016. "Provinsi Kalimantan Barat". <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/11-provinsi-kalimantan-barat> . diunduh tanggal 22 November 2017.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2015. "Profil Kalimantan Barat 2015".
- Permendagri No.56 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2015. "Profil Kalimantan Barat 2015".
- Permendagri No.56 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015.
- , Tanpa Tahun. "Kawasan Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan".[http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf) Diunduh tanggal 22 November 2017.

- , Tanpa Tahun. “Arung Jeram Suruh Tembawang”. <http://pontianaksehat.pedia.id/sejarah-kabupaten-sanggau/186-arung-jeram-suruh-tembawang-di-kabupaten-sanggau,-kalimantan-barat.html>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , Tanpa Tahun. “Perbatasan Entikong, Perjalanan Panjang Menuju Beranda Depan”. [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/PROFIL%20WILAYAH%20SANGGAU%202.pdf) diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2011. “Pasar Serikin, Wisata Belanja Warga Malaysia”. <http://news.liputan6.com/read/337755/pasar-serikin-wisata-belanja-warga-malaysia>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2012. “80 Persen Masyarakat Suruh Tembawang Bekerja Malaysia” <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/303681/80-persen-masyarakat-suruh-tembawang-bekerja-malaysia> akses 11 desember 2017
- , 2012. “Kondisi daerah Perbatasan di Indonesia”. <http://telegraf.co.id/kondisi-daerah-perbatasan-di-indonesia/> Diunduh tanggal 7 November 2017
- , 2012. “Kawasan Perbatasan Kalimantan” <http://kalimantan.menlhk.go.id/index.php/public/info/detail/berita/349>. Diunduh tanggal 7 November 2017
- , 2014. “Keadaan Wilayah dan Penduduk di Perbatasan Kalimantan” <http://www.batasnegeri.com/keadaan-wilayah-dan-penduduk-di-perbatasan-kalimantan/>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. “Air Terjun Pancur Aji Sanggau”. <http://wisatapontianak.com/air-terjun-pancur-aji-sanggau/> diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. “Air terjun Saka Dua”. <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/air-terjun-saka-dua.html>. diunduh tanggal 22 November 2017.

- , 2015. "Padong Buaya". <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/padong-buaya.html>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Kalbar Tetapkan Empat Strategi Pengembangan Pariwisata". <https://kalbar.antaranews.com/berita/331617/kalbar-tetapkan-empat-strategi-pengembangan-pariwisata>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Air terjun Saka Dua". <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/air-terjun-saka-dua.html>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Padong Buaya". <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/padong-buaya.html>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Kalbar Tetapkan Empat Strategi Pengembangan Pariwisata". <https://kalbar.antaranews.com/berita/331617/kalbar-tetapkan-empat-strategi-pengembangan-pariwisata>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Air terjun Saka Dua". <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/air-terjun-saka-dua.html>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Padong Buaya". <http://infodisbudparsanggau.blogspot.co.id/2015/12/padong-buaya.html>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2015. "Kalbar Tetapkan Empat Strategi Pengembangan Pariwisata". <https://kalbar.antaranews.com/berita/331617/kalbar-tetapkan-empat-strategi-pengembangan-pariwisata>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2016. "Pedagang Indonesia Satu Kasir Terima Dua Mata Uang" <http://www.pontianakpost.co.id/pedagang-indonesia-satu-kasir-terima-dua-mata-uang>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2016. "Diresmikan Hari Ini, PLBN Entikong Bakal Dibangun Pasar Hingga Mess Pegawai". <https://finance.detik>.

com/berita-ekonomi-bisnis/3377374/diresmikan-hari-ini-plbn-entikong-bakal-dibangun-pasar-hingga-mess-pegawai. diunduh tanggal 22 November 2017.

-----, 2016. "Adopsi Desain Lokal, PLBN Entikong Lebih Megah Dibanding Malaysia". <http://properti.kompas.com/read/2016/03/24/060000821/Adopsi.Desain.Lokal.PLBN.Entikong.Lebih.Megah.Dibanding.Malaysia>. diunduh tanggal 22 November 2017.

-----, 2016. "Digoyang Dua Hari', Wisman Malaysia Ketagihan". <http://linkis.com/www.goaceh.co/berita/iXcV8> akses tanggal 4 Desember 2017.

-----, 2016. "Konser Wonderful Indonesia Goyang Perbatasan Entikong". <https://ads2.kompas.com/layer/kemenpar/detail/1123> tanggal akses 4 Desember 2017.

-----, 2016. "Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat" <http://kalbarprov.go.id/info.php?landing=2> akses tanggal 10 November 2017.

-----, 2016. "Keraton Sanggau". <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/2016/06/keraton-sanggau/>. diunduh tanggal 22 November 2017.

-----, 2017. "Seperti Apa Pariwisata di Perbatasan Indonesia-Malaysia". <https://travel.detik.com/travel-news/d-3573166/seperti-apa-pariwisata-di-perbatasan-indonesia-malaysia>. diunduh tanggal 22 November 2017.

-----, 2017. "Peluang industri Pariwisata Kalbar". <http://www.pontianakpost.co.id/peluang-industri-pariwisata-kalbar>. diunduh tanggal 22 November 2017.

-----, 2017. "Festival Crossborder Digulirkan Lagi di Sanggau Kalbar". <http://nasional.indopos.co.id/read/2017/03/25/92552/Festival-Crossborder-Digulirkan-Lagi-di-Sanggau-Kalbar> akses tanggal 4 Desember 2017.

- , 2017. "Kalimantan Barat dalam Angka 2016". <http://kalbar.bps.go.id/ebsite/pdf/publikasi/Kalimantan-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2017. "Ekspor Indonesia vs Impor Malaysia via PLBN Entikong, Menang Mana?". i <https://news.detik.com/berita/d-3613000/ekspor-indonesia-vs-impor-malaysia-via-plbn-entikong-menang-mana>. Diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2017. "Ini 11 Wisata Yang Menakjubkan Di Sanggau". <https://www.deliknews.com/2017/03/25/ini-11-wisata-yang-menakjubkan-di-sanggau/>. Diunduh tanggal 22 November 2017
- , 2017. "Cerita Patung Bunda Maria di Balik Air Terjun Sanggau". <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3591358/cerita-patung-bunda-maria-di-balik-air-terjun-sanggau>. diunduh tanggal 22 November 2017.
- , 2017. "Goa Thang Raya". <http://sanggau.go.id/2017/06/22/goa-thang-raya/> . diunduh tanggal 22 November 2017.

### **Bab. 3**

## **Potensi Wisata Perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur**

*Iva Rachmawati*

Salah satu perbatasan Indonesia di bagian timur adalah perbatasan antara Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Perbatasan ini unik karena memiliki sejarah yang sarat pelajaran berharga bagi kedua bangsa. Kentalnya persoalan politik namun dekatnya kultur menghadirkan situasi yang tidak mudah bagi pengelolaan kawasan perbatasan. Namun demikian, bukan berarti perbatasan Indonesia-Timor Leste ini tidak mampu melahirkan potensi bagi kemajuan kawasan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan wisata perbatasan. Pengelolaan yang baik atas kawasan perbatasan dapat meningkatkan pendapatan wilayah setempat. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengelolaan wisata perbatasan yang baik dapat menunjang pembangunan dan perekonomian kawasan perbatasan. Manfred (1985) menandai bahwa wisata perbatasan dapat meningkatkan pembangunan fasilitas dan infrastruktur, sementara Nijkamp (2000) dan Morisson et.all (2005) meyakini wisata perbatasan dapat menaikkan pendapatan lokal dan menghubungkan sejumlah aktifitas atau jaringan bisnis. Dengan demikian, wisata perbatasan dapat menjadi mesin pertumbuhan karena ia mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi (Gelbman dan Timothy, 2011) bahkan transfer teknologi dan pengetahuan (Weidenfeld, 2013).

Kabupaten Belu memiliki alam yang cantik. Ada beberapa tempat yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dalam negeri maupun wisatawan manca khususnya dari Timor Leste. Selain wisata alam, wisata lain yang dapat menjadi daya dukung bagi peningkatan kunjungan di kawasan

perbatasan adalah wisata belanja. Wisata belanja di perbatasan dapat menjadi bagian dari wisata perbatasan karena ia tidak semata-mata merupakan wisata belanja yang dapat ditemukan di banyak tempat lainnya tetapi karena perbatasan sendiri menawarkan keunikan yang tidak ada di setiap tempat. Bagi Boedeker (1995), the cross-border tourism shopper atau pelaku wisata belanja lintas batas adalah pelaku wisata belanja tipe baru yang memiliki tingkat kenikmatan wisata dan belanja yang lebih tinggi. Mereka cukup hedonik tetapi sekaligus memiliki karakter utilitarian (berbelanja dengan biaya rendah). Segmen ini juga dapat dikelompokkan sebagai pelaku belanja untuk bersenang-senang sekaligus mencari pengalaman dalam berbelanja dan wisata budaya (Lumpkin et al, 1986; Papadoplos, 1980).

Beberapa contoh kawasan perbatasan yang dapat menjadi tujuan wisata melalui wisata belanja adalah Padang Besar dan Pasar Serikin di Malaysia. Padang Besar menjadi tujuan wisata belanja semenjak tahun 50an. Keunggulan Padang Besar yang terletak di Perlis Malaysia ini adalah terdapatnya sejumlah barang-barang dari Thailand yang berharga murah dan sejumlah makanan khas Thailand yang lezat dan juga murah. Daripada harus menyediakan sejumlah dokumen untuk melintasi perbatasan, Padang Besar telah menyediakan barang-barang seperti pakaian, sepatu, tas dan sejumlah barang-barang khas Thailand lainnya. Riset Azmi tersebut menyimpulkan bahwa harga barang dan variasi jenis barang merupakan daya tarik utama kedatangan wisatawan ke Padang Besar (Azila Azmi e. all, 2015). Sementara Pasar Serikin di Malaysia menjadi tujuan wisata belanja pula bagi orang Malaysia pada hari minggu karena pasar ini menjual berbagai barang dengan harga yang miring. Dukungan pemerintah lokal dengan menyediakan tempat dan fasilitas publik yang memadai menjadikan pasar ini semakin ramai dikunjungi. Di TripAdvisor pasar ini telah menjadi salah satu destinasi wisata di Serawak.

Bab ini hendak melihat potensi kawasan Belu sebagai kawasan wisata baik melalui alamnya juga wisata belanja di perbatasan yang diharapkan mampu menarik minat pengunjung baik dari Timor Leste maupun dari Belu dan wilayah sekitarnya.

### 3.1. Gambaran Umum Kawasan Perbatasan di Kabupaten Belu (RI -Timor Leste) dan Latar Belakang Sosial.

Kabupaten Belu terletak di bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak pada posisi 124°-126°BT dan 0.9°- 10° LS dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kabupaten Belu memiliki luas wilayah 2445,57 Km<sup>2</sup> atau 5.16 % luas wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terdiri dari 12 wilayah kecamatan, 12 kelurahan, dan 154 desa. Secara administratif wilayah Kabupaten Belu dibatasi oleh Selat Ombai di utara, Laut Timor di sebelah selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di sebelah barat dan Timor Leste di sebelah timur. Kabupaten Belu memiliki 10 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, yaitu Kecamatan Malaka Barat, Wewiku, Weliman, Malaka Tengah, Kobalima, Tasifeto Barat, Tasifeto Timur, Lasiolat, Raihat, dan Lamaknen. Dan kesemuanya tersebut masih berada dalam klasifikasi kecamatan yang terdiri atas desa-desa swakarya (Belu dalam Angka, 2012). Luas total kecamatan yang berbatasan langsung adalah 1.529,42 Km<sup>2</sup> atau 62.54 % dari total luas Kabupaten Belu.

Gambar 3.1.

Peta Perbatasan RI dan Timor Leste



Sumber Data: Bappeda Belu, NTT 2010



Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan hidup dalam kemiskinan. Beberapa tanaman pangan yang diupayakan di Belu belum mampu memberikan hasil yang layak bagi masyarakat. Meskipun merujuk pada laporan Dinas Pertanian, beberapa sentra produksi untuk padi sawah, padi lading jagung, sorghum, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai ada pada beberapa kecamatan di perbatasan yaitu Malaka Barat, Malaka Tengah, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Raihat dan Lamaknen (“Profil Wilayah Perbatasan Negara Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur”). Basis rumah tangga pertanian masyarakat Belu secara umum belum mampu memberikan penghidupan sosial dan ekonomi yang cukup baik. Hal ini terlihat pada tingginya jumlah rumah tangga sasaran PPLS (Program Perlindungan Sosial tahun 2011).

Kondisi yang miskin ini tidak jarang menghadapi masyarakat pada pilihan-pilihan yang terbatas. Kondisi lahan, minimnya infrastruktur, kondisi iklim dengan curah hujan yang sangat minim, menyebabkan masyarakat sedikit banyak menghadapi kesulitan pada pengelolaan lahan pertanian, meski kebanyakan dari mereka bermatapencaharian petani. Dari riset Priyanto dan Dwiyanto (2014) diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Belu terdiri atas lahan sawah 5%, lahan tegal dan perkebunan 17%, pekarangan 5%, ladang 8%, tanaman kayu-kayuan 6%, dan lainnya 59%. Masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan yang umumnya berupa lahan bongkor. Apabila penggunaan lahan dirinci lebih lanjut, luas lahan sawah hanya 12.461 ha (5,10%) dan didominasi oleh sawah tadah hujan, sedangkan sawah irigasi teknis hanya 1.494 ha. Sebaliknya lahan kering sangat dominan yang mencapai 232.996 ha (94,90%), yang didominasi lahan kering tidak digunakan 67.590 ha, tegal/kebun 39.493 ha, dan lahan penggembalaan atau padang rumput 22.968 ha yang berpeluang untuk pengembangan peternakan. Secara umum produksi dan produktivitas usaha tani di Kabupaten Belu masih rendah. Faktor penyebabnya ialah rendahnya curah hujan dan pendeknya periode bulan hujan, selain kondisi tanah yang kurang subur khususnya lahan kering.

Potensi lahan yang belum dimanfaatkan masih cukup luas, mencapai 57% dari lahan yang ada. Namun, lahan tersebut umumnya adalah lahan bongkor yang didominasi lahan kering sehingga terdapat

kendala yang cukup berat dalam pemanfaatannya untuk usaha tani. Lahan sawah masih sangat terbatas sehingga komoditas yang dominan dikembangkan adalah palawija (jagung). Curah hujan yang sangat rendah dengan bulan hujan yang relatif pendek (Januari-Mei) berdampak pada pola tanam yang juga terbatas sehingga produktivitas usaha tani tidak optimal. Dikaitkan dengan target ketahanan pangan, kondisi ini dinyatakan dalam kategori rendah. Komoditas tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok adalah jagung, kacang tanah, dan kacang hijau di samping padi. Produksi dan produktivitas cenderung mengalami penurunan karena fluktuasi curah hujan, namun luas area cenderung meningkat. Tanaman perkebunan yang diunggulkan ialah kelapa, kemiri, dan jambu mete, tetapi pemasalahan yang dihadapi adalah harga jual yang masih rendah.

Komoditas peternakan khususnya sapi potong, babi, ayam buras, dan itik mampu berperan sebagai penyangga ekonomi sebagian besar masyarakat pedesaan. Pemeliharaan bersifat tradisional sehingga produktivitas ternak rendah. Untuk pengembangan sapi potong, faktor daya dukung pakan rendah terutama pada musim kemarau. Populasi ternak cenderung tidak bertambah.

Pertanian dan peternakan yang terbatas oleh kondisi alam dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah atas pengelolaan pertanian, masih diimbuhi oleh kondisi fasilitas publik yang sangat terbatas. Listrik dan air sebagai kebutuhan pokok warga belum terpenuhi. Di beberapa desa di perbatasan seperti desa Silawan, penduduk masih memasok air melalui selang plastik dari Timor Leste. Warga desa masih mengambil air dari Timor Leste melalui selang-selang plastik yang menjulur panjang ke masing-masing rumah (Rachmawati dan Fauzan, 2013).

Sementara itu industri kecil yang dikembangkan di Belu juga masih sangat terbatas. Perkembangan kelompok industri maupun peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Belu adalah Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan (IPHK) yang meliputi industri kripik (ubi dan pisang) perabot rumah tangga dan kayu, aneka ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, pengolahan dan pengawetan daging, industri kopi bubuk, industri roti dan kue-kue, kasur dan bantal, serta industri tahu dan tempe, Industri Aneka meliputi industri

tenun, anyaman lontar, anyaman tali gawang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional dan industri pakaian jadi dari tekstil serta Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILMK) meliputi industri garam rakyat/yodium, barang dari semen, barang dari tanah liat (bata, genteng, tembikar), vulkanisir ban, serta jasa perbengkelan dan elektronik. Andalan pada sektor ini adalah industri rumah tangga atau Industri Aneka, di mana sub sektor ini memegang peranan yang cukup penting bagi pemasukan pendapatan daerah. Industri rumah tangga yang dimaksudkan di atas meliputi industri tenun ikat, anyam-anyaman, industri tahu/tempe, dan lain-lain. Walau hanya berstatus industri rumah tangga, tetapi sudah terpasarkan keluar daerah seperti tenun ikan dan anyam-anyaman (<http://belukab.go.id/perindustrian-energi-pertambangan/> ). Tenun Belu bahkan mampu memenangi lomba Parade Busana Tradisional Masa Lampau tahun 2010 se-Propinsi Nusa Tenggara Timur (Pos Kupang, 2010).

Kemiskinan yang masih membelit Kabupaten Belu tersebut menjadi salah satu penyebab dari maraknya penyelundupan dari Indonesia ke Timor Leste. Barang-barang yang diselundupka berupa bensin dan barang-barang kebutuhan pokok. Dari riset Rachmawati dan Fauzan (2013) diketahui bahwa persoalan ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat melakukan penyelundupan. Sejumlah warga melakukan penyelundupan barang karena tidak memiliki pekerjaan sementara kebun untuk digarap pun tidak ada. Meskipun mereka mengetahui aturan bahwa menyelundupkan barang itu melanggar hukum, alasan terdesak kebutuhan ekonomi untuk hidup sehari-hari dan membayar sekolah mengalahkan kekhawatiran mereka. Kepala desa Silawan, Ferdy Mones, membenarkan hal tersebut. Tingginya kebutuhan ekonomi keluarga yang bertemu dengan peluang dan kesempatan menjadikan penyelundupan cukup tinggi di jalan-jalan tikus antara Belu dan Bononaro (Rachmawati dan Fauzan, 2013).

Alasan lain yang memengaruhi tingginya penyelundupan adalah kedekatan kekerabatan. Rius Bere, Kepala desa Maumutin, menyatakan “Dan satu hal yang mesti digarisbawahi hubungan dagang antara orang di perbatasan RI-RDTL tidak hanya bisa

dipahami dari segi ekonomi tetapi juga emosioal dan kekeluargaan. Jadi kalau ada saudaranya yang butuh BBM disana, disini ada ya apa salahnya dikirim” (Rachmawati dan Fauzan, 2013). Perdagangan illegal memang marak terjadi di perbatasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain minimnya fasilitas pos perlintasan dan layanan administrasi bagi masyarakat sekitar, faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorong masyarakat desa Silawan memilih untuk berdagang secara illegal. Terkadang mereka harus membayar uang sebanyak 5 dolar kepada petugas agar dapat melintasi perbatasan tanpa harus menyertakan dokumen dan melewati jalan tikus. Jalan tikus banyak tersebar di titik-titik tertentu sepanjang perbatasan (Rachmawati dan Fauzan, 2013).

Masyarakat di perbatasan Indonesia dan RDTL, khususnya di Belu dan Bobonaro memang memiliki kedekatan kekerabatan dan sejarah. Wilayah ini merupakan wilayah yang satu sebelum kedatangan Belanda dan Portugis. Meski ada beberapa kerajaan yang berhasil menguasai beberapa bagian dari Pulau Timor ini. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini dipercaya berasal dari Suku Melus atau “*Emafatuk oan ema ai oan*” (manusia penghuni batudan kayu). Wilayah ini juga merupakan tempat persinggahan orang Melayu dan dipercaya bahwa masyarakat Belu masih memiliki darah Melayu. Para pendatang yang menghuni Belu sebenarnya berasal dari “*Sina Mutin Malaka*”. Mereka datang dan Malaka dan bercampur dengan suku asli Melus. Konon menurut kepercayaan setempat, keturunan mereka berhasil memegang tampuk kekuasaan melalui keturunannya. Mereka merupakan tiga bersaudara yang menurut para tetua adat masing-masing menguasai daerah yang berlainan. (Kementrian Dalam Negeri. “Profil Kabupaten Belu”. <http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/53/name/nusa-tenggara-imur/detail/5304/belu> , Kabupaten Belu dalam Angka, 2012).

Demikian pula disebutkan dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh A.A. Mendes Correa di tahun 1944, bahwa ada 4 jenis penghuni pulau Timor yaitu *proto-Malays*, *deutero-Malays*, *Melanesoide*, and *vedo-Australoid*. Namun ia menyimpulkan bahwa dari semua jenis itu lebih disominasi oleh proto-Malay atau tipe “Indonesia”. Menurutnya kelompok masyarakat ini unik karena

sesungguhnya tidak memiliki kesamaan dengan masyarakat yang berasal dari Melayu dan juga Papua ("History of Timor". [http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History\\_of\\_Timor.pdf](http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf)). Dimungkinkan karena percampuran yang dilakukan oleh penduduk asli suku Melus dan pendatang berjuta tahun yang lalu seperti yang dipercaya oleh masyarakat selama ini. Hal ini juga dikukuhkan oleh keteangan James Fox, *Malay-type migrants establishing themselves on Timor's central-north coast in a long process beginning around 3,000 BC before moving inland and displacing and dominating the frizzy-haired "Melanesian" Antoni or "people of the dry land"* ("History of Timor". [http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History\\_of\\_Timor.pdf](http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf) ). Kedatangan orang-orang Malaka ini semata-mata dipicu oleh perdagangan yang didominasi oleh kayu cendana dan sarang tawon, sebagaimana juga kedatangan pedagang Cina. Menurut para peneliti asing, Maromak Oan kekuasaannya juga merambah sampai sebahagian daerah Dawan (Insana dan Biboki). Dalam melaksanakan tugasnya di Belu, Maromak Oan memiliki perpanjangan tangan yaitu Wewiku-Wehali dan Haitimuk Nain. Maromak Oan sendiri menetap di Laran sebagai pusat kekuasaan kerajaan Wewiku-Wehali.

Struktur masyarakat Belu kala itu sangat terbuka oleh berbagai komunitas, mereka hanya dipersatukan oleh sebuah kekuasaan yang terpusat yang menjamin kesejahteraan dan menguasai pengambilan kebijakan publik dan ritual. Seperti yang dijelaskan oleh H.G. Schulte Nordholt, bahwa,

*"...at the time of the arrival of the first Europeans, there existed a realm which might in a sense be considered a unitary state. Supreme power was vested in a ritual centre, the bride giver, to which the various communities shared by virtue of affinal relationships. While the centre existed mainly as a political superstructure, it was also capable of making decisions affecting the entire community, namely warfare, administration, adjudication, and ritual. At the centre of this construct was the kingdom of Waiwiku-Wehale, located in the fertile southeastern part of west Timor, but divided between the Antoni an the Tetum Belu, a division also*

*corresponding with language...* ("History of Timor". [http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History\\_of\\_Timor.pdf](http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf)).

Dengan demikian, kekerabatan penduduk di wilayah Pulau Timor ini sesungguhnya sangat dekat. James Fox seorang anthropologist, menyatakan bahwa pengaruh Kerajaan Belu di Wehale nyaris menguasai 2/3 dari keseluruhan pulau. Kedekatan mereka tidak saja melalui kepercayaan bahwa mereka merupakan satu keturunan atau melalui perkawinan melainkan juga diikat oleh bahasa yang relative sama. Secara linguistik, Pulau Timor terbagi menjadi 2 cabang utama bahasa yaitu Austronesian dan non Austronesian atau Papua. Dimana di bagian barat 2 bahasa yang mendominasi Austronesian, yaitu Antoni dan Tetum. Sedangkan di selatan ada 14 bahasa yang berbeda selain Tetum. Namun bahasa Tetum Belu merupakan bahasa dengan penutur terbanyak. Di samping itu ada Tetum Terik yang juga memiliki penutur cukup banyak di selatan dan barat Pulau Timor didominasi Tetum Belu. Jika dilihat pada persebaran bahasa, maka akan terlihat bahwa di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, masyarakat bertutur dengan bahasa yang sama yaitu Tetum. Hal ini mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Kemudahan komunikasi akan memberikan kepada mereka kemudahan berdagang, berhubungan sosial dan memiliki kedekatan secara emosional.

Kerajaan besar Wehali mulai mengalami kemunduran pada abad ke 16 yang lebih disebabkan karena perebutan jalur perdagangan antara Belanda dan Portugis yang mendorong mereka kemudian berusaha untuk memperlemah kekuasaan Waiwiku-Wehali dengan mengganggu aliansi Wehali dengan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa raja-raja di sepanjang area pantai berusaha memperkaya diri mereka sendiri dengan jalur perdagangan kayu cendana yang baru sehingga tidak tergantung lagi pada pusat atau system perdagangan Waiwiku-Wehale. Dimana secara bersamaan Portugis dan Belanda mengejar kesempatan untuk mendapatkan loyalitas dari kerajaan-kerajaan tersebut. Meski bayangan persatuan masa lalu masih membayangi kerajaan-kerajaan ini sehingga mereka seperti memiliki loyalitas yang dualistik. Seperti halnya ketika seorang peneliti Prancis Louis de Freycinet datang mengunjungi pulau ini di tahun 1818, ia menemukan bahwa pulau Timor terbagai menjadi dua

propinsi besar yaitu Belu dan Serviao. Namun, kerajaan-kerajaan kecil yang berada di wilayah Belu dan sebagian yang berada di wilayah Serviao memiliki loyalitas kepada Portugis, meski mereka yang berada barat laut memiliki loyalitas pula terhadap Belanda. Meski demikian, Fryecinet berpendapat bahwa meskipun mereka memiliki loyalitas, mereka juga cenderung berusaha untuk melepaskan pengaruh Portugis atau Belanda mengingat mereka sering melakukan pemberontakan atau perlawanan ("History of Timor". [http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History\\_of\\_Timor.pdf](http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf)).

Namun, Portugis menghadapi perlawanan dari para *liurai* yang gemar menjelajah serta dari para *Topasses*, yang pada masa itu menguasai perdagangan cendana dan, meskipun keturunan Portugis, mereka jarang mau bekerja sama. Karena tidak mampu memantapkan kekuasaannya di Lifau, Portugis pindah ke Dili pada tahun 1769. Kepindahan ini mempertemukan mereka dengan masyarakat Belu yang mendiami bagian timur pulau ini. ("Sejarah Konflik". <http://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/bh/03-Sejarah-Konflik.pdf>). Dengan demikian dapat dilihat bahwa sesungguhnya para pendatang di Belu tersebut, tidak membagi daerah Belu menjadi Selatan dan Utara sebagaimana yang terjadi sekarang. Menurut para sejarawan, pembagian Belu menjadi Belu bagian Selatan dan Utara hanyalah merupakan strategi pemerintah jajahan Belanda dan Portugis untuk mempermudah sistem pengontrolan terhadap masyarakatnya.

Masyarakat di Pulau Timor ini, khususnya masyarakat Belu atau penutur Tetum semakin terkotak-kotak dengan keputusan yang dibuat oleh Portugis dan Belanda yang membagi dua wilayah kekuasaan mereka pada tahun 1913 yang ditetapkan melalui sebuah keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag, yang dikenal dengan nama *Sentenca Arbital*, dimana Portugis mengambil sebagian bagian di Timur dan wilayah kantong Oecusse. Dan wilayah ini pulalah yang dipakai oleh Indonesia dan Timor Leste kemudian untuk menetapkan batas wilayah yang menandai lahirnya sebuah negara baru yaitu Timor Leste.

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki struktur sosial yang unik. Sejak masa sebelum Wehali hingga kedatangan Portugis dan Belanda, mereka tunduk pada satu kekuasaan

tertentu yang mengatur kehidupan politik mereka, namun demikian secara sosio kultural mereka memiliki kedekatan satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya sempat berada dalam satu kekuasaan yaitu pemerintah Indonesia, mereka kembali harus terpisahkan secara politik tahun 1999. Hasil referendum tahun 1999 kembali memaksa masyarakat tersebut untuk kembali tunduk pada dua kekuasaan yang berbeda. Meski demikian, ikatan kekeluargaan mereka tidak terputus begitu saja. Hubungan sosial merupakan salah satu pendorong utama orang melakukan kegiatan lintas batas, disamping kebutuhan ekonomi (mencari kerja dan atau berdagang dan pendidikan. Mereka warga negara Indonesia yang rata-rata tinggal di Silawan atau Atambua dan masih memiliki keluarga di Timor Leste. Dengan demikian mereka melintasi batas juga untuk mengunjungi keluarga mereka di Belu dan sebaliknya. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan adat seperti pernikahan atau kematian. Bahkan ketua adat memiliki wilayah kekuasaan meliputi beberapa wilayah baik di Belu maupun Bobonaro.

### **3.2. Gambaran Umum Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Belu (RI-Timor Leste)**

Pada tanggal 30 Agustus 1999, Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan jajak pendapat yang diselenggarakan oleh PBB di Timor Timur. Hal ini didasarkan atas Tap MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Dengan diakuinya Timor Leste sebagai negara maka status hubungan antara keduanya menjadi hubungan antar negara dan tidak lagi bersifat subordinatif. Segera setelah pengakuan tersebut, kedua negara saling mengadakan kunjungan kenegaraan yang dimulai oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada upacara Kemerdekaan Timor-Leste tanggal 20 Mei 2002. Presiden Xanana Gusmao kemudian mengadakan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juli di tahun yang sama. Selama kunjungan Presiden Xanana Gusmao, Pemerintah kedua negara menandatangani dua persetujuan penting yang menandai awal kerjasama yang lebih erat, yakni: 1) *Joint Communique concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste*; 2) *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of*



*the Democratic Republic of Timor-Leste on the Establishment of a Commision for Bilateral Cooperation.* Kedua negara juga mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu untuk meningkatkan interaksi masyarakat kedua negara khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan melalui persetujuan tentang pelintas batas tradisional dan pengaturan pasar bersama (*Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Markets*) di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2003.

Selain mengembangkan kerjasama tersebut sebagai konsekuensi dari perubahan status Timor Leste sebagai sebuah negara, maka hal lain yang lebih penting adalah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste harus menentukan batas negara baik untuk wilayah darat, laut dan udara yang mengikuti batas darat maupun batas laut yang ada serta harus disepakati oleh kedua negara. Sebagai dasar hukum penentuan batas darat yang telah disepakati antara RI dan RDTL adalah : Traktat 1904, antara Belanda dan Portugis, Arbitrary Award 1914, Proses Verbale 18 Desember 1914, tentang demarkasi batas definitif, Dokumen Oil Poli 9 Februari 1915, tentang pembangunan marker-marker di Oekusi dan Dokumen Mota Talas 22 April 1915, tentang pembangunan marker-marker di sektor Timur.

Pembinaan hubungan kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia dengan Negara baru Republica Democratic Timor Leste (RDTL) diwujudkan melalui pelaksanaan persidangan Joint Border Committee (JBC) antara RI-RDTL dan ditindaklanjuti dengan persidangan Pertama Joint Border Commitee (JBC) Meeting Between the Goverment of the Republica of Indonesia and the Goverment of the Republica Demokrcatic Timor Leste (RDTL) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Desember 2002.

Melalui serangkaian pembicaraan, disepakati perbatasan negara antara Indonesia dan RDTL ada pada wilayah perbatasan yang terletak di 5 Kabupaten yaitu; Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Timur Tengah Utara (TTU), Kab. Alor dan Kab. Rote Ndao sepanjang garis perbatasan sejauh 268,8 kilometer. Sementara di wilayah *Enclave Oekusi* di mana sesuai dengan perjanjian antara pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 perbatasan antara Oekusi

- Ambeno wilayah Timor-Timur dengan Timor Barat ditarik dari Noel Besi sampai Muara Sungai (*Thalueg*) dengan panjang 119,7 kilometer. Perbatasan dengan Australia terletak di dua Kabupaten yaitu Kupang dan Rote Ndao yang umumnya adalah wilayah perairan laut Timor dan khususnya di Pulau Sabu. Garis batas negara di NTT ini terletak di 9 kecamatan, yaitu 1 kecamatan di Kab. Kupang, 4 kecamatan di Kab. TTU, dan 5 kecamatan di Kab. Belu. Selain kawasan perbatasan darat, NTT juga memiliki 4 kecamatan perbatasan Laut dengan Timor Leste yaitu 1 kecamatan di Kab. Kupang dan 3 kecamatan di Kab. Alor (Hariyadi, 2007:9).

Peningkatan kekuatan TNI untuk menjaga perbatasan RI-RDTL cukup besar. Di masa lalu, ketika Timor-Leste masih menjadi provinsi *de facto* Indonesia, di wilayah ini kekuatan tempur TNI banyak dikerahkan di provinsi Timor Timur karena pada waktu itu TNI melakukan operasi *contra-insurgency* untuk menghabiskan *Forças Armadas da Libertação de Timor-Leste (FALINTIL)* yang sedang berperang gerilya untuk kemerdekaan Timor-Leste. Dua batalyon infanteri (Yonif 744 dan Yonif 745) khusus dibentuk dan ditempatkan di provinsi ini dan selain itu ada sejumlah batalyon yang ditugaskan di provinsi ini dari luar wilayah Kodam IX yang jumlahnya berbeda-beda tergantung pada operasi militer yang sedang dilakukan. 11 Setelah Timor-Leste merdeka, wilayah Korem 161 dan khususnya daratan Timor Barat dianggap penting karena berbatasan dengan negara lain, yaitu Timor-Leste (berbatasan darat dan laut) dan Australia (berbatasan laut). Tingginya kehadiran personel militer dapat menjadi argument bahwa pengelolaan perbatasan RI-RDTL tergolong apa yang disebut sebagai “*hard-border security regime*” yaitu perbatasan dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan bersenjata, sementara pintu perlintasan perbatasan terbatas jumlahnya dan dijaga tidak hanya oleh petugas imigrasi tetapi juga oleh petugas polisi dan tentara bersenjata. Negara yang memberlakukan “*hard-border security regime*” cenderung untuk membatasi keluar masuknya pelintas batas dengan alasan keamanan nasional (Hariyadi, 2007).

Namun demikian, pendekatan ini lambat laun berubah dengan mulai diperhatikannya pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Perubahan pendekatan pengelolaan perbatasan terutama dilandasi oleh

perubahan persepsi bahwa perbatasan merupakan halaman belakang menjadi beranda terdepan. Sejumlah fasilitas bagi pos perbatasan dibangun termasuk dalam dokumen perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015, ditetapkan pemberlakuan bebas visa antara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini mengakibatkan adanya lonjakan kunjungan penduduk Timor Leste ke wilayah Indonesia. Pos perlintasan Motaain di perbatasan Indonesia-Timor Leste mencatat masuknya penduduk Timor Leste sebanyak 12.072 orang pada April 2016. Jumlah ini lebih banyak daripada angka pada April 2016 sebesar 9.804 orang. Rata-rata warga negara Timor Leste masuk ke wilayah Indonesia tiap hari pada Maret 2016 berkisar 40-50 orang, meningkat menjadi hingga rata-rata seratus orang per hari pada April. Peningkatan yang sama juga terjadi pada kunjungan warga negara Indonesia ke Timor Leste, meski peningkatannya tidak terlalu signifikan. Jumlah pelintas batas warga Indonesia pada Maret 2016 mencapai 6.597 orang, meningkat menjadi 6.729 orang pada April 2016 (Tempo.Co, 2016).

Aktivitas pelintas batas didominasi oleh kepentingan ekonomi dan keluarga atau adat. Selama ini perdagangan ilegal masih cukup banyak mewarnai perbatasan Indonesia Timor Leste. Hal itulah yang menjadikan alasan bagi negara untuk meletakkan TNI pengelolaan perbatasan negara. Bahkan pos lintas batas pun masih didominasi oleh TNI. Maraknya perdagangan ilegal didorong salah satunya oleh tidak berjalannya pasar lintas batas yang disediakan oleh pemerintah. Pasar-pasar tersebut pernah beroperasi selama beberapa tahun, dari tahun 2003 hingga 2006. Bahkan menurut Rius Bere, keuntungan yang didapat dari pasar tersebut kala itu cukup besar. Keuntungan 200% data diraup pedagang yang cukup membeli barang untuk diperdagangkan di pasar tersebut. Bahkan sejak dibuka tahun 2003 -2006 secara resmi semua semua boleh masuk termasuk kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk mobil mewah seperti innova dan avanza waktu itu diperjualbelikan. Setelah tahun 2006 pasar ditutup, maka mulai marak perdagangan BBM secara ilegal (Rachmawati dan Fauzan, 2013).

Namun karena ada insiden penembakan di tahun 2006, maka pasar -pasar tersebut ditutup secara sepihak oleh pemerintah. Pada tahun 2006 terjadi insiden penembakan oleh Kepolisian Nasional

Timor Leste PNTL dari Unit Patroli Perbatasan BPU yakni Candido Mariano, Estanislau Maubere dan Jose Mausorte yang menewaskan 3 orang pencari ikan / warga sipil asal Desa Tohe Kecamatan Reihat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur di Sungai Malibaca (Tempo. Co, 2006). Hal ini mendorong pemerintah kedua negara untuk segera membentuk tim investigasi agar persoalan tidak segera berlarut. Namun sayangnya banyak warga yang tidak mengetahui alasan ditutupnya pasar-pasar tersebut padahal di sisi lain mereka sangat membutuhkan pasar, selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka juga dapat berdagang.

Sementara mengacu pada pendapat Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin, sejak dibangun pemerintah pusat pada tahun 2003, sejumlah pasar di perbatasan yang terletak di Motaain (Indonesia)-Batugade (Timor Leste), Metamauk-Salele, Builalo-Memo, Haekesak-Turiskain, Laktutus-Belulik Leten masih mubazir. Mubazirnya pasar-pasar antarnegara itu, karena sejumlah faktor internal dan eksternal para pengelola dari kedua negara seperti masalah keamanan, syarat teknis penerbitan pas lintas batas (PLB) dari Timor Leste yang belum siap. Belum siapnya pihak pengelola dari Timor Leste ini, karena masalah teknis pengesahan PLB khusus untuk para pedagang lintas negara yang harus dibedakan dengan warga masyarakat biasa dalam melakukan interaksi jual-beli. (Kompas .Com, 2010). Sedangkan pasca penutupan pasar lintas batas tersebut, beberapa warga memanfaatkannya untuk usaha produktif dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada waktu itu ada permakluman dari pemerintah Belu agar warga dapat memenuhi kebutuhannya. Sayangnya, pungutan liar terjadi di pasar-pasar tersebut dan semenjak tahun 2006 pasar-pasar tersebut ditutup. Misalnya, pasar Memu, Lian Sorun, Maubusa dan Malibaka. Pungutan liar dikenakan pada pengujung pasa sebesar Rp. 10.000, - hingga Rp. 20.000,- yang tentu saja membebani pengujung pasar yang pada umumnya petani miskin.

Dari tahun 2006 hingga saat ini, perdagangan tradisional lintas batas pun marak terjadi karena tidak tersedia pasar lintas batas. Warga tidak jarang nekat untuk melalui kondisi perbatasan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka demi mengais rejeki. Seperti yang terlihat di Turiskain, selain ketiadaan pasar, minimnya fasilitas dan

pelayanan ditambah dengan tidak adanya jalan ataupun jembatan dari dan ke Timor Leste, penduduk harus menyeberangi sungai yang cukup lebar untuk menjual beberapa ekor kambing .

### 3.3. Wisata Alam di Kabupaten Belu

Kabupaten Belu, seperti wilayah Nus Tenggara Timur lainnya menawarkan pemandangan alam yang sangat cantik terutama pantai. Demikian pula Belu, memiliki sejumlah tawaran wisata alam yang indah. Sebagai penerima Anugerah Kebudayaan Kategori Pemerintah Daerah 2016, Belu telah menyelesaikan studi “master plan” potensi-potensi wisata alam dan budaya di kawasan perbatasan. Sejumlah titik obyek wisata di perbatasan telah dipetakan tinggal dipoles dan tata dengan baik. Obyek-obyek wisata yang dimaksud antara lain Kolam Susu, Pantai Motadikin, Teluk Gurita, Pantai Aufuik, Dermaga Atapupu, Pantai Sukaerlaran, Pantai Pasir Putih, Pantai Motaain (Perbatasan Timor Leste), Air Terjun Lesutil, Air Terjun Mauhalek, Panorama Gunung Lakaan.

Namun demikian, tempat-tempat wisata tersebut saat ini masih berada dalam kondisi yang sebagaimana adanya. Belum banyak fasilitas yang disediakan di tempat-tempat tersebut bahkan fasilitas jalan menuju tujuan wisata tersebut beum terlalu baik kecuali tyang berada di pinggir jalan utama seperti Pantai pasir Putih Atapupu. Bupati Belu Nusa Tenggara Timur Joakim Lopez, mengatakan bahwa pengembangan kawasan pariwisata untuk pengembangan dan percepatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste membutuhkan anggaran Rp. 50 miliar (“Pengembangan pariwisata perbatasan di Belu perlu Rp50 miliar”, 2012). Tentu saja biaya sebesar itu tidak mampu dipenuhi oleh Belu sendiri. Selain suntikan dana APBN kerjasama dengan instansi swasta dan juga kerjasama antara negara dapat membantu peningkatan pariwisata Belu. Secara kebetulan Timor Leste menawarkan sebuah kerjasama pengelolaan kawasan wsiata perbatasan melalui *Integrated Economic Approach* di daerah perbatasan antara Timor Leste dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, hal ini belum ditindak lanjuti secara nyata oleh pemerintah.

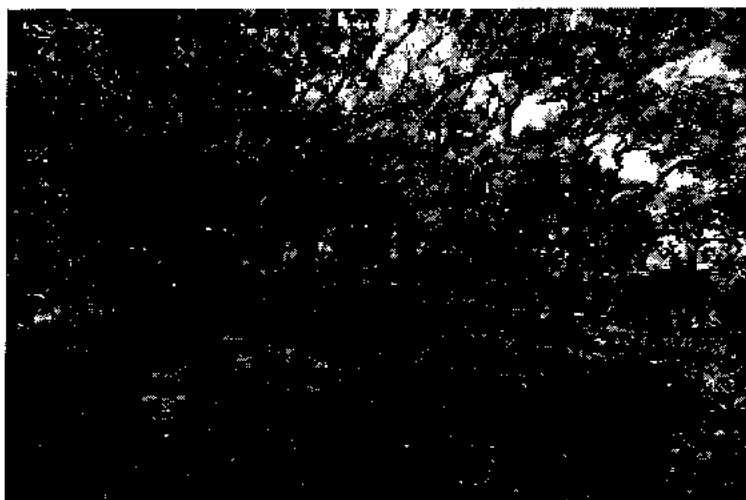
Berikut beberap tujuan wisata yang terdapat di Kabupaten Belu.

### 3.3.1. Benteng Ranu Hitu atau Benteng Lapis Tujuh Makes

Benteng ini terletak pada puncak Bukit Makes di Desa Dirun. Benteng yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu ini berjarak  $\pm 2$  km dari Dusun Nuawa'in Desa Dirun dan berjarak  $\pm 40$  km dari Kota Atambua. Sayangnya, fasilitas sarana dan prasana di benteng ini masih belum memadai. Benteng ini berbentuk pagar batu sebanyak 7 (tujuh) lapis atau tujuh tingkat pertahanan yang tersusun rapi, sangat kuat dan masih asli. Memiliki sebuah meriam tua yang terdapat di depan pintu masuk Saran Mot, meriam ini adalah bekas peninggalan bangsa Portugis.

Gambar. 3.2

Benteng Ranu Hitu



Sumber: <http://kepulauanntt.blogspot.co.id/2016/08/benteng-lapis-tujuh-makes-kabupaten-belu.html>.

Menurut kepercayaan masyarakat, benteng ini dibangun atau disusun rapi dan kuat karena adanya campur tangan dari para makhluk gaib. Pada lapisan ke - 7 (tujuh) benteng yang diameter lingkarannya  $\pm 10$  m biasa dipergunakan untuk ritual adat yang dilakukan oleh Tisi Antak Ne'an (kepala-kepala suku setempat) untuk meminta izin untuk membuka jalan menuju Saran. Ada 5 (lima) tempat) yang harus dilewati sambil membuat upacara adat

untuk membuka jalan atau pintu menuju Saran Mot. Kalau niatnya berkunjung atau sekedar jalan – jalan menuju Saran, syaratnya bisa dengan beras yang dihambur – hamburkan sedikit demi sedikit di tempat – tempat yang sudah ditentukan oleh kepala – kepala suku, kemudian meletakkan sirih pinang dan uang kertas. Kalau mau melakukan suatu upacara adat dalam Saran Mot itu sendiri, syaratnya adalah harus membawa beras, uang kertas, ayam jantan warna apa saja, tetapi khusus pintu terakhir masuk Saran harus ayam jantan warna merah dan sirih pinang. Saran Mot adalah tempat yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk membentuk struktur pemerintahan adat setempat, menerima kepala musuh (para meo) sebagai tanda kemenangan dan tempat mengadakan upacara syukuran hasil panen pertama berupa jagung dan padi ladang.

### **3.3.2. Situs Ksadan Makuloon**

Situs Makuloon terletak di Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen. Situs ini dibangun sekitar 700 - 800 tahun yang lalu sebagai tempat ritual adat, pengadilan adat serta pelantikan raja dan pembantu-pembantunya. Di tempat ini juga merupakan makam raja-raja. Situs ini berbentuk spiral/ bangunan bertingkat lima, yang tersusun rapih dengan batu-batu Megalitik yang mempunyai nilai budaya. Dahulu situs itu merupakan pusat budaya yang senantiasa dihormati oleh berbagai kalangan. Ksadan ini berbentuk bundar dibuat dari susunan lempengan batu besar dengan dasar keliling 24 meter, tingkat 1 memiliki keliling 23 meter, tingkat 2 memiliki keliling 22 meter, tingkat 3 memiliki keliling 21 meter dan puncaknya memiliki keliling 20 meter. Di tingkat ketiga hidup sebuah pohon beringin besar yang menaungi ksadan ini. Ksadan Makuloon didirikan oleh Bere Rusan dan Mau Rusan. Mereka adalah orang Melus – suku asli Belu yang mendiami sebagian besar daerah Belu.

Gambar 3.3.  
Ksadan Makuloon



Sumber: <http://www.way2east.com/destinations/Ksadan-Makuloon/>.

Setelah Ksadan Makuloon dibangun, datanglah leluhur orang Bunag dari arah timur dan mereka menjadi leluhur orang Belu berikutnya setelah orang Melus. Dalam perkembangan selanjutnya hubungan kedua suku besar ini tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena Orang melus mengklaim bahwa semua hasil bumi yang terdapat di daerah ini adalah milik mereka. Orang Bunag harus meminta izin apabila ingin mengambil air ataupun kayu. Situasi tersebut pada akhirnya membawa mereka pada peperang Selain terjadi perang fisik terjadi pula perang tipu daya. Dalam perang ini orang Melus kalah dan mereka tersingkir dari daerah yang telah mereka tempati lebih dahulu. Setelah orang Melus meninggalkan Loonuna, daerah yang mereka tinggalkan ditempati kembali oleh orang Bunag yang dikepalai oleh Tes Lelo dan Mali Lelo dan sekaligus menguasai ksadan Makuloon. Lambat laun jumlah mereka bertambah banyak di daerah Loonuna. Sayangnya diantara orang Bunaq sendiri sendiri terjadi persaingan. Kedua orang yang pertama kali menempati Loonuna dan Ksadan Makuloon yakni Tes Lelo dan Mali Lelo kurang harmonis. Ketidakharmisan ini didasari karena keduanya berusaha untuk menjadi raja Loonuna. Pada akhirnya rakyat Loonuna mengangkat orang dari Ekin untuk menjadi raja Loonuna.

Fungsi Ksadan Makuloon sendiri adalah selain sebagai tangga bagi Tuhan ketika turun ke bumi, ia juga berfungsi sebagai



pengadilan / tempat menyelesaikan masalah – masalah besar. Pihak atau orang yang terbukti bersalah akan dihukum mati. Hukuman mati inipun dilakukan dengan cara yang unik yakni dengan cara menusukkan kayu runcing melalui lubang anus sampai meninggal. Setelah meninggal jenasanya ditancapkan pada kayu yang telah disiapkan. Selain itu, Ksadan Makuloon bersungi sebagai tempat untuk menaikkan kakaluk ( jimat ) yang dilakukan oleh raja bila terjadi perang. Ia juga menjadi tempat dilakukan acara adat dimana dalam setahun sebanyak tiga kali yakni, acara adat berburu babi hutan ( an tama ) yang biasanya dilaksanakan pada awal bulan November. Paol Sau ( panen jagung ) yang dilakukan untuk memohon izin kepada leluhur sehingga pada waktu panen hasil kebun tidak terjadi hal – hal buruk dan Hotton A yaitu memberi sesaji pada leluhur sebagai ucapan terima kasih atas hasil panen dalam setahun (“Data Objek Wisata Unggulan” 2014).

### 3.3.3. Kampung Adat Kewar

Kampung Adat Kewar berada di Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen. Berjarak kurang lebih 45 km sebelah Timur dari pusat Kota Atambua. Obyek ini berada dalam perlindungan UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya. Kampung Adat Kewar merupakan tempat yang penting bagi orang Bunag, karena merupakan tempat bertahtanya Loro Lamaknen pemimpin tertinggi mereka. Rumah adat ini terdapat diatas sebuah puncak bukit dan dikelilingi oleh rumah adat kecil lainnya. Bangunan–bangunan megalitik tersebut berupa ksadan, yang di dalamnya terdapat tempat duduk raja, dan tempat duduk pemangku jabatan adat serta tempat duduk rakyat yang semuanya terbuat dari batu. Selain itu terdapat banyak tempat sesaji (menhir) dari setiap suku yang mengelilingi ksadan tersebut.

Bangunan utama Rumah Raja (Reu Leogatal Loro) terletak berhadapan langsung dengan pelataran terbuka (Mot atau Ksadan). Rumah Raja berbentuk rumah panggung dan beratap alang - alang hingga ke tanah. Secara horizontal pada ruang berintikan pada ruang tengah yang berada diantara 2 tiang agung (Nulai Mone/ Tiang laki - laki dan Nulai Pana/ Tiang Perempuan). Seluruh tiang

dan dinding rumah raja dihiasi dengan ragam hias berbagai bentuk yang diukir tidak terputus. Pada bagian depan rumah raja terdapat pelataran terbuka berupa *Leo Rato* tempat duduk raja, 2 susunan batu temu gelang yang dalam bahasa lokalnya disebut *Mot Pana* dan *Mot Mone*. *Mot Pana* berfungsi sebagai kuburan sedangkan *Mot Mone* berfungsi sebagai tempat duduk para utusan suku pada saat melaksanakan upacara adat. Pada sisi kiri dan kanan rumah raja terletak 15 Rumah Suku.

Gambar 3.4.  
Rumah Adat Kewar



Sumber: <http://www.way2east.com/destinations/Rumah-Adat-Kewar>.

Rumah adat kerajaan sudah beberapa kali dipugar. Pada tahun 1949-1950 dalam masa kekuasaan Loro ke X yakni Loro Alfonsius Andreas Bere Tallo memperluas rumah adat itu dengan menggantikan 2 tiang agung yang besar serta tiang-tiang penopang lainnya dengan ukiran tradisional termasuk tempat penyimpanan benda-benda pusaka dari kerajaan. Pada tahun 2003 dikarenakan bubungan atap dan alang-alang penutup sudah hancur maka direnovasi dengan mengganti alang-alang yang baru

di bawah pemerintah Loro ke XI Kali Mau Ignasius Yosef dan Nai Gewal/Kewar M.A. Bere Bau.

Rumah adat kewar sebagai tempat wisata tradisional juga cukup signifikan sebagai daya tarik wisatawan baik domestik maupun manca negara. Selama ini kunjungan wisatawan yang cukup banyak ada di sekitar bulan Agustus–Oktober. Sayangnya, kondisi rumah adat ini cukup memprihatinkan dengan alang-alang penutup atap yang sudah mulai hancur dan masih kurangnya sarana pendukung lainnya seperti pagar keliling, km/wc umum dll.

Selain rumah adat kewar, tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi karena nilai budayanya adalah Bukit Lolo Gewen Mauruan. Tempat ini merupakan makam Loro Lamaknen ke IV Loro Bibel Laku Mali. Tempat ini memiliki nilai kesakralan yang sangat tinggi dan menjadi tempat ritual adat dan wisata budaya bukan hanya bagi suku Loegatal Loro tetapi juga bagi orang-orang lain yang mempercayai nilai kesakralan tempat ini seperti para pejabat-pejabat pemerintahan. Mereka juga seringkali melakukan ritual adat tentunya dengan seijin dari pemimpin adat suku Loegatal Loro (Alexander Loe, Tanpa Tahun).

#### **3.3.4. Kolam Susuk**

Objek wisata kolam susuk berada di Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, kabupaten Belu atau sekitar 17 kilometer arah utara dari kota Atambua, ibukota Kabupaten Belu. Tidak diketahui secara pasti kapan kolam susuk ditemukan tetapi keberadaan objek wisata ini sudah ada sejak dahulu kala dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan hidupnya dengan menangkap ikan, udang, kepiting, dan lain-lain.

Kolam ini terbentuk secara alami dan memiliki tanah yang berwarna putih. Sehingga kalau terkena sinar matahari airnya memantulkan cahaya yang berwarna putih seperti susu. Ini menjadi alasan mengapa sekarang nama objek wisata ini lebih sering disebut dengan nama kolam susu. Tetapi sebenarnya karena objek wisata ini dikelilingi oleh hutan bakau yang lebat menyebabkan banyak sekali terdapat nyamuk disekitar tempat ini, akhirnya masyarakat setempat kemudian menamai kolam tersebut dengan

sebutan Kolam Susuk atau dalam bahasa Indonesia disebut kolam nyamuk.

Asal muasal nama Kolam Susuk sendiri berdasarkan legenda yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Menurut legenda, pada jaman dahulu ada tujuh bidadari yang singgah untuk membersihkan diri di Kolam Susuk ini. Bidadari tersebut merupakan utusan Raja Lifao dari Oecusse. Raja Lifao sengaja mengirim nyamuk untuk mengganggu mereka saat tertidur. Karena gangguan nyamuk tersebut, para bidadari tetap terjaga sehingga tidak dimangsa oleh para pembantu raja (“Kolam Susuk Cantiknya Pemandangan Alam di Nusa Tenggara Timur”. Tanpa Tahun).

Gambar 3.  
Kolam Susuk



Sumber: <https://wisata-flores-ntt.blogspot.co.id/2017/03/tempat-asik-untuk-wisata-di-belu-ntt.html>.

Kolam Susuk yang dapat dicapai dalam tempo 20 menit perjalanan dengan kendaraan roda empat dari Atambua itu. Letaknya persis di Desa Junelu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Di atas puncak bukit yang membentuk kolam tersebut, telah dipasang sebuah pigura raksasa bertuliskan Kolam Susuk. Di lembah bukit yang menghadap ke arah kolam, telah

dibangun rumah-rumah payung sebagai tempat berteduhnya para wisatawan dari terik matahari.

Kawasan Kolam Susuk akan dimanfaatkan untuk budidaya bandeng dan udang. Warga sekitar pernah mengembangkan bandeng dan udang di kolam tersebut. Namun tidak merawat dan menatanya dengan baik sehingga membuat lingkungan sekitarnya menjadi rusak. Lokasi kolam susuk yang bermakna sejarah itu, kini sedang dipoles menjadi tujuan wisata alam dan bahari yang menakjubkan bagi para wisatawan. Pengembangan kawasan wisata terpadu Kolam Susuk untuk menyediakan lokasi wisata alternatif untuk warga asing terutama dari Timor Leste. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu bisa mendapatkan sumber pendapatan dari sektor pariwisata untuk kelangsungan pembangunan di daerah tersebut.

Kolam Susuk adalah salah satu kawasan wisata tambak di Kabupaten Belu. Sejak dahulu sudah dimanfaatkan warga, baik dari dalam daerah maupun luar untuk menikmati suasana alam, sambil menikmati hasil tangkapan bandeng yang ada di kolam tersebut.

### **3.3.5. Pantai Pasir Putih**

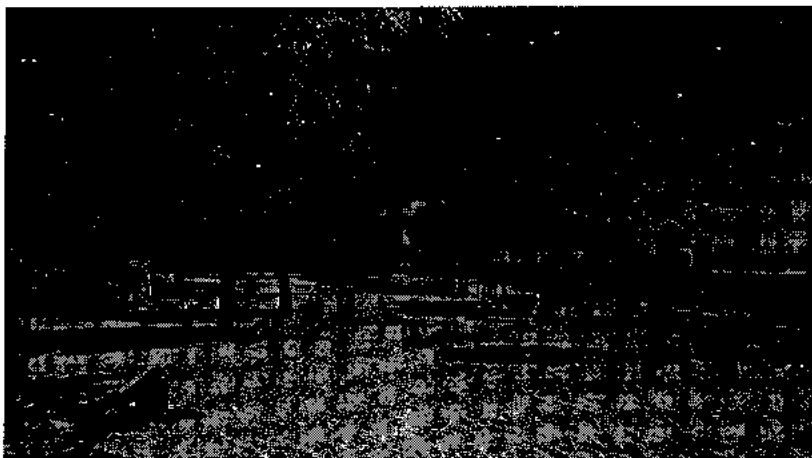
Pantai Pasir Putih ini berjarak dari kota Atambua ± 24 km kearah utara dan hanya 6 km dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-Timor Leste di Motaain. Terletak di Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Dari pusat Kota Atambua dapat ditempuh dengan mobil sekitar 50 menit.

Di pantai ini pengunjung dapat berekreasi, mandi, berenang sambil menikmati suasana alam pantai yang tenang dan indah dengan pasirmya yang berwarna putih. Pantai Atapupu biasa juga disebut dengan nama Pantai Sukaerlaran atau Pantai Pasir Putih. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang indah, Selain itu, keadaan alam di pantai ini masih sangat alami dan belum terjamah oleh tangan-tangan jahil. Pantai yang bersih ini memiliki air laut sangat bening dan jernih dengan topografi pantainya yang datar dan dangkal sehingga aman bagi kita untuk bermain air sepuasnya di sini ("Pantai Atapupu, Wisata Pasir Putih di Atambua", Tanpa

Tahun). Jika berada di pantai ini pada tengah hari, dapat ditemui sejumlah nelayan yang sedang kembali dari melaut. Mereka biasanya akan menawarkan hasil tangkapan ikannya kepada para pengunjung pantai. Pengunjung bisa membeli ikan langsung dengan harga yang lebih murah.

Pengunjung pantai ini kebanyakan adalah warga lokal saja karena memang pantai ini belum banyak dikenal oleh para wisatawan. Selain warga lokal, pantai ini juga dikunjungi oleh warga negara Timor Leste yang menuju ke Atambua. Ditempat ini juga telah disediakan rumah payung, MCK, fasilitas permainan anak-anak dan pondok-pondok yang dapat digunakan untuk beristirahat bersama keluarga selain itu dapat pula menyewa sampan tradisional untuk berkeliling dan juga bisa menyusuri pantai Sukaerlaran dan Motaain sebagai tapal batas dengan Timor Leste yang merupakan pintu gerbang lintas darat.

Gambar 3.6.  
Pantai Pasir Putih

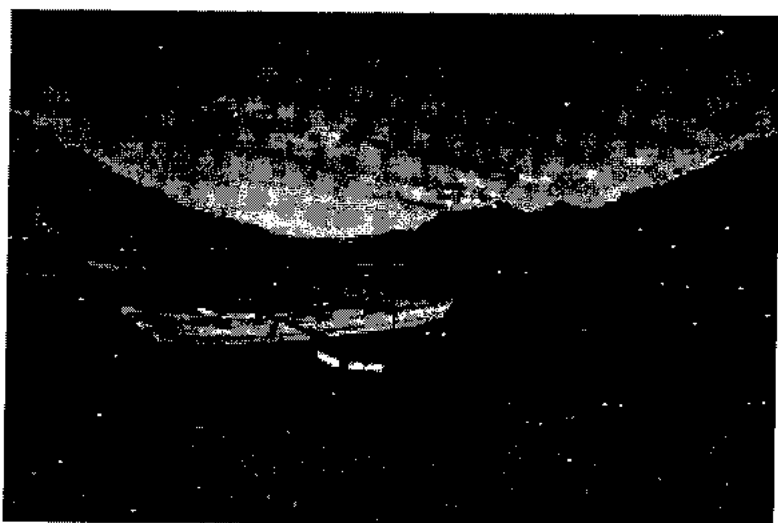


Sumber: <http://sumutpos.co/2017/09/17/sebelum-saksikan-slank-di-atambua-tengok-pantai-pasir-putih-atapupu/>

### 3.3.6. Teluk Gurita

Teluk Gurita terletak di Kecamatan Kakuluk Mesak ± 18 km dari kota Atambua kearah Barat Laut. Teluk ini pada masa lalu bernama Kuit Namon. Ia merupakan tempat dimana pada masa lalu para pedagang dari berbagai negara baik Asia maupun Eropa melabuhkan kapalnya untuk mendapatkan cendana dan damar.

Gambar 3.7.  
Teluk Gurita



Sumber: [http://pariwisata.belukab.go.id/wp-content/uploads/2016/12/teluk\\_gurita\\_di\\_atapupu-360x240.jpg](http://pariwisata.belukab.go.id/wp-content/uploads/2016/12/teluk_gurita_di_atapupu-360x240.jpg).

Disebut dengan Teluk Gurita karena konon ada sebuah kapal pedagang Spanyol yang sedang berlabuh di teluk dililit oleh sebuah Kuit atau gurita raksasa dan menenggelamkan kapal. Tetapi sampai sekarang reruntuhan kapal dan isinya, telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita ini.

Pada masa penjajahan Jepang, tentara Jepang memanfaatkan teluk Gurita sebagai pelabuhan untuk kepentingan perang dan ketika Jepang kalah dari tentara Sekutu teluk ini dijadikan tempat untuk memusnakan seluruh peralatan perang serta amunisinya.

Kondisi alam teluk ini masih sangat alami. Fasilitas penginapan belum ada begitu juga dengan rumah makan. Rumah makan terdekat berjarak 5 km. Namun demikian, banyak pengunjung datang untuk sekedar menikmati keindahan alam dan memancing di Danau Konkas yang berhubungan langsung dengan teluk gurita.

### **3.4. Wisata Belanja dan Crossborder Festival di Perbatasan sebagai Wisata Alternatif**

Kedekatan geografis antara Belu di Nusa Tenggara Timur dan Bobonaro di Timor Leste memberikan peluang ekonomi yang cukup besar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di antara keduanya pernah dibuka pasar tradisional lintas batas yang cukup ramai sebelum tahun 2006, maka ide ini kembali dihidupkan oleh Kepala Desa Silawan.

“Karena pasar internasional yang dimaksudkan itu sudah ditutup, jadi kita berupaya menggerakkan masyarakat kita ke pasar tradisional untuk kedua negara khususnya di desa tetangga yaitu di desa Batu Gade. Di sana hari Kamis, di sini hari Selasa. Tujuannya untuk mempererat hubungan silaturahmi, sosial dan budaya juga untuk memperdagangkan hasil pertanian dan bahan pokok makanan. Ya, karena untuk sembako Timor Leste sangat membutuhkan dari Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sembako yang 9 kebutuhan pokok mereka harus pasok dari Indonesia khususnya dari Silawan. Makanya kita memberikan ruang untuk belanja di desa kita” (Rachmawati dan Fauzan 2013).

Ide mula pasar menurut Freddy Mones adalah untuk membantu masyarakat agar tidak lagi terlalu jauh menjual barang dagangannya atau membeli kebutuhan pokok jauh hingga Atambua. Selain itu, pasar juga berfungsi untuk para warga petani menjualkan harga pertaniannya, keberadaan pasar tradisional juga bisa membantu warga Timor Leste saling mengunjungi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. (“Pasar Tradisional di Perbatasan Silawan dibuka Kembali”. 2013). Melihat kondisi perekonomian masyarakat yang masih sangat terbatas oleh fasilitas maka pasar tradisional dihidupkan kembali oleh pemerintah daerah untuk membantu warga agar dapat mencukupi kebutuhannya.



Salah satu hal penting yang berhasil dijumpai oleh Kepala Desa adalah penyediaan pasar tradisional lintas batas yang kembali dibuka di Motaain. Pasar tradisional lintas batas ini dibuka kembali pada tahun 2013. Pasar ini menempati areal yang tidak terlalu besar dengan mengambil tempat juga tidak jauh dari pasar tradisional lintas batas yang dahulu pernah diselenggarakan oleh pemerintah. Pasar tradisional ini terlihat cukup ramai baik oleh pedagang dan pembeli.

Pedagang banyak datang dari Atambua dan dari sekitar perbatasan. Kurang lebih 50 pedagang yang berjualan di pasar yang sangat sederhana tersebut. Baik yang menempati kios maupun lapak tidak permanen. Mereka berjualan berbagai macam kebutuhan pokok dari beras, mie, sabun, sayur mayor hingga pakaian, barang-barang kebutuhan dapur/masak seperti panci, wajan, gelas, piring dan lain sebagainya, obat-obatan yang dijual bebas, juga telepon seluler. Beberapa pedagang makanan juga nampak berjualan di areal pasar.

Gambar 3.8

Barang-Barang yang diperjualbelikan di Pasar Tradisional Lintas Batas Motaain, Belu.



Sumber: Rachmawati dan Fauzan (2013)

Dengan mempergunakan pas lintas batas, warga Timor Leste menyeberang ke wilayah Indonesia tanpa melalui persyaratan dokumentasi yang rumit. Mereka datang dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan roda dua karena jaraknya memang cukup dekat. Sejumlah petugas perbatasan turut berjaga di pasar untuk memantau pergerakan orang dan juga mengawasi barang dagangan karena ada sejumlah barang dagangan yang dilarang untuk diperjual belikan, seperti bahan bakar, senjata, narkoba, seragam pegawai negeri sipil dan tentara, perlengkapan komunikasi (missal HF atau VHF), kayu cendana dan produk yang dihasilkan dari bahan dasar kayu cendana, emas dan batu mulia lainnya, barang-barang yang mendapat subsidi pemerintah serta barang-barang yang dilarang untuk diperdagangkan oleh hukum pada kawasan yang bersangkutan.

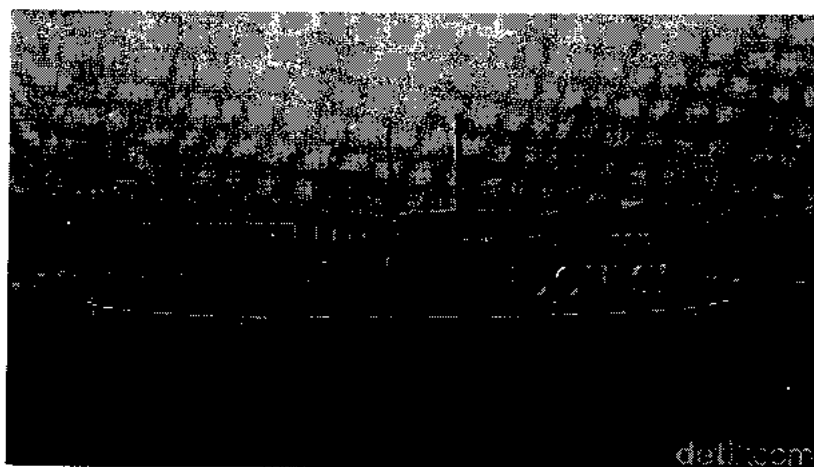
Pembeli lebih banyak datang dari Timor Leste meski tidak sedikit jga yang datang dari masyarakat lokal. Para pembeli biasanya mempergunakan dolar sebagai alat tukar dengan patokan 1\$ sama dengan Rp. 10.000,-. Para penjual biasanya menyesuaikan harga barang dagangannya dengan nilai tersebut. Dipakainya dollar sebagai alat tukar ini juga mendorong lahan pekerjaan baru bagi pemuda Silawan yaitu sebagai penjual jasa tukar uang

.Riset Rachmawati dan Fauzan (2013) menemukan bahwa pedagang dan pembeli merasa sangat senang dengan adanya pasar tersebut. Polisi dan pamong praja Desa Silawan turut mengawasi berjalannya pasar tradisional lintas batas tersebut. Namun demikian, sebaliknya dari petugas pos lintas batas dan pamong praja masih memiliki kesulitan untuk mengontrol orang-orang yang keluar dan masuk perbatasan negara dengan adanya kegiatan semacam ini. Ramainya orang dan pintu keluar masuk yang sangat terbuka di Motaain, mengakibatkan mereka kesulitan mengawasi orang-orang yang berusaha keluar dari area yang ditetapkan sebagai area paspor merah atau pas lintas batas. Bisa saja mereka berjalan keluar dari area pasar lalu berkendara keluar dari Motaain menuju Atambua dan daerah-daerah yang lain. Terlebih lagi penampilan fisik dan bahasa mereka sama dengan masyarakat kebanyakan di Motaain. Situasi ini sesungguhnya telah menunjukkan betapa pentingnya penataan kembali area pos lintas batas di Motaain.

Pada tahun 2015, proyek pembangunan pos Motaain dimulai. Pos ini dibangun tidak saja untuk melayani kebutuhan fisik berupa fasilitas dan pengawasan bag keluar masuknya orang dan barang tetapi juga sebagai bentuk perhatian bagi warga perbatasan yang artinya memberikan mereka kebanggaan menjadi warga Indonesia, terlebih lagi ketika banyak warga eks Timor Leste yang memilih menjadi warga RI dan tinggal di kawasan perbatasan (“Pos Lintas Batas Negara di NTT Mulai Dibangun” 2015).

Pembangunan pos ini meliputi bangunan utama yang akan menjadi pusat pelayanan keimigrasian terpadu. Model bangunan utama ini dirancang dengan kombinasi arsitektur tradisional dan modern yang terlihat padu. Atapnya berbentuk kubah seperti bentuk atap rumah adat NTT, Mbaru Niang. Seluruh pelayanan akan dilakukan di satu gedung yang sama dan dilakukan dengan alur yang lebih teratur dengan cukup melakukan satu kali pelaporan. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain berdiri di atas lahan seluas 8,03 ha dengan luas bangunan mencapai 8,554,12 meter persegi yang berupa bangunan dua lantai (“Perkembangan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara RI-Timor Leste di Motaain” 2016).

Gambar 3.9.  
Tampak Depan PLBN Motaain



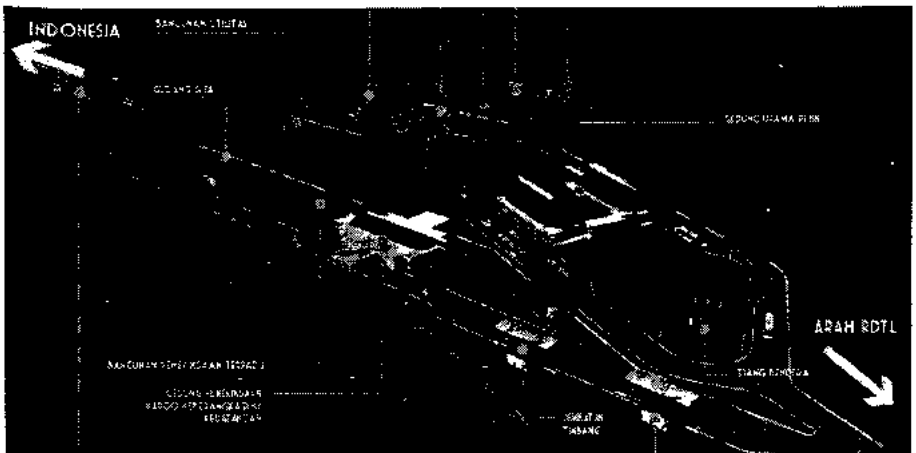
Sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3381936/ini-penampakan-plbn-motaain-yang-akan-diresmikan-jokowi>

Bangunan PLBN Motaain meliputi zona inti yang terdiri dari bangunan utama PLBN, gedung pemeriksaan kendaraan dan power house. Untuk zona sub inti dan pendukung terdiri dari wisma Indonesia dan mess karyawan serta sarana pendukung lainnya. Pembangunan pos tersebut dimulai sejak tahun 2015 dengan pendanaan sebesar Rp 82 miliar. Selain PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara juga turut dibangun kembali. Selain membangun gedung PLBN, pemerintah juga melakukan pengembangan infrastruktur permukiman yang meliputi 4 sektor yaitu, air minum, air limbah, sanitasi dan jalan lingkungan di kawasan sekitar PLBN (“Perbandingan PLBN Motaain yang Dulu dan Sekarang” 2016).

Pembangunan PLBN terpadu Motaain sendiri masih pada tahap I. Nantinya kawasan ini akan kembali dikembangkan hingga tanggal 5 Maret 2019 nanti, dengan luas lahan mencapai 4,62 ha dan biaya pelaksanaan sekitar Rp 228,9 miliar. Pembangunan yang dilaksanakan pada tahap II di antaranya tempat pencucian mobil, x-ray kargo, mess pegawai, wisma Indonesia, pasar perbatasan, lapangan olahraga, hingga pos pamtas TNI dan Polri.

Selain membangun kawasan pos lintas batas bagi keperluan administrasi dan pengawasan, pembangunan fasilitas bagi peningkatan perekonomian penduduk perbatasan pun dilakukan yaitu dengan membangun fasilitas bagi pasar rakyat. Dengan adanya pasar diharapkan akan lebih banyak orang Timor Leste yang datang ke Indonesia untuk berbelanja dan juga berwisata. Dengan demikian, ada lebih banyak pendapatan yang diperoleh oleh penduduk perbatasan. Jika pasar dapat berjalan dengan baik, ia mungkin saja dapat berkembang seperti halnya Serikin di Serawak dan Padang Besar di Perlis.

Gambar 3.10.  
Denah Pasar Rakyat pada PLBN Motaain



Sumber: [http://properti.kompas.com/read/2016/03/25/011034021/Pos. Lintas. Batas. Negara. Representasi. Langgam. Arsitektur. Lokal.](http://properti.kompas.com/read/2016/03/25/011034021/Pos.Lintas.Batas.Negara.Representasi.Langgam.Arsitektur.Lokal)

Pembangunan PLBN diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang peningkatan kedatangan warga Timor Leste ke Indonesia karena fasilitas yang disediakan lebih baik. Demikian pula dengan pelayanan dan kemudahan dalam kepengurusan dokumen. Pada Juli 2016, tercatat kedatangan dan keberangkatan belum naik cukup signifikan. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas II Atambua, jumlah kedatangan WNA yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Motaain pada Juli lalu mencapai 3.171 kedatangan, kemudian Agustus sebanyak 3.357, dan September sebanyak 3.525. Di TPI Motaain rata-rata 100-200 kedatangan per hari. Secara kebetulan, Pos Lintas Batas di Motaain sekaligus merupakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI. TPI adalah titik perlintasan yang dapat dilalui oleh setiap rang WNI/WNA yang memenuhi persyaratan umum untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan umum (paspor).

Gambar 3.11.  
Pembangunan Pasar Rakyat PLBN Motaain



Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-3466458/mengunjungi-plbn-motaain-yang-terus-bersolek-demi-wibawa-ri>.

Dengan demikian, Motaain termasuk dalam Pos Lintas Batas Negara tipe A. Pas Lintas Batas atau Border Crossing Pass diberikan secara cuma-cuma oleh petugas yang berhak mengeluarkannya di wilayah perbatasan Indonesia. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah warga negara Indonesia diatas 17 tahun atau sudah menikah. Ia merupakan penduduk asli wilayah yang berbatasan yang telah disebutkan dalam lampiran the Arrangement on Traditional Border Crossing and Regulated Markets Between the Government of the Democratic Republic of Timor Leste and the Government of the Republic of Indonesia, yaitu untuk Kabupaten Belu ada di Kecamatan Raihat, Lamaknen, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat dan Kobalima. Diperbolehkan masuk dengan tujuan yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan tradisional serta perdagangan tradisional. Setiap kali melintas, pelintas batas dapat tinggal di wilayah Distrik Bobonaro selama maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang 10 hari lagi dengan ijin dari petugas lintas batas. Sedangkan mereka, pelintas batas yang bertujuan untuk berdagang demi kebutuhan sehari-hari, diperbolehkan melintas batas dengan mempergunakan

Pas Lintas Batas. Dalam peraturan perdagangan tradisional, barang dagangan yang diperdagangkan pada kawasan perbatasan yang telah ditetapkan dibebaskan dari pajak. Nilai barang dagangan yang diperdagangkan pada setiap orang perhari adalah di bawah \$ 50 atau sekitar Rp. 500.000,-. Sementara mereka yang memperdagangkan hewan ternak tidak diperbolehkan membawa lebih dari 5 ternak berkaki empat setiap melintas per orang.

Selain fasilitas dan kemudahan dalam lintas batas dan pasar rakyat yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu, Croddborder Festival juga diselenggarakan untuk meningkatkan kedatangan wisatawan khususnya masyarakat Timor Leste ke Indonesia. Crossborder Festival yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) diharapkan bisa mempererat persaudaraan dan menarik kunjungan wisman khususnya dari Timor Leste. Crossborder festival telah diselenggarakan semenjak tahun 2016 dan diklaim berhasil meningkatkan kedatangan warga Timor Leste ke Indonesia melalui jalur darat (“Sasar Timor Leste, Kemenpar Gelar Festival Crossborder Atambua” 2016).

Tahun 2017 Crossborder Festival Atambua menampilkan pertunjukan musik, bazar, dan atraksi wisata lainnya dan digelar di tiga daerah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste, di antaranya Kabupaten Belu (Atambua), Kabupaten Malaka (Betun) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Kefamenanu- Tanjung Bastian). Crossborder Festival menjadi salah satu alat promosi efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari negara tetangga. Efektif karena langsung dapat dirasakan dan mudah dimonitor kedatangannya lewat pintu- pintumasuk lintasbatas. Dan, efisien karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk ke negeri tetangga dan tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk berpromosi di negara tetangga (“Festival Crossborder Atambua 2017 Sukses”. 2017).

Festival tersebut diselenggarakan di Lapangan Simpang Lima dan dihadiri oleh lebih dari 30.000 orang baik dari NTT juga Timor Leste. Dibuka dengan Tari Tebe dari Sanggar Tari SMA Negeri 3 Atambua. Festival ini juga mengundang band Coklat dan Jamrud dari Jakarta. Tarian Tebe merupakan tari tradisional dari Kabupaten Belu,

yang merupakan satu ungkapan kegembiraan atas keberhasilan atau kemenangan. Dalam tari ini, pria dan wanita bergandengan tangan sambil bernyanyi bersahutan melantunkan syair dan pantun yang berisi puji-pujian. Selain itu juga band lokal Atambua yang unjuk gigi sebelum Coklat dan Jamrud.

Selain menampilkan music dan tari-tarian, festival ini juga menarik sejumlah pedagang untuk ikut serta meramaikan acara. Selain perdagangan makanan, sejumlah perdagangan mainan dan asesori handpohne terlihat berada di seputar area festival. edagang itu, antara lain tukang jagung bakar, salome bakar, minuman-minuman ringan, mainan anak, bahkan pedagang aksesoris *handphone* turut antusias menjajakan dagangannya.

## Kesimpulan

Pariwisata sebagai salah satu jembatan bagi kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pondasi budaya atau alam saja. Pada pariwisata perbatasan, koneksi atau hubungan sosial dan ekonomi memberikan peluang alternative bagi penyelenggaraan pariwisata. Wsiata perbatasan tidak hanya dapat dibangun di atas pndasi budaya atau alam saja melainkan juga ekonomi melalui pasar perbatasan. Seperti halnya Serikin dan Padang Besar, perbatasan Indonesia Timor Leste di Belu dapat dibangun tidak saja melalui alamnya tetapi juga pasar perbatasan.

Di Belu, selain dapat dikembangkan wisata alam yang masih sangat alami juga dapat ditumbuhkan wisata budaya yang telah dirintis melalui Crossborder Festival. Tidak tertutup kemungkinan dapat dikembangkan pula Festival kuliner dan juga kain tenun khas Nusa Tenggara Timur. Festival-festival semacam ini sangat mudah menarik orang untuk datang berkunjung dimana peningkatan kunjungan juga dapat mendorong jenis kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan.

Selain itu, pengembangan pasar rakyat di perbatasan atau pasar tradisional lintas batas juga dapat menjadi alternative wisata lain dimana wisata belanja telah menjadi tren di beberapa tempat. Selain kemudahan dokumen dan akses masuk serta fasilitas transportasi, kekhasan barang-barang perlu digali dan dikembangkan agar menjasi



daya tarik baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri khususnya Timor Leste. Perlu perhatian lebih bagi pengembangan kawasan wisata perbatasan, karena ia tidak hanya membutuhkan dana yang besar tetapi juga kesadaran masyarakat atas potensi yang dimiliki dan kemauan dalam ikut menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini.

## Referensi

- Azmi, Azila et.all. (2015). "Shopping Tourism and Trading Activities at the Border Town of Malaysia-Thailand : A Case Study in Padang Besar" . *International Academic Research Journal of Social Science* 1(2) 2015 Page 83-88.
- Boedeker, M (1995). "New-type and Traditional Shoppers: a Comparison of Two Major Consumer Groups". *International Journal of Retail & Distribution Management*, 23 (3), 17-27.
- Gelbman, A., and Timothy, D, J. (2011). "Border Complexity, Tourism, and International Exclaves, a Case Study". *Annals of Tourism Research*. 38(1):110-131
- Hariyadi, "Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (RI) – Timor Leste (RDTL) dalam Perspektif Kebijakan Publik", dalam *Kajian* Vol. 13, No. 3, September 2008, <http://www.dpr.go.id/kajian/Pengelolaan-Perbatasan-Indonesia---Timor-Leste-dalam-Perspektif-Kebijakan-Publik-2008.pdf>
- Loe, Alexander . Tanpa Tahun. "Sejarah Terbentuknya Rumah Adat Kwar". <https://www.scribd.com/doc/145721612/Sejarah-Terbentuknya-Rumah-Adat-Kwar>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- Lumpkin, J., Hawes, J., & Darden, W. (1986). "Shopping Patterns of The Rural Consumer: Exploring the Relationship Between Shopping Orientation and Outshopping. *Journal of Business Research*, 14(1), 63-81.
- Morrison, et al. (2005). "The Local Destination Tourism Network: Development Issues". *Tourism and Hospitality Planning & Deveopment*. (2)2:87-99.

- Nijkamp, P. (2000). "Tourism, Marketing, and Telecommunication: A Road towards Regional Development". dalam Fossati, A, and Panella, G. (Eds), *Tourism and Sustainable Economic Development*. Springer, US. pp 37-55 (2000).
- Papadopoulos, N. G. (1980). "Consumer Outshopping Research: Review and Extention". *Journal of Retailing*, 56(4), 41-58.
- Rachmawati, Iva dan Fauzan. 2013. Model Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste Melalui Optimalisasi Fungsi Pos Lintas Batas (PLB) di abupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Penelitian Hibah Bersaing Dirjend. Dikti. 2013. Tidak dipublikasikan.
- Weidenfeld, A. (2013). "Tourism and Cross Border Regional Innovation System". *Annals of Tourism Research*. Vol. xx, No. xx, 191- 213.
- Tanpa Tahun. "History of Timor". [http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History\\_of\\_Timor.pdf](http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf). Diunduh 17 Agustus 2017.
- Tanpa Tahun. "Pantai Atapupu, Wisata Pasir Putih di Atambua". <https://merahputih.com/post/read/pantai-atapupu-wisata-pasir-putih-di-atambua>. Diunduh 17 Agustus 2017..
- Tanpa Tahun. "Perindustrian, Energi dan Pertambangan". <http://belukab.go.id/perindustrian-energi-pertambangan/>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- Tanpa Tahun "Kolam Susuk Cantiknya Pemandangan Alam di Nusa Tenggara Timur". <https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/nusa-tenggara-timur/kolam-susuk-cantiknya-pemandangan-alam-di-nusa-tenggara-timur.html>. Diunduh 17 Agustus 2017
- , 2006. "Timor Leste: Penembak Tiga WNI Hanya Bela Diri". *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/72114/timor-leste-penembak-tiga-wni-hanya-bela-diri>. Diunduh 17 Agustus 2017.

- , 2010. “Belu Juara Fashion Masa Lampau”. Pos Kupang. <http://kupang.tribunnews.com/2010/10/13/belu-juara-fashion-masa-lampau>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2010. “Pasar Perbatasan dengan Timor Leste Terbengkalai”. Kompas.Com. <http://nasional.kompas.com/read/2010/07/24/17473857/Pasar.Perbatasan.dengan.Timor.Leste.Terbengkalai>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2012. “Pengembangan Pariwisata pPrbatasan di Belu perlu Rp50 miliar”. <http://www.antaraneews.com/berita/318802/pengembangan-pariwisata-perbatasan-di-belu-perlu-rp50-miliar>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2013. “Pasar Tradisional di Perbatasan Silawan dibuka Kembali”. <http://www.beritanda.com/nusantara/nusa-tenggara-timur/15553-pasar-tradisional-perbatasan-silawan-kembali-beroperasi.html>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2014. “Data Objek Wisata Unggulan”. <https://floridaissa.wordpress.com/2014/11/26/data-objek-wisata-unggulan/>. Diunduh 17 Agustus 2017
- , 2015. “Pos Lintas Batas Negara di NTT Mulai Dibangun”. <http://kabar24.bisnis.com/read/20151105/15/489378/pos-lintas-batas-negara-di-ntt-mulai-dibangun>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2016. “Perkembangan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara RI-Timor Leste di Motaain“. <http://www.bnpp.go.id/index.php/berita/item/284-perkembangan-pembangunan-pos-lintas-batas-negara-ri-timor-leste-di-motaain>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2016. “Perbandingan PLBN Motaain yang Dulu dan Sekarang”. <https://kumparan.com/yudhistira-amran-saleh/perbandingan-plbn-motaain-yang-dulu-dan-sekarang>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2016. “Pos Lintas Batas Negara, Representasi Langgam Arsitektur Lokal” <http://properti.kompas.com/read/2016/03/25/011034021/Pos.Lintas.Batas.Negara>.

Representasi.Langgam.Arsitektur.Lokal. Diunduh 17 Agustus 2017.

- , 2016. "Sasar Timor Leste, Kemenpar Gelar Festival Crossborder Atambua". <http://lifestyle.liputan6.com/read/2664619/sasar-timor-leste-kemenpar-gelar-festival-crossborder-atambua>. Diunduh 17 Agustus 2017.
- , 2017. "Festival Crossborder Atambua 2017 Sukses". <http://www.viva.co.id/berita/nasional/951615-festival-crossborder-atambua-2017-sukses>.
- , 2017. "Mengunjungi PLBN Motaain yang Terus Bersolek demi Wibawa RI". <https://news.detik.com/berita/d-3466458/mengunjungi-plbn-motaain-yang-terus-bersolek-demi-wibawari>. Diunduh 17 Agustus 2017



## Bab. 4

# Potensi Wisata Perbatasan Merauke, Papua

*Machya Astuti Dewi*

Pengelolaan daerah perbatasan di Indonesia telah mengalami pergeseran yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah mengubah pendekatan keamanan ke pendekatan sosial ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat perbatasan. Hal itu terlihat dari dimasukkannya kawasan perbatasan sebagai salah satu Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dan 2010–2014. Pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan melalui dua pendekatan. *Pertama*, melalui pendekatan keamanan untuk menjaga kedaulatan bangsa. *Kedua*, melalui pendekatan kesejahteraan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Pergeseran ke arah pendekatan sosial ekonomi juga nampak dalam pengembangan kawasan perbatasan di Merauke. Kabupaten yang dikenal sebagai kota paling timur di wilayah NKRI ini berbatasan dengan negara Papua Nugini (PNG). Gambaran mengenai Papua yang terpencil dan tidak aman perlahan-lahan bergeser ke realita adanya kekayaan alam dan budaya sebagai menjadi asset yang memiliki nilai jual untuk menyejahterakan masyarakat. Upadhyay & Chettri (tanpa tahun) mengemukakan bahwa kekayaan alam, kekekaragaman hayati, dan keragaman budaya menjadi modal penting untuk membangun pariwisata di daerah perbatasan yang pada gilirannya mampu mengangkat perekonomian masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini akan membentuk proyek wisata perbatasan yang pro rakyat miskin (*pro poor tourism*).

Saat ini distrik Sota di Merauke yang merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan PNG memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata perbatasan, terutama ekowisata. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai profil

daerah perbatasan di Merauke, khususnya Sota dan mengeksplorasi potensi-potensi wisata perbatasan yang bisa dikembangkan di Sota, Merauke, beserta kendala-kendala yang dihadapi.

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Merauke**

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang terletak di bagian selatan dengan wilayah terluas di antara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sebelum pemekaran kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 119.749 km<sup>2</sup> (29% dari luas wilayah Provinsi Papua). Namun setelah pemekaran Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 45.071 km<sup>2</sup>. Kabupaten Merauke memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.
- Di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea.
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru (negara Australia).
- Di sebelah barat dengan Laut Arafura.

Secara geografis posisi kabupaten Merauke terbentang antara 137<sup>o</sup>-141<sup>o</sup> Bujur Timur dan 5<sup>o</sup>-9<sup>o</sup> Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Merauke memiliki luas 46.790,63 km<sup>2</sup> atau 14,67 persen dari luas wilayah provinsi Papua dan merupakan kabupaten terluas di provinsi Papua. Jumlah distrik mencakup 20 distrik, dengan distrik Waan merupakan distrik terluas, yaitu dengan luas 5.416,84 km<sup>2</sup> dan distrik Semangga merupakan distrik terkecil dengan luas wilayah 326,95 km<sup>2</sup> atau hanya 0,01 persen dari luas wilayah kabupaten Merauke (Merauke dalam Angka, 2012).

Kabupaten Merauke bersama 8 (delapan) kabupaten otonom lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12/1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Saat itu Kabupaten Merauke meliputi: Merauke, Tanah Merah, Minidana, Agats, dan mapi/Kepi. Namun pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 26/2002, wilayah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 4 (empat) kabupaten, yaitu: Meruake (kabupaten induk), Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Kabupaten

Merauke sendiri setelah pemekaran wilayah pada tahun 2002 terdiri dari 5 (lima) distrik. Menyusul Peraturan daerah Kabupaten Merauke No. 5/2002 tanggal 14 Desember 2002, wilayah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 11 (sebelas) distrik, yaitu:

1. Distrik Merauke
2. Distrik Semangga
3. Distrik Tanah Miring
4. Distrik Kurik
5. Distrik Jagebob
6. Distrik Sota
7. Distrik Muting
8. Distrik Elikobel
9. Distrik Ulilin
10. Distrik Okaba
11. Distrik Kimaam

Kemudian pada tahun 2006 dilakukan lagi pemekaran distrik dari 11 distrik menjadi 20 distrik. Empat distrik yang dimekarkan adalah Distrik Kimaam, Distrik Okaba, Distrik Kurik, dan Distrik Merauke. Dasar hukum pemekaran tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomer 2 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang pembentukan Distrik Naukenjeri, Distrik Animha, Distrik Malind, Distrik Tubang, Distrik Ngguti, Distrik Kaptel, Distrik Tanjobi, Distrik Waan, dan Distrik Ilwayab. Dengan dilakukannya pemekaran kedua kalinya maka Kabupaten Merauke saat ini terdiri dari 20 distrik dan 160 kampung.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke terdiri dari dataran rendah dan berawa serta dataran tinggi di beberapa Distrik di bagian utara. Keadaan topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa di sepanjang pantai selatan Merauke dengan kemiringan 0-3%, semakin ke utara bergelombang dan berbukit dengan kemiringan 3-8% serta memiliki ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut.

Daerah bergelombang dan berbukit berada di wilayah distrik Elikobel, Muting dan Ulilin. Perbedaan musim di Kabupaten Merauke antara musim hujan dan musim kemarau sangat tegas. Musim hujan



terjadi sekitar 5 bulan (Desember-April) sedangkan musim kemarau terjadi sekitar 7 bulan (Mei-November). Curah hujan yang terjadi rata-rata 1.200-1.500 mm/tahun, rata-rata hari hujan 90-120 hari/tahun sedangkan suhu rata-rata 25-30 C.

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke tahun 2012 menurut pendataan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 246.8522 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 130.852 jiwa dan perempuan mencapai 116.338 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga tercatat sebanyak 60.406 KK. Penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke yang jumlahnya mencapai 115.359 jiwa. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Distrik Kaptel dengan penduduk sebanyak 1.833 jiwa. Jumlah tersebut pada tahun 2015 berkurang menjadi 216.585 orang. Kepadatan penduduk tercatat 4,63 orang/m. Sementara Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,45 persen per tahun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk pada tahun 2010, 2014 dan 2015.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Merauke Tahun 2010,2014, dan 2015

	Kecamatan 2010	Jumlah Penduduk		
		2014	2015	
1	Kimaam	5.659	6.214	6.321
2	Waan	4.403	4.801	4.878
3	Tabonji	4.989	5.487	5.583
4	Ilwayab	4.989	5.482	5.577
5	Okaba	4.794	5.231	5.316
6	Tubang	2.190	2.399	2.439
7	Ngguti	1.834	2.006	2.039
8	Kaptel	1.697	1.861	1.893
9	Kurik	13.261	14.268	14.459
10	Animha	1.899	2.083	2.119
11	Malind	8.822	9.530	9.665
12	Merauke	88.342	95.564	96.951

13	Naukenjerai	1.846	2.010	2.041
14	Semangga	12.911	13.878	14.061
15	Tanah Miring	16.896	18.183	18.428
16	Jagebob	6.993	7.496	7.591
17	Sota	2.856	3.113	3.163
18	Muting	5.075	5.467	5.542
19	Elikobel	3.775	4.053	4.106
20	Ulilin	4.070	4.358	4.413
Jumlah Total		197.301	213.484	216.585

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Merauke 2010-2035

Wilayah Merauke memiliki keunikan. Semakin ke timur semakin dinamis, maju, makmur, dan lebih unggul investasi daripada wilayah bagian barat. Namun demikian, pertumbuhan kota Merauke sebagai ibukota kabupaten Merauke, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan penduduk, simpul transportasi, dan lain sebagainya mengalami hambatan karena degradasi lingkungan dan sumber daya alam (Samkakai, Hollenger, & Ndiken, 2013).

## 4.2. Potensi Budaya dan Pariwisata

Merauke memiliki potensi wisata yang beragam dan siap untuk dikembangkan. Data perkembangan wisatawan di Merauke pada tahun 2015 terdapat 26.634 wisatawan yang datang ke Merauke. Sebanyak 23.389 wisatawan adalah wisatawan nusantara, sedangkan 645 adalah wisatawan mancanegara. Meskipun masih sangat minim pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Merauke, namun potensi pengembangannya tidak kalah menarik dengan daerah lain di Papua. Tabel berikut menunjukkan potensi wisata yang dimiliki oleh kabupaten Merauke.

Tabel 4.2

Obyek Wisata, Lokasi dan Jenis Wisata di Kabupaten Merauke Tahun 2015

No	Tempat/ Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Pantai Urum	Distrik Semangga	Wisata Alam
2	Pantai Matara	Distrik Semangga	Wisata Alam
3	Pantai Wendu	Distrik Semangga	Wisata Alam
4	Pantai Wambi	Distrik Okaba	Wisata Alam
5	Pantai Mbuti	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
6	Pantai Lampu Satu	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
7	Pantai Kaiburse	Distrik Malind	Wisata Alam
8	Pantai Ndalir	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
9	Pantai Onggaya	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
10	Pantai Payum	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
11	Rumah Semut	Kampung Wasur	Wisata Alam
12	Suaka Marga Satwa Pulau Dolak	Distrik Kimaam	Wisata Alam
13	Suaka Marga Satwa Sungai Bian	Distrik Okaba	Wisata Alam
14	Cagar Alam Kumbe	Distrik Malind	Wisata Alam
15	Pulau Habe	Distrik Okaba	Wisata Alam
16	Pulau Pombo	Distrik Kimaam	Wisata Alam
17	Taman Nasional Wasur	Kampung Wasur	Wisata Alam
18	Agro Wisata Sota	Distrik Sota	Wisata Alam
19	Kebun Buah-buahan	Distrik Jagebob	Wisata Alam
20	Pemandian & Pemancingan Biras	Kampung Wasur	Wisata Buatan
21	Pemandian & Pemancingan Kolam Parako	Kampung Wasur	Wisata Buatan

No	Tempat/ Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
22	Pemandian Air Panas & Air Belerang (Sumur Bor)	Jl. Yos Sudarso	Wisata Buatan
23	Tugu Sabang Merauke & Tugu Tapal Batas	Distrik Sota	Wisata Sejarah
24	Tugu Pepera	Distrik Merauke	Wisata Alam
25	Tugu L.B. Murdani	Distrik Tanah Miring	Wisata Sejarah
26	Bangunan Kantor Pos Lama	Jln. Sabang	Wisata Sejarah
27	Bangunan Ex Resident Van Cruysent	Jln. Sabang	Wisata Sejarah
28	Patung Petrus Vertenten	Distrik Okaba	Wisata Sejarah
29	Patung Kristus Raja	Distrik Merauke	Wisata Rohani
30	Patung Kristus Raja	Distrik Jagebob	Wisata Rohani
31	Patung Kristus Raja	Distrik Okaba, Pulau Haba	Wisata Rohani
32	Taman Salib Sota	Distrik Sota	Wisata Rohani
33	Masjid Nurul Huda di Spadem	Jln. Spadem	Wisata Rohani

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke

Tabel 4.3  
Tempat-Tempat Bersejarah di Kabupaten Merauke

No	Tempat/ Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Bangunan Kantor Pos Lama 1920	Distrik Semangga	Wisata Alam
2	Bangunan Ex Residen Van Cruysent	Distrik Semangga	Wisata Alam
3	Masjid Nurul Huda Spadem	Distrik Semangga	Wisata Alam
4	Gereja Peniel Lama	Distrik Okaba	Wisata Alam
5	Gereja Katedral Lama/ Vartenten Sai	Kelurahan Samkat	Wisata Alam

No	Tempat/ Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
6	Kuburan Tua Jaman Belanda	Kelurahan Samkai	Wisata Alam
7	Kuburan Trionghoa	Distrik Malind	Wisata Alam
8	Kuping Gajah	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
9	Museum Felix Maturbong	Distrik Naukenjerai	Wisata Alam
10	Museum Misi Katolik	Kelurahan Samkai	Wisata Alam

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke

Potensi wisata yang tidak kalah menarik adalah ragam budaya masyarakat Merauke. Aneka tradisi, adat istiadat, kebiasaan, tari-tarian dan makanan khas suku-suku di Merauke menjadi kekayaan budaya yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Salah satu di antaranya adalah festival Ndambu. Festival ini dikembangkan dari kebiasaan masyarakat adat sub suku Khima-Khima, yaitu sebutan untuk masyarakat yang mendiami Pulau Kimaam. Di pulau ini terdapat masyarakat yang tersebar di empat distrik yaitu: Kimaam, Tabonji, Waan, dan Iwalyab yang selalu melaksanakan pesta ndambu di Pulau Kimaam sebagai Pesta kompetisi hasil panen yang dilaksanakan atas dasar persaingan untuk mempertahankan dan memposisikan diri sebagai manusia yang unggul dalam bekerja (prestasi) serta memiliki harkat dan martabat yang luhur (prestise). Festival ini diadakan pada Bulan Agustus di Distrik Kimaam (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke, 2016).

Kata *ndambu* berarti bersaing sehat. Ratusan tahun lalu, ndambu diadakan untuk mencairkan perselisihan antar kampung dan marga ataupun antardistrik di Pulau Kimaam. Posesi diawali dari adanya masalah, kemudian pihak yang berkonflik memegang tiang pagar masing-masing yang bermasalah dan saling ndambu dalam kurun waktu tertentu. Hingga saat panen tiba mereka saling menunjukkan hasil pertaniannya. Di sini akan muncul pemenangnya, sementara pihak yang kalah dapat kembali bekerja untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih banyak dan lebih baik dari lawannya. Hal ini dapat terjadi terus menerus sampai masalah dapat diselesaikan oleh

tetua adat. Jadi, *ndambu* adalah tradisi yang melahirkan semangat untuk bekerja keras, sehingga meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian. Selain itu *ndambu* adalah cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan sehingga terhindar dari perang etnis atau antar marga. Oleh karenanya *ndambu* sarat dengan filosofi kearifan lokal, yaitu bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, sekaligus menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Dalam festival *ndambu* ditampilkan hasil panen yang terbaik, seperti umbi-umbian, kelapa, pisang, dan wati. Selain itu ada banyak perlombaan yang digelar, mulai dari lomba dayung perahu satu kaki, gulat tradisional (gulat bob), tusuk telinga serta beberapa kegiatan unik lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ditampilkan juga tari tradisional, lomba panahan dan lomba anyaman rambut yang diikuti oleh masyarakat umum.

Potensi budaya yang tidak kalah menarik adalah makanan tradisional sagu sep. Sagu Sep adalah makanan khas suku Marind yang dibuat dari sagu yang dicampur dengan kelapa dan daging/ ikan yang dimasak dengan cara diletakkan di atas bara batu yang ditutupi dengan dedaunan dan kulit kayu bus. Uap panas yang tertutup dedaunan dan kulit kayu bus menyebabkan makanan menjadi masak. Sagu Sep memiliki nama yang berbeda seiring dengan bahan campurannya, misalnya:

- a. Kumobo (sagu yang dicampur dengan kelapa dan daging).
- b. Wanggilamo (sagu yang dicampur dengan daging yang sudah dipanggang).
- c. Nggalamo (sagu yang dicampur dengan kelapa dan daging yang dipotong-potong besar-besar).
- d. Kaka (sagu yang dicampur dengan kelapa, daging dan ditambah dengan santan).
- e. Siu (sagu yang dicampur dengan pisang).

Potensi wisata dalam bentuk tarian-tarian antara lain dapat disaksikan dari pertunjukan tari Ngatsi. Tari Ngatsi adalah tarian umum dari suku Marind yang menggambarkan bahwa orang Marind selalu patuh pada budayanya meskipun zaman sudah berubah modern. Tarian ini ditampilkan pada acara-acara adat, misalnya pesta inisiasi

anak, upacara Tanam Sasi, pesta babi pada acara penyerahan tanah adat, dan pesta 'Kaka' untuk membalas budi pada orang yang berjasa.

### 4.3. Profil Perbatasan di Distrik Sota, Merauke

Salah satu keunikan Merauke adalah posisinya sebagai wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus memiliki wilayah perbatasan dengan negara Papua Nugini (PNG). Merauke dan Papua Nugini memiliki perbatasan yang terbentang dari Kota Merauke sampai dengan Distrik Waropko sepanjang 550 km dan meliputi 4 distrik, yaitu Merauke, Muting, Mindiptana dan Waropko. Kawasan perbatasan di area tersebut relatif bersifat tradisional. Jumlah dan kondisi tugu-tugu perbatasan kurang memadai. Ada jalan tikus yang menghubungkan beberapa wilayah antara Merauke dan PNG dan kondisi ini sulit dimonitor. Sementara itu mengacu pada kesepakatan pos perbatasan yang ditunjuk maka Indonesia dan PNG memiliki perbatasan di Merauke di kawasan-kawasan sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Pos Perbatasan Indonesia-PNG

Indonesia	PNG
Bupul	Lake Murray
Bupul	Aiambak
Erambu	Nakaku
Sota	Morehead
Sota	Weam
Kondo	Balamuk

Sumber: Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom. Tanpa Tahun. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Pengaturan Khusus Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan 1993.*

Meskipun terdapat beberapa pos perbatasan, namun secara keseluruhan hanya Sota yang cukup terkelola dengan baik, meskipun akses jalan di perbatasan Sota menuju PNG belum memadai, karena jalan menuju desa terdekat di PNG seperti Weam, Morehead dan

Wereaber merupakan jalan tanah yang sangat becek ketika musim hujan. Para pelintas batas pun harus melewati 2 sungai di musim kering dan 3 sungai di musim penghujan.

Sota memiliki infrastruktur perbatasan yang jauh lebih baik dibandingkan daerah perbatasan lainnya di Merauke yang ditandai dengan jalan beraspal (di wilayah Republik Indonesia) yang cukup baik juga serta volume lalu lintas perbatasan yang cukup banyak tiap bulannya. Sebagai perbandingan adalah wilayah perbatasan di Kondo yang sangat sulit dijangkau di waktu musim hujan. Di wilayah ini aktivitas di perbatasan dengan warga PNG kebanyakan dilakukan melalui laut.

Secara geografis distrik Sota terletak di ujung timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Wilayah ini terletak di 7°45'00"-8°50'04" LS dan 140°41'04"-141°12'00" BT. Luas daerah Distrik Sota 2.319.071 km<sup>2</sup> (5,06% dari luas wilayah kabupaten Merauke). Batas-batas fisik dataran dan sungai di distrik Sota adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan distrik Eligobel
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan distrik Nokenjere
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan sungai Maro distrik Jagebob
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Torasi negara PNG.

Keadaan Topografi di distrik Sota mulai dari sepanjang pesisir pantai sampai daerah pedalaman terdapat dataran rendah yang berawa dan banyak dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil serta tertutup oleh hutan lebat yang semakin ke utara semakin lebat. Keadaan Topografi Distrik Sota yang demikian ini kurang menguntungkan dan sangat menyulitkan bagi pengelolaan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu keadaan tanah di distrik Sota pada umumnya kurang baik karena bukan merupakan tanah TUF/tanah hasil endapan letusan gunung api, sehingga kesuburan tanahnya hanya pada lapisan tanah yang berasal dari tumbuhan/ daun-daun yang jatuh dan melalui proses alam menjadi humus. Distrik Sota termasuk daerah depresi



“Digul Fly“, seluruh wilayah berisikan daerah transmigrasi dan regrasi dengan kemiringan tanah di kota Merauke sebesar 0 s/d 3 %.

Sungai-sungai yang berada di wilayah distrik Sota pada umumnya mengalir dari anak sungai Maro ke sungai Wanggo, kepala sungai Torasi hingga ke bagian selatan ke laut Arafura,. Sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, karena menjadi tempat penangkapan ikan ataupun buaya dan sekaligus merupakan sarana utama transportasi dari kampung ke kampung atau dari kampung yang ada di distrik Sota ke kampung yang ada di wilayah negara Papua Nugini.

Topografi Sota yang terdiri dari daratan rendah yang rawa-rawa sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, yaitu sebagai tempat menangkap ikan dan juga terdapat buaya di dalamnya yang dapat diburu untuk kepentingan hidup masyarakat. Kulit buaya dapat dijual untuk bahan kerajinan tangan, sementara dagingnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Di wilayah distrik Sota terdapat rawa besar yang merupakan satu-satunya sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat ibukota Merauke yang letaknya 60 km dari kota Merauke. Sumber air bersih tersebut terdapat di kampung Rawa Biru.

Daerah distrik Sota beriklim tropis dengan musim kemarau lebih panjang dari pada musim hujan yang biasanya berlangsung setiap tahun antara bulan Mei sampai bulan November, sedangkan bulan Desember sampai bulan April musim hujan. Letak distrik Sota berdekatan dengan benua Australia sehingga iklimnya sering dipengaruhi oleh iklim yang berada di benua Australia dengan temperatur 26,7° Celsius ( musim dingin di Australia ) dan kelembaban 79%, suhu rata-rata siang hari 28° Celsius sampai 30° Celsius minimum 24° Celsius dan suhu rata-rata malam hari 5° Celsius, temperatur minimum 22° Celsius.

Keadaan Flora di Distrik Sota bersifat heterogen dan 75% dari luas distrik Sota masih merupakan hutan yang masuk dalam kawasan hutan lindung oleh WWF. Hutan ini banyak ditumbuhi oleh beraneka ragam jenis tanaman seperti: keluarga anggrek dan pohon-pohon lainnya antara lain: podocarpus, terenilia, octomeles, instansia, mimisops, acasia, mandos, tauna, delenia, vatica dan lain-lain, dari luas hutan yang ada dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Hutan suaka alam dan pelestarian alam: 1.482.789 Ha.
- Hutan lindung ( hutan PHPA ) seluas: 278.337 Ha.
- Hutan produksi yang dapat dikonversi: 1.428,856 Ha.

Sementara itu keadaan fauna di wilayah distrik Sota pada umumnya terdiri dari binatang-binatang buas yang membahayakan manusia, di antaranya adalah:

- Berbagai jenis burung seperti burung cenderawasih, kakak tua raja, kakak tua putih, kasuwari, nuri dan lain-lain.
- Berbagai jenis reptil seperti buaya, kadal, penyu, kura-kura, ular, serta biawak hitam.
- Berbagai jenis binatang melata seperti ular piton, ular sawah, ular kaki empat, dan jenis ular lainnya.
- Berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, bulanak, arwana, bambit, gabus dan sebagainya.
- Berbagai jenis binatang mamalia seperti kambing, sapi, kuda, rusa, dan babi hutan.
- Berbagai jenis binatang berkantung seperti kuskus dan kanguru.

Dari jenis binatang tersebut banyak binatang yang dilindungi undang-undang untuk menjaga kelestariannya, terutama jenis binatang spesifik seperti burung cenderawasih, kasuari, nuri, kakak tua, kanguru dan kuskus.

Dalam bidang pertanian distrik Sota masih dalam taraf peningkatan sumber daya manusia, sehingga belum mampu bertani dengan baik. Padahal distrik ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lokasi yang bisa dijadikan lahan pertanian yang sangat luas dan belum diolah. Data Tahun 2016 menunjukkan beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan di Sota, Merauke antara lain kubis, cabe, kacang panjang, padi dan umbi-umbian. Produksi hasil pertanian bisa dimaksimalkan mengingat potensi Merauke sebagai lumbung padi untuk wilayah Indonesia bagian timur. Beberapa komoditas utama di bidang pertanian di Sota bisa dilihat pada tabel 4.6. Produksi tanaman pangan tersebut telah bisa meningkatkan tarap hidup masyarakat/khususnya para petani yang mana hasil produksi pertanian mereka dipasarkan di pasar Baru Mopah Merauke.

Tabel 4.5  
Komoditas Pertanian di Sota, Merauke Tahun 2016

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)
01	Kubis	17 Ha
02	Cabe	15 Ha
03	Kacang Panjang	0,5 Ha
04	Padi	2,5 Ha
05	Ubi Jalar	3 Ha
06	Jagung	2 Ha
07	Kacang Tanah	1 Ha
08	Kacang Buncis	0,5 Ha
09	Nenas	0,5 Ha
10	Kool	1 Ha

Sumber: Gapoktan Distrik Sota, 2016.

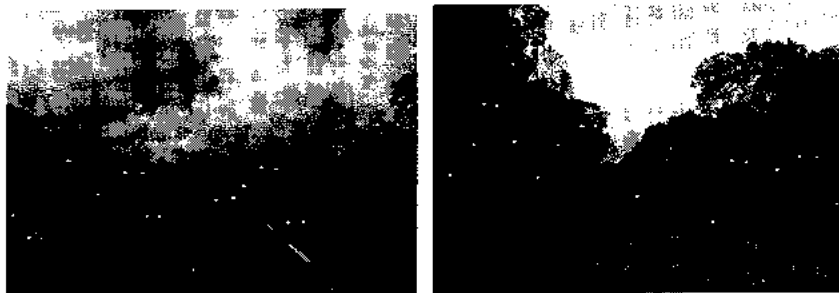
Peternakan di wilayah Sota kurang menunjukkan prospek yang baik. Hewan yang dibudidayakan selama ini antara lain: sapi, babi, kambing, kuda. Sementara itu unggas (ayam dan bebek/itik) tidak dapat dikembangkan secara baik karena kurangnya pengetahuan masyarakat serta tidak adanya dukungan anggaran yang memadai. Pemasaran hasil peternakan unggas sangat jarang, sehingga masyarakat transmigrasi cenderung lebih memilih bertani atau berkebun di lahan. Sedangkan masyarakat pribumi atau lokal cenderung memilih berhutan dan berburu binatang buruan untuk dijual di Sota atau dibawa ke kota Merauke untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam aspek perhubungan dan transportasi, beberapa lokasi di Sota masih minim fasilitas. Jaringan perhubungan darat masih sangat terbatas. Jalan darat yang sudah ada baru menjangkau lokasi antara distrik Sota-Bupul-Muting, Sota-Jagebob dan Sota-Merauke. Namun masih ada kendala pada jalan untuk masuk ke kampung-kampung karena belum dibuat jalan atau jalan rusak, tapi belum ada perbaikan. Salah satu contoh adalah jalan masuk kampung yang ada di salah satu

wilayah distrik Sota yaitu kampung Rawabiru yang apabila musim penghujan sangat sulit dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan enam karena luapan air rawa yang ada di kanan kiri jalan sehingga jalan digenangi air serta tanah dan berlumpur. Untuk Kampung Toray belum dilaksanakan perbaikan jembatan gantung yang dipisahkan oleh anakan sungai Maro, sehingga para penyeberang kampung Erambu-Toray harus lebih berhati-hati apabila musim penghujan karena jembatan yang ada sudah rusak dan papan jembatan yang hanya tinggal beberapa lembar juga licin untuk dilalui kendaraan roda dua, empat dan enam.

Gambar 4.1

Kondisi Jalan Menuju Perbatasan di Sota



Sumber: Dokumen Pribadi, 2013.

Sementara itu di bidang perindustrian mayoritas usaha industri di distrik Sota masih dalam tingkat industri kecil rumah tangga yang belum dapat menyerap banyak tenaga kerja. Adapun industri kecil rumah tangga yang ada berupa pengolahan minyak kayu putih dan pembuatan obat buah merah yang masih dilakukan secara manual dan tradisional serta pengolahan ubi jalar menjadi tepung.

#### 4.4. Potensi Pariwisata di Sota

Di tengah-tengah keterbatasan sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia, distrik Sota memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, khususnya wisata perbatasan. Dari aspek geografis, Sota amatlah unik karena terletak di kawasan paling

timur Indonesia dan berbatasan dengan negara PNG. Sota juga kaya dengan hasil bumi dan pertanian, di samping kekayaan alam dari hasil hutan. Dari aspek budaya Sota memiliki ragam seni budaya yang bisa dipromosikan untuk menarik animo wisatawan datang berkunjung. Kekayaan alam dan keunikan Sota menjadi asset yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Dari kondisi eksisting, ada beberapa potensi wisata perbatasan yang dapat dikembangkan di Sota, Merauke. Berikut potensi yang dapat dikembangkan di perbatasan Merauke.

#### 4.4.1. Pasar Perbatasan

Posisi Sota sebagai distrik transit bagi travel menuju distrik Munting berdampak positif dari aspek ekonomi. Pasar Sota merupakan salah satu titik pemberhentian bagi travel dan sarana transportasi pengangkut sembako dari Merauke ke distrik Munting dan distrik lainnya. Di pasar Sota terjadi proses transfer barang-barang kebutuhan sehari-hari, akomodasi, pembelian sembako dan berbagai aktivitas lain yang berpengaruh nyata terhadap meningkatnya kapasitas pasar dan volume penjualan hasil-hasil pertanian di distrik Sota.

Pasar yang saat ini menjadi sentra aktivitas ekonomi warga Sota terletak sekitar 300 meter dari Pos Lintas Batas. Di pasar ini juga tersedia *money changer* bagi kebutuhan perdagangan lintas batas. Pasar ini juga berdekatan dengan perlintasan bagi warga yang transit untuk makan dan mengisi bahan bakar ketika mereka hendak pergi ke distrik di sebelah utara Sota seperti Bupul, Muting, Elikobel dan lain-lain, bahkan Boven Digul dan Pegunungan Bintang.

Aktivitas ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan warga Indonesia, tetapi juga warga PNG yang berbelanja kebutuhan pokok di Sota. Para pelintas batas yang ada di perbatasan Sota kebanyakan merupakan warga lokal yang berasal dari distrik di PNG, yaitu Weam, Morehead dan Wereaber. Aktivitas mereka sangat beragam, namun didominasi oleh aktivitas sosial dan

ekonomi. Tabel 4.6 menunjukkan jumlah pelintas batas dari dari warga negara Indonesia dan PNG selama bulan Januari hingga Agustus 2016.

**Tabel 4.6**  
**Data Jumlah Pelintas Batas Tradisional**  
**Pos Imigrasi Perbatasan Sota, Merauke Tahun 2016**

No	Bulan	WNI						PNG					
		Berangkat			Tiba			Berangkat			Tiba		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	Januari	18	03	21	18	03	21	455	9	474	455	9	474
2	Februari	10	02	12	10	02	12	349	29	378	349	29	378
3	Maret	25	08	22	25	08	33	325	32	357	325	32	357
4	April	41	20	61	41	20	61	267	44	311	267	44	311
5	Mei	15	06	21	15	06	21	225	13	238	225	13	238
6	Juni	21	12	33	21	12	33	315	08	323	315	08	323
7	Juli	27	51	78	27	51	78	160	17	207	160	17	207
8	Agustus	19	14	33	19	14	33	1130	339	1469	1130	339	1469

Sumber: Data Pos Imigrasi Perbatasan Sota, Merauke, 2017

Setidaknya ada dua kepentingan utama yang mendorong warga PNG datang ke Sota. Pertama adalah kepentingan sosial, yaitu mengunjungi sanak famili atau meneruskan pendidikan di Sota. Setelah lulus SMP, anak-anak dari Weam dan Wereaber PNG banyak yang melanjutkan sekolah ke SMA 1 Sota. Saat ini ada kurang lebih 40 siswa dari PNG yang bersekolah di SMA 1 Sota saat dan bahkan menerima dana BOS (informasi dari Sekretaris BNPD, Kabupaten Merauke yang diperkuat oleh petugas imigrasi Sota).

Kepentingan kedua adalah kepentingan ekonomi. Mayoritas warga PNG di daerah perbatasan berbelanja 9 barang pokok ke Sota yang dirasa lebih mudah dan murah daripada di PNG sendiri. Mereka berbelanja aneka ragam kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, rokok, mie, dan pakaian. Omzet dari perdagangan tersebut relatif besar, sehingga berpotensi menyejahterakan masyarakat Sota. Sebagai gambaran tabel 4.7

menunjukkan ragam barang yang biasa dibeli oleh warga PNG di Sota, beserta omzet penjualan selama bulan Januari-Juni 2012.

Tabel 4.7  
Perdagangan Pelintas Batas RI-PNG di Kampung Sota  
Bulan Januari-Juni 2012

Bulan	Jenis Barang	Omzet Penjualan	Keterangan
Januari s/d Juni 2012	Beras	Rp. 74.700.000,-	Konsumen adalah masyarakat pelintas batas di Kampung Sota
	Gula	Rp. 33.300.000,-	
	Tembakau/ Rokok	Rp. 55.200.000,-	
	Supermi	Rp. 21.900.000,-	
	Baterai	Rp. 10.080.000,-	
	Pinang	Rp. 33.600.000,-	
	Pakaian jadi	Rp. 15.600.000,-	
	Kopi	Rp. 8.520.000,-	
	Jumlah	Rp. 252.900.000,-	

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke. "Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan Lintas Batas di Distrik Sota Kabupaten Merauke", 2012

Pilihan warga PNG untuk berbelanja ke Sota sangat beralasan mengingat jarak dan kondisi kawasan perbatasan di Merauke dengan kota terdekat di PNG sangat jauh. Untuk sampai di Port Moresby mereka membutuhkan waktu hampir dua minggu. Karena itulah mayoritas warga PNG di Weam, Morehead dan Wereaber memilih untuk berbelanja ke Sota dibandingkan ke kota di PNG.

Untuk kepentingan lintas batas para penduduk dari Weam, Morehead dan Wereaber PNG yang masuk ke Indonesia, maupun warga Sota yang masuk ke PNG memiliki hak atas Kartu Lintas Batas untuk dapat melewati perbatasan negara (bukan menggunakan paspor). Ada persyaratan khusus untuk dapat memiliki Kartu Lintas Batas, yaitu:

- (a) Bahwa ia laki-laki atau wanita warga negara Indonesia atau Papua Nugini yang telah mencapai umur 18 tahun atau lebih,
- (b) Bahwa ia baik laki-laki atau wanita penduduk perbatasan yang berada di daerah perbatasan yang saling berseberangan,
- (c) Bahwa masuknya ke daerah perbatasan yang saling berseberangan hanya untuk kepentingan tradisional dan kebiasaan saja.
- (d) Bahwa ia baik laki-laki atau wanita bukan orang yang masuknya ke daerah perbatasan yang saling berseberangan dilarang, dibatalkan atau tidak diinginkan oleh petugas imigrasi atau petugas pemerintah pihak lainnya.
- (e) Bahwa ia baik laki-laki atau wanita, bukan merupakan terdakwa yang sedang menunggu proses pengadilan atas kejahatannya ("Special Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic Indonesia and the Government of Papua New Guinea", 15 November 1993).

Kartu Pas Lintas Batas diberikan kepada penduduk di kawasan perbatasan atas kesepakatan kedua negara mengingat di kawasan ini telah lama terjadi perdagangan tradisional antar warga kedua negara. Hal ini juga diakui dalam "Special Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic Indonesia and the Government of Papua New Guinea", 15 November 1993 yang menyatakan bahwa Perdagangan Perbatasan Tradisional dan kebiasaan adalah:

- (a) Perdagangan yang dilaksanakan antar penduduk perbatasan dalam daerah perbatasan sejak dahulu kala; dan
- (b) Perdagangan kebiasaan yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan.

Dengan demikian kepentingan ekonomi yang diselenggarakan pada kawasan perbatasan, khususnya distrik Sota ini merupakan perdagangan tradisional dan kebiasaan yang telah lama berlangsung di kawasan tersebut. Dalam "Special Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the



Republic Indonesia and the Government of Papua New Guinea”, 15 November 1993 diatur pula bahwa :

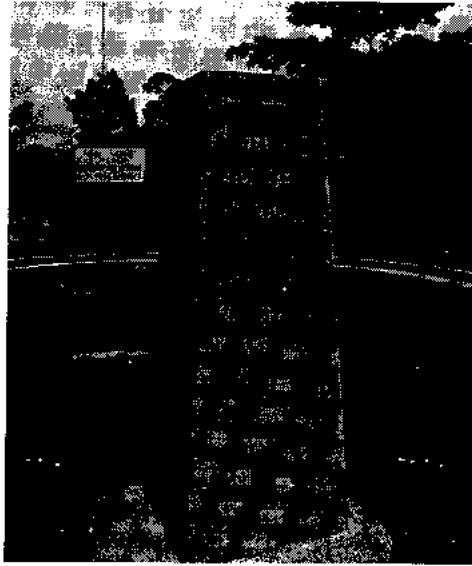
- (a) Barang perdagangan tradisional dan kebiasaan (baik melalui laut maupun lewat darat) tidak akan dikenakan pajak atau bea masuk apapun yang berlaku di kedua negara, tetapi tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan karantina maupun kesehatan yang berlaku. Barang-barang tersebut antara lain;
- (b) Pakaian berbagai jenis
- (c) Barang pribadi untuk kesehatan/kebersihan atau komestik/ asesori
- (d) Barang yang tidak termasuk barang-barang tersebut di atas yang digunakan untuk keperluan sehari-hari baik yang dibawa atau dikenakan atau dikemas dalam tas tetapi tidak termasuk:
- (e) Radio penerima dan alat pemancar besar/non portable
- (f) Pesawat penerima tv, pemancar tv, kamera video, atau perlengkapan video lainnya
- (g) Barang-barang baru lainnya dengan nilai tidak lebih dari US \$ 300.
- (h) Kamera dengan nilai total nilai tidak lebih dari US \$ 300
- (i) Barang-barang untuk keperluan olahraga termasuk perlengkapan kemas tetapi tidak termasuk senjata laras pendek, senapan atau pistol dan segala macam benda yang dapat digunakan menembakkan peluru atau amunisi dan segala macam amunisi
- (j) Alat-alat pertukangan *portable* yang biasanya digunakan untuk membangun rumah dan tetap menjadi milik pelintas batas. Peralatan dan perlengkapan berkebun dan perlengkapan tukang kayu yang dapat dibawa adalah: peralatan berkebun (parang panjang, sekop, kampak beliung, kampak panjang, garpu, sekop, cangkul, penggaruk, gunting besar, kapak tangan, sabit, pembabat rumput, gerobak dorong, alat dorong, alat pemotong dan kikir), dan peralatan tukang kayu (gergaji, martil, palu, pahat, kunci Inggris, penggaris, alat pemutar, penjepit, alat perata, gergaji besi, meteran dan klem).

Nilai barang--barang yang diperdagangkan tidak boleh lebih dari US \$ 300 atau yang senilai dengan itu dalam bentuk uang Kina atau Rupiah, bagi setiap pemegang Kartu Lintas Batas setiap bulan.

#### 4.4.2. Taman Wisata Sota

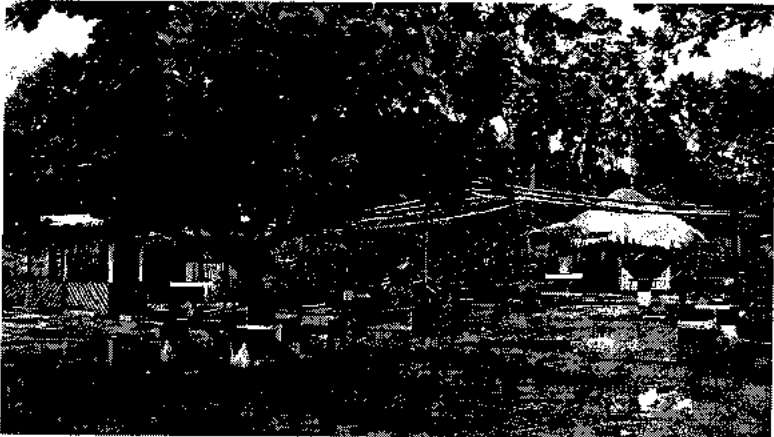
Kondisi eksisting berikutnya yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata perbatasan adalah taman wisata Sota di area perbatasan RI-PNG. Di lokasi ini terdapat beberapa bangunan *iconic*, misalnya tugu merah putih, tugu patok perbatasan RI-PNG, tugu penanda tegak lurus dengan kota Jayapura, kondo dan sungai Torasi, rumah honai dan sarang rayap raksasa yang disebut musamus. Semuanya bisa ditemukan di taman area perbatasan. Area ini menjadi pusat tujuan wisata perbatasan yang dikunjungi oleh wisatawan. Ketika memasuki lokasi ini pengunjung akan melewati jalan tanah yang di kanan kiri berpagar merah putih dengan pepohonan di dalamnya. Terdapat gapura dan tugu merah putih bertuliskan :”Selamat Datang di Sota Perbatasan RI-PNG” sebagai penanda batas wilayah Indonesia dengan Papua Nugini. Di dekatnya terdapat tugu lain bertuliskan: “Bahasa Indonesia Penjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI”. Di taman ini juga bisa dijumpai tugu kecil yang menjadi tempat *iconic* bagi pengunjung untuk berfoto. Tugu ini dibuat oleh tim survey dari Australia sebagai penanda perbatasan dan kawasan paling timur Indonesia. Tempat *iconic* lain adalah 2 musamus (rumah rayap) sangat besar yang terdapat di dalam taman. Di area masuk taman terdapat bangunan beratapkan rumah honai. Sementara itu luar taman dekat area parkir terdapat beberapa warung souvenir yang menjajakan kerajinan tangan khas Papua, seperti tas (noken) berhiaskan bulu burung kasuari, gantungan kunci dan koteka. Ada pula minyak kayu putih produk lokal dari Sota, madu hutan dan umbi-umbian yang dijual mentah.

Gambar 4.2  
Tugu Penanda Garis Lurus Jayapura-Sungai Torasi



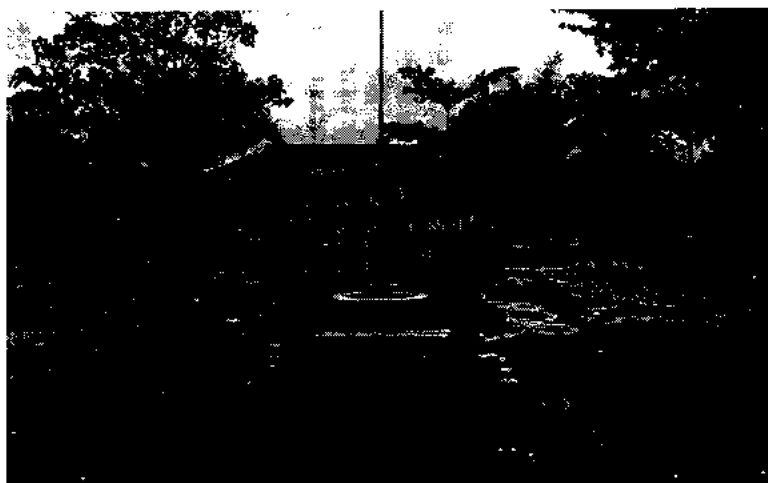
Sumber: Dokumen Pribadi, 2013

Gambar 4.3  
Taman di Perbatasan Sota-Weam



Sumber: Dokumen Pribadi, 2013

Gambar 4.4  
Tugu Merah Putih



Sumber: Dokumen Pribadi, 2017

Potensi wisata perbatasan mulai dikembangkan sejak tahun 2004 ketika kapolsek Sota: bapak Ma'ruf Suroto mencoba mengembangkan potensi pariwisata Sota dengan membuat taman di sekitar rumah, lengkap dengan kebun binatang mini, kebun buah dan sayur dan warung makan. Berikut penuturan bapak Ma'ruf:

Saya buat taman sendiri dengan saudara saya dan anak istri pas ada waktu ... Sekarang sudah menjadi *moment* daerah kunjungan tanpa kita sadari. Awalnya kami berniat untuk merawat tugu perbatasan. Merawat batas wilayah Indonesia. Lama-lama kok orang pada datang dan jadi tempat rekreasi sekarang. Dulu kami buat warung... Kami jualan souvenir-souvenir tahun 2010. Mengajak kepada masyarakat di sekitar perbatasan juga. Berjalan juga... ada yang jualan hasil bumi, hasil kerajinan seperti tas, ukiran-ukiran, anyaman, masih berjalan sampai sekarang dan sekarang saya serahkan kesana supaya mereka lebih maju lagi (Wawancara dengan Ma'ruf Suroto, 21 April 2017).

Di sekitar tugu perbatasan RI-PNG terdapat pasar yang menjajakan aneka souvenir oleh-oleh khas Merauke. Bangunan

pasar terdiri dari los sederhana yang ditata kayu berjejer dan meja beton untuk meletakkan barang dagangan. Di atas meja dibentangkan seutas tali untuk menggantungkan aneka tas, topi dan gantungan kunci. Sementara itu botol-botol kecil aneka bentuk dan warna berjejer di meja, demikian juga the sarang semut yang dikemas dalam plastik. Sepintas terlihat dengan jelas bahwa botol-botol kecil tersebut adalah botol bekas minuman berenergi yang banyak dijual di pasaran. Botol-botol tersebut berisi minyak kayu putih hasil penyulingan penduduk setempat. Di dekat botol-botol minyak kayu putih berjejer pula botol lain yang berisi madu hutan. Sama halnya dengan minyak kayu putih, botol yang digunakan untuk mengemas madu adalah botol bekas dan tanpa merk.

Taman wisata masih perlu terus dikembangkan, mengingat pada hari-hari biasa tidak terlalu ramai dikunjungi. Hanya beberapa pengunjung yang nampak berfoto-foto di depan tugu perbatasan RI-PNG atau di depan musamus (sarang semut) raksasa setinggi lebih dari 2 meter, bercakap-cakap dengan penduduk sekitar yang kebetulan sedang duduk di sekitar warung. Kios penjualan pun tidak semuanya terhuni. Penduduk tidak secara rutin berjualan di area perbatasan. Mereka masih menggantungkan pada *event-event* tertentu, misalnya ketika ada tamu atau kunjungan bupati. Pada *event* semacam itu pasar menjadi ramai sekali. Penduduk menjual apapun yang bisa dijual. Tidak hanya souvenir, minyak kayu putih, madu hutan dan teh sarang semut, tetapi juga hasil kebun seperti pisang, pepaya, ketela dan keladi (Wawancara dengan bapak Ma'ruf 21 April 2017).

Meskipun penuh dengan keterbatasan, taman wisata adalah asset besar bagi kawasan Sota untuk terus dikembangkan. Di sini kelompok ibu-ibu rumah tangga justru menjadi segmen penopang utama dengan kegiatan berkebun dan membuat souvenir. Kapolsek Sota kembali menceritakan: "Saya punya kumpulan ibu-ibu PKK. Tahun lalu kita sudah punya kebun. Tapi karena sekarang musim hujan airnya menggenang, jadi kami belum bisa bergerak. Sayur yang ditanam kangkung, terong, bayam, cabe, untuk konsumsi sehari-hari atau dijual ke tetangga" (Wawancara, 21 April 2017)

Pemuda juga berpartisipasi dalam pengembangan taman wisata dengan membuat souvenir berbentuk tifa untuk hiasan dan gantungan kunci. Aktivitas mereka masih memerlukan pendampingan karena sifatnya masih temporer. Jika musim kunjungan wisatawan mereka berkumpul di perbatasan untuk berjualan. Namun jika tidak ada kunjungan atau hari sedang hujan mereka tidak beraktivitas. Dengan karakter seperti itu proses pendampingan memerlukan kesabaran dan ketelatenan agar para pemuda di kawasan Sota memiliki kesadaran bahwa pariwisata bisa menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### 4.4.3. Ekowisata

Distrik Sota adalah kawasan yang subur. Perkembangan perekonomian distrik Sota turut ditopang oleh bidang pertanian, terutama di kawasan transmigrasi. Hasil-hasil pertanian transmigran ini dijual ke pasar kecamatan, bahkan sampai ke kota Merauke. Komoditas pertanian, berupa sayur mayur dan buah-buahan bisa dikembangkan sebagai penopang daya tarik kawasan perbatasan. Di samping itu perlu pengayaan dalam hal pengolahan hasil pertanian, sehingga menjadi produk pangan olahan yang dapat menjadi komoditas pangan oleh-oleh khas Sota.

Mantan Sekretaris Daerah kabupaten Merauke bapak Mike Talubun mengemukakan potensi Sota sebagai daerah yang prospektif untuk dibangun sebagai kawasan ekowisata. Sota adalah daerah yang sangat kaya dengan hasil bumi buah dan sayur yang semestinya bisa dikembangkan secara ekonomi sehingga mengangkat kesejahteraan rakyat:

Sota memang masuk daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Di sana ada tugu kembar. Demikian juga dengan titik nol kita meski titik nol sebenarnya ada di laut. Mengenai pariwisata, perbatasan dapat menjadi daya tarik. Saya kira kita harus punya produk ekowisata unggulan untuk Sota. Ada ubi ungu di sana yang banyak orang tanam tetapi saya pikir jangan sampai orang ke Sota tidak mendapat apa-apa. Saya pikir kalau ada kebun buah orang pasti akan mampir. Dan bisa jadi ikon Sota. Sota itu sangat strategis karena menghubungkan

Merauke dan Boven Digoel... Jadi ekowisata diluncurkan untuk daya tarik. Kalau bisa kita punya seperti Taman Buah Merksari. Kalau kita mampir di situ kita bisa makan-makan di situ. Mau saya ya Sota bisa punya seperti itu. Bahkan sudah disiapkan sejumlah honai-honai untuk istirahat (Wawancara dengan Mike Talubun, 19 April 2017).

Semangat untuk mengembangkan Sota mendorong pemerintah daerah kabupaten Merauke menggagas pengembangan Sota sebagai kawasan ekowisata atau wisata berbasis lingkungan. Pengembangan dan pengelolaan ekowisata perbatasan Sota tersebut mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban. Program tersebut tertuang dalam visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016 yaitu “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, Kampung Sota dikembangkan sebagai kawasan ekowisata yang memiliki paling tidak 4 (empat) jenis atraksi wisata (*tourist attraction*) yaitu (a) *natural attraction* berupa *landscape* yang unik, (b) *cultural attraction* berupa *art and special events, history and folklore, festivals*, (c) *social attraction* berupa *the way of life, resident population, language*, dan (d) *built attraction* berupa *building, monument, park*. Melalui pengembangan ekonomi wisata perbatasan Sota diharapkan akan mempunyai dampak multiefek bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal serta menjadikan kabupaten Merauke sebagai kawasan yang memiliki komitmen dalam melestarikan alam dan lingkungan (Bappeda Merauke, 2012).

Terkait ekowisata salah satu potensi alam yang bisa dikembangkan adalah produksi minyak penyulingan minyak kayu putih. Namun kesulitan utama dalam produksi minyak kayu putih

di Sota adalah pengemasan. Saat ini di Sota, bahkan di Papua belum ada pabrik botol. Karenanya selama ini masyarakat Sota memanfaatkan botol suplemen bekas. Bahkan karena keterbatasan alat penyulingan prosesnya pun bergantian antara keluarga. Bapak Ma'ruf Suroto kembali menuturkan:

Penyulingan di Sota itu bergantian. Hari ini keluarga siapa, besok keluarga siapa jadi bergiliran terus. Karena keterbatasan tempat karena hanya ada satu ketel. Kalau ada kerusakan dibawa ke Merauke untuk dilaskan. Ya... selama ini kepedulian kita saja.. Kalau kita gak peduli, masyarakat tidak punya aktivitas lagi... Kadang satu marga, Kalau marga Ndiken ada 50 keluarga ya berarti bergantian. Fungsinya pak Niko sebagai koordinator. Dia sebagai Bamuska (Badan Musyawarah Kampung) dia sudah dituakan di sana sekaligus mengatur penyulingan (Wawancara, 21 April 2017).

Sangat disayangkan setelah 3 tahun berjalan program ekowisata tidak terlihat keberhasilannya. Lahan yang dijadikan area untuk kebun buah berubah menjadi tanah lapang yang ditumbuhi rumput dan semak-semak liar. Sementara itu kegiatan penyulingan minyak kayu putih dari warga yang diharapkan menjadi bagian dari program ekowisata juga tidak berjalan dengan baik. Saat ini tinggal 1 kelompok yang aktif melakukan penyulingan minyak kayu putih.

Bapak Misni, salah seorang staf di Dinas Perindustrian kabupaten Merauke menceritakan pengalaman mendampingi masyarakat Sota dalam program penyulingan minyak kayu putih. Dalam rangka menyukseskan program ekowisata di Sota Dinas Perindustrian telah memberikan pelatihan penyulingan minyak kayu putih untuk masyarakat Sota, mengingat kekayaan hutan Sota yang berlimpah daun minyak kayu putih. Namun demikian masyarakat kurang antusias menyambutnya (Wawancara, 19 April 2017).

Meskipun tinggal 1 kelompok yang aktif, saat ini kegiatan penyulingan minyak kayu putih menjadi satu-satunya kegiatan yang masih berjalan dari keseluruhan program ekowisata. Meskipun tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini, setidaknya hasil dari penyulingan minyak kayu putih bisa terlihat dari botol-botol minyak kayu putih yang berjejer dijajakan di pasar perbatasan.



Penyulingan minyak kayu putih dilakukan di rumah bapak Niko dengan melibatkan beberapa kerabat. Setelah proses penyulingan selesai para tetangga membeli secara literan yang lalu dikemas dalam botol-botol bekas, lalu dijual di pasar perbatasan. Bapak Niko menjelaskan bahwa berbagai usaha sudah dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan penyulingan, tetapi mereka tidak mau. Para tetangga lebih tertarik untuk mencari daun minyak kayu putih di hutan dan menjualnya ke bapak Niko sebagai bahan baku atau membeli minyak kayu putih secara literan dari bapak Niko dan lalu menjualnya kembali dalam kemasan botol-botol kecil di warung atau di pasar sebagai oleh-oleh wisatawan yang berkunjung di perbatasan (Wawancara, 17 April 2017).

Menurut Sekretaris Daerah Merauke: bapak Daniel kegagalan program ekowisata di perbatasan Sota turut dipengaruhi oleh ketidaksiapan masyarakat Sota mengubah budaya mereka dari budaya berburu di hutan berubah menjadi petani yang sabar dan ulet:

Dalam program tiga tahun ekowisata ini sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok. Tahun pertama mereka dibayar, bahkan untuk tanam pohon. Tahun berikutnya mereka kan sudah panen jadi seharusnya pemerintah sudah tidak bayar karena sudah punya uang dari panen. Tetapi budaya-budaya menerima uang seperti inilah yang berkembang. Gali lubang bayar, tanam pohon bayar. Tetapi lama kelamaan jadi kebiasaan. Mereka tidak berpikir kalau hasilnya untuk mereka bukan ke pemerintah dan mereka dibayar untuk setiap pekerjaan. Mereka ini membutuhkan keteladanan dan sebenarnya sudah ada program pioneer. Tetapi sekali lagi memang mereka sudah terbiasa dengan segala macam bantuan. Hal inilah yang seringkali menghambat program dinas (Wawancara, 18 April 2017).

Meskipun program ekowisata sedang mengalami fase surut, namun program ini sebenarnya berpotensi besar untuk dikembangkan di Sota. Daya dukung berupa lahan yang subur, kekayaan alam serta budaya merupakan modal yang sangat memadai bagi pembangunan ekowisata di Sota. Peran pemerintah daerah dalam menggerakkan kembali program ini sangat diperlukan, di samping perlunya para motivator untuk menggerakkan masyarakat,

sehingga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola ekowisata.

## Kesimpulan

Distrik Sota di Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini memiliki potensi alam dan budaya yang sangat menarik untuk dikembangkan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perbatasan Sota mulai dikenal masyarakat melalui tayangan youtube dan media sosial lainnya dengan berbagai objek *iconic*-nya. Popularitas ini perlu dijaga dengan merawat bangunan-bangunan tugu yang sudah ada beserta lingkungannya. Hal yang bisa ditambahkan untuk memberi nilai lebih dari objek-objek *iconic* adalah menambahkan keterangan atau penjelasan di setiap objek mengenai asal muasal, sejarah atau maksud bangunan tersebut.

Ekowisata adalah “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Potensi alam Sota sangat mendukung pengembangan ekowisata. Pemerintah daerah kabupaten Merauke beserta dinas-dinas terkait perlu merumuskan ulang langkah-langkah untuk mensukseskan program ekowisata. Di sini keterlibatan masyarakat sangat penting, mengingat salah satu faktor kegagalan program ekowisata adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu mengajak serta tokoh-tokoh masyarakat untuk mendiskusikan program-program riil yang bisa diimplementasikan oleh masyarakat. Harapannya para tokoh masyarakat bisa mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif membangun wisata perbatasan.

## Referensi

- B, Upadhyay B. & Nakul Chettri. Transboundary Eco-tourism in Kangchenjungacomplex: “A case of Darjeeling, Sikkim and Bhutan. International Centre for Integrated Mountain Development Kathmandu, Nepal”, <https://www.icimod.org/resource/4173>. Diakses 8 Desember 2017.
- Samkakai, F.O., Hollinger, D., & Ndiken, I.Y. 2013. *Tanah Malind Suatu Pendekatan Pemetaan Budaya Suku Bangsa*. Merauke: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke.

- Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom. 1993. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Pengaturan Khusus Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Merauke. 2012. *Grand Design Ekowisata Perbatasan Sota Berbasis Masyarakat*.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke. 2016. *Tourism Information. Merauke-Papua-Indonesia*.
- Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke. 2012
- Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan Lintas Batas di Distrik Sota Kabupaten Merauke*.
- , 2017. *Data Pos Imigrasi Perbatasan Sota, Merauke*.
- , 2017. *Gapoktan Distrik Sota*.
- , 2012. *Merauke dalam Angka*.
- , 2016. *Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016*.
- , Tanpa Tahun. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Merauke 2010-2035*.
- , "Special Traditional and Customary Border Crossings between The Government of the Republic Indonesia and the Government of Papua New Guinea", 15 November 1993.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009.
- Catatan wawancara:
- Wawancara dengan bapak Niko, 17 April 2017.
- Wawancara dengan bapak Daniel, 18 April 2017.
- Wawancara dengan bapak Misni, 19 April 2017.
- Wawancara dengan bapak Mike Talubun, 19 April 2017.
- Wawancara dengan bapak Ma'ruf Suroto, 21 April 2017.

## BIODATA PENULIS

Machya Astuti Dewi lahir di Klaten, 12 April 1970. Saat ini menjadi dosen dan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penulis menyelesaikan studi S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1993, kemudian berlanjut S2 pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1997 dan S3 pada Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya tahun 2006.

Selama menjadi dosen, penulis aktif menulis berbagai artikel ilmiah di jurnal-jurnal nasional terakreditasi maupun internasional dan telah banyak mendapatkan hibah penelitian *multiyears* dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain Hibah Bersaing, Hibah Penelitian Strategis Nasional, dan Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan. Topik penelitian yang ditekuni terkait dengan gender dan politik, *people-to-people diplomacy*, dan isu-isu *soft diplomacy* dalam Hubungan Internasional.

Meilan Sugiarto lahir di Cirebon, 23 Mei 1970. Menyelesaikan studi S1 di Jurusan Administrasi Niaga Universitas Diponegoro pada tahun 1994, menyelesaikan studi S2 pada jurusan Administrasi Niaga di Universitas Brawijaya, Malang tahun 2001 dan menyelesaikan studi S3 pada Jurusan Administrasi Bisnis pada Universitas Brawijaya, Malang tahun 2006.

Selain menulis pada sejumlah jurnal, penulis juga banyak mendapatkan hibah penelitian dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain Hibah Bersaing, Hibah fundamental, dan Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan. Topik penelitian yang ditekuni terkait dengan Corporate Social Responsibility, sumber daya manusia dan kampung wisata.

Iva Rachmawati lahir di Yogyakarta. Menjadi dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta semenjak 1998. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Tertarik pada kajian diplomasi, studi mengenai perbatasan dan pariwisata perbatasan. Selain menulis artikel pada sejumlah jurnal terkait dengan topik-topik tersebut, juga menulis buku mengenai Diplomasi Publik dan Hubungan Internasional. Mendapatkan beberapa riset dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, antara lain Hibah Bersaing dan Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan.

Sri Issundari lahir di Bandung dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta. Saat ini penulis sedang menempuh studi S3 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional UNPAD Bandung. Kajian yang menjadi ketertarikan penulis adalah diplomasi, dan desa wisata.

# Meningkatkan Potensi Wisata Perbatasan



**CV. ASWAJA PRESSINDO**

Anggota IKAPI No.071 /DIV /2011

Jl. Plosokuning V No. 73, Minomartani, Yogyakarta

Telp (0274) 4462377

Email: [aswajapressindo@gmail.com](mailto:aswajapressindo@gmail.com)

Website: [www.aswajapressindo.co.id](http://www.aswajapressindo.co.id)